

PERLAWANAN WARGA PESISIR:

**Analisis Peluang Politik Gerakan Nelayan
Desa Tabanio Menuntut Keadilan Distribusi
Solar Bersubsidi**

**Pathurrahman
Enly Hadiyanor
Siti Mauliana Hairini**



**PERLAWANAN
WARGA PESISIR:
Analisis Peluang Politik Gerakan
Nelayan Desa Tabanio Menuntut
Keadilan Distribusi Solar
Bersubsidi**

**Pathurrahman
Enly Hadiyanor
Siti Mauliana Hairini
Editor: Prof. Dr. H. Asmu'i, M.Si.**

Diterbitkan **Lambung Mangkurat University Press, 2023**
d/a Pusat Pengelolaan Jurnal dan Penerbitan ULM
Lantai 2 Gedung Perpustakaan Pusat ULM
Jl. Hasan Basri, Kayutangi, Banjarmasin, 70123
Telp/Fax. 0511-3305195
Anggota APPTI: No. 004.035.1.03.2018

Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa
izin tertulis dari Penerbit, kecuali untuk kutipan singkat demi
penelitian ilmiah dan resensi

142 hlm, 15,5 x 23 cm
Cetakan Pertama, Mei 2023

ISBN:

PRAKATA

bismillahirrahmanirrahim

A *lhamdulillah*, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta raya. Shalawat dan salam semoga tetap

terlimpah kepada Nabi Agung junjungan kita, Nabi Muhamad SAW, keluarga, sahabat dan seluruhumatnya hingga akhir zaman. Pembaca yang budiman, buku yang kami hadirkan di hadapan anda ini dikembangkan berdasarkan hasil riset yang telah dilakukan dalam menganalisis struktur peluang politik gerakan nelayan di Tabanio, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, dalam memperjuangkan keadilan distribusi BBM Solarbersubsidi.

Proses riset Perlawanan Warga Pesisir ini dilakukan beriringan setelah riset Kualitatif tentang Pemerintahan Desa di Indonesia rampung diselesaikan. Beberapa data yang relevan dalam riset tersebut juga kami gunakan untuk melengkapi perumusan buku ini. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada PolGov Universitas Gadjah Mada, *Bell School*, *Australian National University*, *Koninklijk Instituut voor Taal – Land – en Volkenkunde (KITLV)* Universiteit Leiden dan World Bank yang telah mendukung riset tentang Pemerintahan Desa di Indonesia tersebut. Secara langsung kami ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga

kepada Mbak Amalinda Savirani, Mas Arie Ruhyanto, Mas Faiz, Prof. Edward Aspinall, Prof. Ward Berenschot, serta rekan-rekan peneliti dalam program tersebut yang tidak kami sebutkan satu-persatu. Selanjutnya, ucapan terima kasih juga kami haturkan kepada Pambakal Madiansyah, Desi, Iqbal, Sahidan, Muhammad Lili, Budi, Salas (Mahludin), Mama Ana, Acil Miah, Bang Bidin, Bang Madan, Darli, Didi Ontoy serta teman-teman warga Desa Tabanio lainnya yang telah memberikan banyak bantuan dan informasi yang dibutuhkan selama proses riset berlangsung. Tidak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu terselesaikannya buku ini. Semoga Allah mencatatnya sebagai tanaman yang selalu tumbuh dan dapat kita panen buahnya di akhirat nanti. Aamiin YRA.

Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Tentunya masih banyak kekurangan dalam penyusunan buku ini, oleh karena itu saran dan masukan selalu kami harapkan untuk menjadikan buku ini lebih baik lagi. Untuk itu, kami berharap adanya kritik, dan saran dan usulan demi perbaikan di masa yang akan datang.

Pantai Tabanio, Januari 2023

Tim Penulis

KATA PENGANTAR

Oleh: Prof. Dr. H. Asmu'i, M.Si

(Pakar Kebijakan Publik Universitas Lambung Mangkurat)

Salah satu daya pikat dari pengaruh gerakan sosial dalam kaitannya terhadap perubahan kebijakan publik, yakni terletak pada kemampuannya dalam memberikan jalan alternatif yang dapat dilakukan oleh sekelompok warga negara untuk mengoreksi kelemahan-kelemahan yang terdapat pada mekanisme politik formal. Melalui gerakan sosial, maka tahap-tahap pembuatan kebijakan yang kerap berlangsung secara rigid dan formal-prosedural, dapat bertransformasi menjadi proses yang reaktif dan non-formal-prosedural. Bahkan gerakan sosial juga mampu menerobos mekanisme birokratis yang kaku menjadi serba cepat dan lebih cair. Melalui gerakan sosial, masyarakat sipil mampu menunjukkan kekuatan-kekuatan potensial mereka sebagai pemilik modal sosial yang dapat mendorong hadirnya perubahan baik pada level global, nasional dan lokal.

Perkembangan studi-studi terkait gerakan sosial saat ini membuatnya tidak lagi menjadi domain tunggal sosiologi, akan tetapi juga telah menjadi kajian lintas ilmu-ilmu sosial seperti ilmu politik, sejarah, psikologi, hingga studi kebijakan publik. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari implikasi yang ditimbulkan dari gerakan sosial yang mampu mendorong perubahan kondisi yang ada di dalam masyarakat itu sendiri maupun perubahan politik dan kebijakan publik yang

terdapat pada suatu negara. Selain itu, perhatian dari banyak sarjana dalam mempelajari gerakan sosial saat ini juga tidak lagi didominasi pada gerakan yang berskala global dan nasional, namun juga gerakan yang berskala lokal yang berbasis pada masyarakat pedesaan.

Menariknya, walaupun bersifat lokal namun persoalan penyaluran Solar bersubsidi bagi nelayan Desa Tabanio ternyata mendorong Pathurrahman Kurnain, Enly Hadiyanor dan Siti Mauliana Hairini selaku akademisi Politik-Pemerintahan serta akademisi kebijakan publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat, untuk meneliti fenomena tersebut secara lebih mendalam, sekaligus mengembangkannya menjadi buku yang berada di tangan para pembaca saat ini. Oleh karenanya saya mengucapkan selamat kepada tim penulis buku *Perlawanan Warga Pesisir* yang telah mampu menjelaskan fenomena kemunculan dan keberhasilan gerakan masyarakat nelayan Tabanio dengan cermat dan lugas dalam memperjuangkan keadilan distribusi BBM Solar bersubsidi dari pemerintah. Saya berharap semoga buku ini dapat bermanfaat dalam menambah ilmu pengetahuan bagi mahasiswa, para aktivis serta seluruh pihak yang memiliki minat terhadap gerakan sosial yang berbasis pada masyarakat lokal.

DAFTAR ISI

Prakata	i
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi.....	v
Prakata Penulis	viii
Prolog.....	1
Bab 1. Sisi Lain Kehidupan Masyarakat Desa	7
Gerakan Laung Bahenda Desa Jambu Baru Melawan Korporasi Perkebunan Sawit.....	8
Kehidupan Desa Wadas yang Memanas	11
Warga Desa Sumber Sari Lawan Tambang Ilegal.....	15
Bab 2. Gerakan Sosial sebagai Manifestasi Perlawanan	19
Embrio Gerakan Perlawanan Nelayan Tabanio	24
Bab 3. Konseptualisasi Gerakan Sosial.....	53
Pemetaan Teori Gerakan Sosial	67
Resistensi Gerakan Sosial	71
Faktor Penentu Keberhasilan dan Kegagalan Gerakan Sosial....	80
Bab 4. Fase-Fase Gerakan Sosial	101
Fase Kemunculan	101
Fase Penggabungan.....	102
Fase Birokratisasi	103
Fase Kemunduran.....	103
Perlawanan Warga Pesisir	

Bab 5. Faktor Penentu Keberhasilan dan Kegagalan Gerakan Sosial.....	109
Kepemimpinan Efektif.....	109
Citra Positif Gerakan Sosial.....	116
Taktik yang diterima dalam suatu masyarakat.....	121
Tujuan yang dapat diterima publik.....	128
Dukungan Politik dan Finansial).....	130
Bab 6. Setting Sejarah, Sosial, Politik, dan Ekonomi Tabanio	131
Bab 7. Struktur Peluang Politik Gerakan Perlawanan Nelayan Tabanio.....	155
Pendekatan <i>Political Opportunity Structure</i> (POS).....	155
Dinamika Studi Gerakan Sosial.....	158
Struktur Peluang Politik Sebagai Pendorong Gerakan Sosial.....	161
Bab 8. Happy Ending	187
Epilog.....	193
Daftar Pustaka.....	199
Tentang Penulis	205

PRAKATA PENULIS

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta raya. Shalawat dan salam semoga tetap melimpah kepada Nabi Agung junjungan kita, Nabi Muhamad SAW, keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pembaca yang budiman, buku yang kami hadirkan di hadapan anda ini dikembangkan berdasarkan hasil riset yang telah dilakukan dalam menganalisis struktur peluang politik gerakan nelayan di Tabanio, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, dalam memperjuangkan keadilan distribusi BBM Solar bersubsidi.

Proses riset Perlawanan Warga Pesisir ini dilakukan beriringan setelah riset Kualitatif tentang Pemerintahan Desa di Indonesia rampung diselesaikan. Beberapa data yang relevan dalam riset tersebut juga kami gunakan untuk melengkapi perumusan buku ini. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada PolGov Universitas Gadjah Mada, *Bell School*, *Australian National University*, *Koninklijk Instituut voor Taal – Land – en Volkenkunde (KITLV)* Universiteit Leiden dan World Bank yang telah mendukung riset tentang Pemerintahan Desa di Indonesia tersebut. Secara langsung kami ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Mbak Amalinda Savirani, Mas Arie Ruhyanto, Mas Faiz,

Perlawanan Warga Pesisir

Prof. Edward Aspinall, Prof. Ward Berenschot, serta rekan-rekan peneliti dalam program tersebut yang tidak kami sebutkan satu-persatu. Selanjutnya, ucapan terima kasih juga kami haturkan kepada Pambakal Madiansyah, Desi, Ikbal, Sahidan, Muhammad Lili, Budi, Salas (Mahludin), Mama Ana, Acil Miah, Bang Bidin, Bang Madan, Darli, Didi Ontoy serta teman-teman warga Desa Tabanio lainnya yang telah memberikan banyak bantuan dan informasi yang dibutuhkan selama proses riset berlangsung. Tidak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu terselesaikannya buku ini. Semoga Allah mencatatnya sebagai tanaman yang selalu tumbuh dan dapat kita panen buahnya di akhirat nanti. Aamiin YRA.

Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Tentunya masih banyak kekurangan dalam penyusunan buku ini, oleh karena itu saran dan masukan selalu kami harapkan untuk menjadikan buku ini lebih baik lagi. Untuk itu, kami berharap adanya kritik, dan saran dan usulan demi perbaikan di masa yang akan datang.

Pantai Tabanio, Januari 2023

SINOPSIS

Buku ini merupakan hasil kajian yang menganalisis persoalan gerakan sosial dalam kasus penyaluran solar bersubsidi bagi nelayan Desa Tabanio. Salah satu daya pikat dari pengaruh gerakan sosial dalam kaitannya terhadap perubahan kebijakan publik, yakni terletak pada kemampuannya dalam memberikan jalan alternatif yang dapat dilakukan oleh sekelompok warga negara untuk mengoreksi kelemahan-kelemahan yang terdapat pada mekanisme politik formal.

Melalui gerakan sosial, maka tahap-tahap pembuatan kebijakan yang kerap berlangsung secara rigid dan formal-prosedural, dapat bertransformasi menjadi proses yang reaktif dan non-formal-prosedural. Bahkan gerakan sosial juga mampu menerobos mekanisme birokratis yang kaku menjadi serba cepat dan lebih cair. Melalui gerakan sosial, masyarakat sipil mampu menunjukkan kekuatan-kekuatan potensial mereka sebagai pemilik modal sosial yang dapat mendorong

hadirnya perubahan baik pada level global, nasional dan lokal.

Perkembangan studi-studi terkait gerakan sosial saat ini membuatnya tidak lagi menjadi domain tunggal sosiologi, akan tetapi juga telah menjadi kajian lintas ilmu-ilmu sosial seperti ilmu politik, sejarah, psikologi, hingga studi kebijakan publik. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari implikasi yang ditimbulkan dari gerakan sosial yang mampu mendorong perubahan kondisi yang ada di dalam masyarakat itu sendiri maupun perubahan politik dan kebijakan publik yang terdapat pada suatu negara. Selain itu, perhatian dari banyak sarjana dalam mempelajari gerakan sosial saat ini juga tidak lagi didominasi pada gerakan yang berskala global dan nasional, namun juga gerakan yang berskala lokal yang berbasis pada masyarakat pedesaan.

Dari hasil studi yang telah dilakukan terhadap gerakan perlawanan nelayan Desa Tabanio menunjukkan bahwasanya pada proses perumusan maupun perubahan kebijakan publik ternyata tidak selalu berupa siklus kebijakan yang berjalan secara teknokratik, linier serta

bersifat legal-formal seperti yang dikemukakan logika umum dalam teori-teori kebijakan publik klasik. Dalam kondisi tertentu maupun pada kasus-kasus yang lebih spesifik, kehadiran gerakan sosial dapat mempengaruhi mekanisme perubahan kebijakan publik, sehingga prosesnya berjalan diluar dari tahapan logika konvensional. Proses perubahan kebijakan pemerintah yang bersifat non-konvensional karena tuntutan suatu gerakan, secara tidak langsung turut dipengaruhi oleh terbukanya struktur peluang politik yang memberikan momentum terhadap gerakan untuk muncul ke permukaan.

Hasil kajian atau studi dalam paparan buku ini telah menemukan beberapa variabel yang menjadi penanda terbukanya struktur peluang politik hingga menjadi pemicu terbentuknya gerakan masyarakat nelayan Desa Tabanio. Menariknya, variabel-variabel tersebut ternyata tidak berada pada sistem politik tunggal, melainkan kombinasi sistem politik yang merepresentasikan lapisan konstelasi politik pada level desa dan lapisan konstelasi politik pada level supra-desa. Kendatipun struktur

peluang politik di level supra-desa relatif terbuka, namun ketika struktur peluang politik pada level desa masih tertutup maka kemunculan gerakan masyarakat nelayan Tabanio tidak dapat terbentuk secara masif dan berjalan efektif, begitu juga sebaliknya. Oleh sebab itu, perlu kiranya diperhatikan kepada para aktor yang akan menggalang gerakan yang berbasis pada masyarakat pedesaan, agar mampu melakukan kalkulasi peluang politik secara cermat, apakah struktur peluang politik yang terdapat pada level desa dan level supra-desa benar-benar terbuka untuk memungkinkan mereka membangun sebuah gerakan yang efektif.

Studi ini juga menunjukkan bahwa pendekatan struktur peluang politik dalam menganalisis kemunculan dan keberhasilan suatu gerakan relatif bersifat elit-sentris. Variabel-variabel terbukanya struktur peluang politik ternyata lebih ditentukan oleh konfigurasi relasi antar kelompok elit serta bagaimana kelompok elit tersebut memainkan perannya. Studi ini semakin menegaskan kembali terhadap apa yang dikemukakan oleh teoritis pengusung pendekatan proses politik bahwa agar dapat

mencapai keberhasilan dari suatu gerakan, maka para aktor yang berada dalam suatu lingkungan politik perlu untuk mencari momentum yang tepat sehingga mereka dapat berada pada situasi yang menguntungkan untuk membangun gerakan sosial.

PROLOG

Gerakan Sosial: Langkah untuk Menegakkan Keadilan dan Hak-Hak Warga Negara

M. IKBAL (KETUA BPD TABANIO)



Assalamualaikum. Wr. Wb.

A *lhamdulillah wa Syukurillah*, buku yang mengangkat perihal Gerakan Perlawanan Nelayan Tabanio yang ditulis oleh Pathurrahman dan Siti Mauliana Hairini dapat rampung dan terselesaikan dengan baik. Kami selaku Ketua BPD Tabanio menyambut baik terhadap adanya buku ini. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada peneliti sekaligus penulis

buku ini, yang telah berkenan untuk mengangkat persoalan yang dialami oleh Masyarakat Nelayan Tabanio sebagai media dalam memperkaya studi gerakan sosial yang bersifat mikro berbasis masyarakat lokal. Kami juga mengucapkan permohonan maaf jika selama beberapa bulan penulis melakukan risetnya di Desa Tabanio, terdapat kekurangan, kekeliruan ataupun kekhilafan dari masyarakat dalam bertingkah laku ataupun memberikan informasi maupun data-data yang dibutuhkan dalam penelitian. Kami juga berharap agar penulis kembali dapat menjadikan Desa Tabanio pada khususnya ataupun Kabupaten Tanah Laut pada umumnya, sebagai lokasi penelitian-penelitian yang akan dilakukan pada kesempatan berikutnya.

Harapannya apa yang telah dilakukan oleh masyarakat Nelayan Tabanio dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan terkait dinamika persoalan-persoalan sosial, politik dan ekonomi yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat desa, khususnya desa-desa pesisir. Dengan diterbitkannya buku ini kami meletakkan harapan besar agar nantinya dapat menjadi pembelajaran bagi warga desa Tabanio, khususnya masyarakat nelayan bahwa apa yang telah mereka lakukan sebagai sebuah upaya untuk menegakkan keadilan dan memperjuangkan hak-hak sosial, ekonomi dan politik dari warga negara. Selain itu pula, kami berharap juga agar buku ini dapat dibaca luas dan dapat menjadi perhatian secara seksama oleh pemangku kebijakan dan *stakeholder* yang terkait, khususnya kepada pemerintah Kabupaten Tanah Laut, sehingga persoalan-persoalan distribusi BBM Solar bersubsidi tidak kembali terulang di Bumi Tuntung Pandang atau Kota Kijang Mas.

Dalam persoalan ini, BPD mendukung penuh bersama masyarakat dalam perjuangan mendapatkan keadilan bagi para nelayan Tabanio untuk mendapatkan hak-haknya untuk mendapatkan BBM Solar

bersubsidi dari pemerintah sesuai dengan kebutuhan masing-masing kapal nelayan. Kami juga mendorong agar aparat berwajib dapat menindak tegas jika terbukti ada praktik-praktik mafia BBM Solar bersubsidi yang sewenang-wenang mengatas-namakan masyarakat untuk mengambil keuntungan secara pribadi, yang pada akhirnya justru akan merugikan masyarakat dan negara. Dalam konteks ini, kami juga kembali menegaskan bahwasanya masyarakat Nelayan Tabanio selama ini tidaklah menerima BBM Solar bersubsidi sesuai dengan yang data yang dilaporkan oleh Pengelola Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Untuk Nelayan (SPBUN) Tabanio kepada PT. Pertamina setiap bulannya.

BPD Tabanio sangat berkeinginan agar Pengelola SPBUN Tabanio dapat melakukan introspeksi diri dan menjalankan aktifitas operasionalnya sesuai dengan prosedur standar yang diberlakukan PT. Pertamina dalam menyalurkan BBM Solar bersubsidi, sehingga kebutuhan nelayan bisa terpenuhi. Jika memang terbukti benar terdapat kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pengelola SPBUN, yang kebenarannya ditambah data dukung (bukti-bukti), agar pihak-pihak terkait dapat melakukan proses sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta jangan ada upaya untuk menutup-nutupi persoalan distribusi BBM Solar Bersubsidi untuk nelayan di Desa Tabanio. Sebagai representasi masyarakat desa, BPD Tabanio juga perlu mendorong agar pengelolaan SPBUN Tabanio ke depannya dapat membangun kerjasama-sama untuk membantu peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD) Tabanio.

KATA PENGANTAR



Prof. Dr. H. Asmu'i, M.Si
Pakar Kebijakan Publik
Universitas Lambung Mangkurat

Salah satu daya pikat dari pengaruh gerakan sosial dalam kaitannya terhadap perubahan kebijakan publik, yakni terletak pada kemampuannya dalam memberikan jalan alternatif yang dapat dilakukan oleh sekelompok warga negara untuk mengoreksi kelemahan-kelemahan yang terdapat pada mekanisme politik formal. Melalui gerakan sosial, maka tahap-tahap pembuatan kebijakan yang kerap berlangsung secara rigid dan formal-prosedural, dapat bertransformasi menjadi proses yang reaktif dan non-formal-prosedural. Bahkan gerakan sosial juga mampu menerobos mekanisme birokratis yang kaku menjadi serba cepat dan lebih cair. Melalui gerakan sosial, masyarakat sipil mampu menunjukkan kekuatan-kekuatan potensial mereka sebagai pemilik modal sosial yang dapat mendorong hadirnya perubahan baik pada level global, nasional dan lokal.

Perkembangan studi-studi terkait gerakan sosial saat ini membuatnya tidak lagi menjadi domain tunggal sosiologi, akan tetapi juga telah menjadi kajian lintas ilmu-ilmu sosial seperti ilmu politik, sejarah, psikologi, hingga studi kebijakan publik. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari implikasi yang ditimbulkan dari gerakan sosial yang mampu mendorong perubahan kondisi yang ada di dalam masyarakat itu sendiri maupun perubahan politik dan kebijakan publik yang terdapat pada suatu negara. Selain itu, perhatian dari banyak sarjana dalam mempelajari gerakan sosial saat ini juga tidak lagi didominasi pada gerakan yang berskala global dan nasional, namun juga gerakan yang berskala lokal yang berbasis pada masyarakat pedesaan.

Menariknya, walaupun bersifat lokal namun persoalan penyaluran Solar bersubsidi bagi nelayan Desa Tabanio ternyata mendorong Pathurrahman Kurnain, Enly Hadiyanor dan Siti Mauliana Hairini selaku akademisi Politik-Pemerintahan serta akademisi kebijakan publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat, untuk meneliti fenomena tersebut secara lebih mendalam, sekaligus mengembangkannya menjadi buku yang berada di tangan para pembaca saat ini. Oleh karenanya saya mengucapkan selamat kepada tim penulis buku *Perlawanan Warga Pesisir* yang telah mampu menjelaskan fenomena kemunculan dan keberhasilan gerakan masyarakat nelayan Tabanio dengan cermat dan lugas dalam memperjuangkan keadilan distribusi BBM Solar bersubsidi dari pemerintah. Saya berharap semoga buku ini dapat bermanfaat dalam menambah ilmu pengetahuan bagi mahasiswa, para aktivis serta seluruh pihak yang memiliki minat terhadap gerakan sosial yang berbasis pada masyarakat lokal.

BAB I

SISI LAIN KEHIDUPAN MASYARAKAT DESA

*Didiklah rakyat dengan organisasi, didiklah penguasa dengan perlawanan...
(Pramoedya Ananta Toer)*

Pada umumnya, orang-orang menganggap bahwa hidup di daerah pedesaan relatif lebih tenang, nyaman dan penuh kedamaian. Berbeda jauh dengan kehidupan di perkotaan yang penuh dengan kompetisi, konflik dan permasalahan yang kompleks, hingga waktu yang terasa berjalan sangat cepat. Namun dalam realitasnya, tidak sepenuhnya persepsi tersebut dapat diterima dan relevan dalam melihat kehidupan masyarakat desa di Indonesia, khususnya di era keterbukaan arus informasi dan modernitas yang terus berpacu saat ini, termasuk semakin menguatnya gurita investasi *cum* kapitalisme maupun proyek-proyek strategis negara yang merambah desa. Narasi yang mengaitkan desa sebagai ruang bersemainya stabilitas kehidupan kolektif seakan kian terlihat usang manakala bermunculan informasi-informasi/berita-berita tentang desa. Ternyata desa juga menyimpan jalan ceritanya tersendiri. Masyarakat desa juga memiliki dinamika sosial-politik yang tidak kalah bergejolak dibandingkan kehidupan

masyarakat perkotaan. Bahkan, dalam beberapa kondisi dan situasi tertentu pun kehidupan di pedesaan malah terkadang rasanya jauh lebih keras dibandingkan di lingkungan perkotaan. Dalam bab ini, akan dikemukakan beberapa contoh kasus bagaimana kedamaian kehidupan warga desa yang tercerabut karena harus berjuang keras dalam membangun gerakan sosial guna memperjuangkan kepentingan masyarakat desa.

a. Gerakan Laung Bahenda Desa Jambu Baru Melawan Korporasi Perkebunan Sawit

Secara kasuistis, gerakan sosial atau perlawanan masyarakat yang terjadi di Pulau Kalimantan pada umumnya bercorak resistensi warga terhadap ancaman penyerobotan lahan oleh korporasi yang agresif dan ekspansif untuk memperluas lahan perkebunan (Nasrullah, 2021). Hal inilah yang dirasakan oleh masyarakat Desa Jambu Baru, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Desa yang terletak di wilayah aliran sungai Barito ini merupakan desa yang penduduknya berbasis etnik Dayak Bakumpai. Kedamaian hidup masyarakat Desa Jambu Baru mulai terusik manakala di desa tetangga tersiar kabar masuknya perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Tasnia Agro Lestari, di wilayah mereka. Menariknya, di Desa Jambu Baru para tokoh masyarakat, pengurus Masjid, ketua-ketua RT serta kepala desanya memiliki kesamaan sikap untuk menolak tawaran perusahaan untuk melakukan kerjasama yang terlihat cukup menggiurkan. Mereka berpikir bahwa rencana ekspansi perusahaan sawit ke desa Jambu Baru harus segera dihentikan. Kendatipun, pihak pemerintah pusat menuding bahwa penolakan para tokoh masyarakat Jambu Baru tersebut sebagai bentuk sikap “*Tidak mengerti arti pembangunan, karena kalau masyarakat tidak mau kebun kepala sawit, berarti menyerahkan nasib saja mewariskan kemiskinan*” (Nasrullah, 2021).

Menerima respon penolakan dari masyarakat Jambu Baru ini, rupanya pihak perusahaan sawit tidak mau menyerah begitu saja. Berbagai strategi dilakukan oleh korporasi guna mengekspansi wilayah Jambu Baru untuk dijadikan areal perkebunan sawit, seperti melakukan pendekatan persuasif, memberikan iming-iming warga untuk diberikan pekerjaan diperusahaan, hingga memperluas areal perkebunan mereka secara diam-diam (Nasrullah, 2021). Penolakan warga Jambu Baru ini memang sangat beralasan. Para pemuda desa yang memiliki mobilitas tinggi bepergian ke wilayah luar melihat sendiri bagaimana nasib petani kebun sawit sebenarnya. Melalui pengalaman dan pengetahuannya, pemuda Jambu Baru ini dapat membandingkan bagaimana kehidupan penduduk setempat sebelum dan sesudah kedatangan perkebunan sawit (Nasrullah, 2021). Dilema kehidupan masyarakat berbasis perkebunan kelapa sawit terus menjadi topik hangat di ruang-ruang berkumpulnya warga Desa Jambu Baru.

Apa yang mereka khawatirkan ternyata telah menjadi kenyataan. Perluasan areal perkebunan kelapa sawit kini telah menembus garis batas luar wilayah Desa Jambu Baru. Kepala desa, tokoh masyarakat hingga warga desa mulai bereaksi dengan mengambil sikap tegas sebagai respon dari persoalan tersebut. Pihak perusahaan sawit mengklaim telah memiliki Ijin Hak Guna Usaha (HGU) untuk merambah wilayah Jambu Baru sebagai areal perluasan kebun sawit mereka. Perseteruan antara warga desa dengan karyawan perusahaan sawit tidak bisa terelakkan lagi. Bahkan tercatat beberapa kali mereka terlibat ketegangan, beruntung perseteruan tersebut dapat diredam oleh warga Jambu Baru sendiri (Nasrullah, 2021). Dibalik sikap-sikap para pemuda desa yang dengan keras menolak wilayah mereka dijadikan areal perkebunan sawit, juga terdapat pendapat warga desa yang menginginkan jalan tengah sebagai solusi. Saat jalan tengah tidak dapat terwujud, warga desa akhirnya mencari langkah alternatif yakni

Perlawanan Warga Pesisir

dengan membangun suatu gerakan yang mereka namakan *Gerakan Laung Bahenda* (Gerakan Ikat Kepala Kuning). Simbol ikat kepala kuning ini sebenarnya telah digunakan oleh etnis Dayak Bakumpai maupun masyarakat Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito Raya saat melawan penjajah Belanda hingga paska perang kemerdekaan (Noor, 2019).



Gambar: Anggota Gerakan Laung Bahenda, Desa Jambu Baru.

Sumber: jejakrekam.com.

Gerakan tersebut merupakan proses pengorganisasian warga desa dan para aktivis dengan tujuan untuk melakukan penolakan terhadap keberadaan perkebunan kelapa sawit. Gerakan Laung Bahenda juga memiliki nilai tersendiri, karena disebut juga sebagai gerakan moral sekaligus gerakan budaya masyarakat Dayak Bakumpai yang mengedepankan prinsip komunikasi dan dialogis yang bersifat simetris dan egaliter. Gerakan ini memiliki prinsip hanya menggunakan

langkah-langkah komunikasi serta membangun dialogis kepada pihak-pihak yang terlibat ataupun pihak yang berseteru. Berdialog, berdebat, adu-data hingga argumen di hadapan wakil rakyat menjadi strategi efektif bagi Gerakan Laung Bahenda untuk memperjuangkan tujuannya. Ditambah lagi dukungan media massa baik dalam versi cetak maupun elektronik terus digulirkan untuk selalu meliput setiap aksi-aksi yang digelar oleh gerakan. Melalui prinsip ini aksi-aksi destruktif dan anarkis dapat dihindari dalam penyelesaian masalah konflik.

b. Kehidupan Desa Wadas yang Memanas

Terdapat sebuah desa yang terletak di Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Desa tersebut bernama Wadas. Sejak pertengahan Februari 2022 lalu desa ini menyita sorotan publik disebabkan adanya aktifitas pembebasan lahan yang digunakan untuk aktifitas penambangan batu andesit untuk keperluan material proyek pembangunan Bendungan Bener, di Kabupaten Purworejo. Bendungan Bener memiliki status Proyek Strategis Nasional (PSN), yang nantinya akan difungsikan sebagai penyuplai utama kebutuhan air ke Bandara Yogyakarta International Airport (YIA), di Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dikutip dari laman Kompas.com¹, kapasitas bendungan yang menelan dana APBN sebesar Rp 2,060 triliun ini diproyeksikan mampu menampung 100,94 meter kubik air, yang mampu mengairi luas lahan hingga 15.069 hektare. Bendungan ini juga diklaim oleh pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dapat menjadi penghasil daya listrik sebesar 6 megawatt serta mampu

¹ <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/09/17020441/awal-mula-warga-wadas-melawan-tolak-tambang-batu-andesit-untuk-proyek>

Perlawanan Warga Pesisir

memasok kebutuhan air baku hingga 1,60 meter per detik, dengan potensi pengurangan debit banjir hingga mencapai 210 meter kubik per detik.

Namun dibalik segala manfaatnya tersebut, ternyata proyek pembangunan Bendungan Bener menyimpan cerita penentangan oleh sebagian warga Desa Wadas. Warga menolak aktivitas penambangan batu andesit di wilayah mereka karena sarat akan dampak persoalan ekologis dan dinilai merampas ruang hidup masyarakat setempat. Dikhawatirkan akan merusak 28 titik sumber mata air yang ada di Wadas. Saat sumber mata air terganggu, maka menimbulkan persoalan turunan yang berimplikasi terhadap rusaknya lahan pertanian hingga terenggutnya mata pencaharian warganya sebagai petani. Belum lagi aktivitas penambangan tersebut juga menyebabkan lahan di Desa Wadas menjadi semakin rawan mengalami longsor jika musim hujan melanda. Ketakutan warga ini cukup beralasan mengingat berdasarkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo 2011-2031 mengindikasikan, kawasan Kecamatan Bener, termasuk di juga Desa Wadas, termasuk zona rawan bencana tanah longsor. Dalam keterangannya di situs resmi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)², dijelaskan bahwa proyek tambang batu andesit di Desa Wadas termasuk dalam kategori tambang *quarry* (penambangan terbuka), dimana lahan yang termasuk dalam wilayah penambangan akan dibor, diledakkan dan keruk tanpa sisa hingga kedalaman 40 meter. Oleh sebab itu, WALHI menegaskan bahwa potensi rusaknya ekosistem lahan dan bentang alam di Desa Wadas menjadi hal yang sangat sulit dihindarkan.

² <https://www.walhi.or.id/>



Gambar: Poster Majalah Tempo tentang Wadas Melawan

Sumber: bisnis.tempo.co

Oleh karenanya warga Wadas yang menolak aktivitas penambangan batu andesit melakukan gerakan untuk mendesak Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah untuk segera mencabut Izin Penetapan Lokasi (IPL) penambangan batu andesit di wilayah mereka. Mulanya warga melakukan aksi damai untuk memprotes pemasangan patok untuk proyek pembangunan Bendungan Bener. Namun Pemerintah seperti

Perlawanan Warga Pesisir

tak bergeming dan terus melanjutkan proyek tersebut. Tak ayal lagi, proyek penambangan batu dan pembangunan bendungan telah menjadi sumber konflik, baik konflik horizontal antara warga Wadas yang pro dan warga Wadas yang kontra terhadap proyek tersebut, maupun konflik vertikal yang melibatkan warga yang menolak proyek penambangan dan pembangunan bendungan dengan pihak Pemerintah.

Kehidupan masyarakat di Desa Wadas yang dulunya tentram pun kemudian bergejolak akibat konflik sumberdaya alam. Penolakan warga desa terhadap proyek strategis ini berujung pada pelabelan mereka sebagai pihak yang merintangangi proyek infrastruktur pemerintah. Hingga pada 24 April 2021, sebanyak 11 orang warga Wadas ditangkap oleh aparat karena dianggap menghalang-halangi proyek pemerintah. Hak warga atas rasa aman mulai tercerabut dari kehidupan mereka.

Warga Wadas yang menentang wilayahnya dijadikan tambang batu andesit juga semakin merapatkan barisan untuk membangun gerakan penolakan. Mereka bersikukuh bahwa mereka sebenarnya bukan menolak pembangunan Bendungan Bener, akan tetapi hanya menolak tambang batu andesit yang akan merusak lingkungan. Selang beberapa waktu, titik penyelesaian konflik antara warga Wadas dan pemerintah rupanya belum tercapai. Hingga pada Selasa, 08 Februari 2022, sebanyak 250 personil gabungan dari unsur TNI, Polri, dan Satpol PP memasuki Desa Wadas untuk mendampingi 70 orang dari pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Dinas Pertanian guna melaksanakan pengukuran dan penghitungan tanaman tumbuh sebagai data untuk memberikan kompensasi bagi warga Wadas yang terdampak. Kondisi ini memicu ketegangan dan adu mulut serta ancaman antara warga yang pro dan kontra terhadap proyek penambangan batuan, hingga aparat akhirnya mengamankan sebanyak 60 orang warga yang membawa senjata tajam/parang ke Polsek Bener. Kedamaian kehidupan warga Desa Wadas akhirnya benar-benar terusik karena adanya konflik penambangan batuan tersebut.

c. Warga Desa Sumber Sari Lawan Tambang Ilegal

Kamis pagi, tanggal 07 oktober 2021 ketentraman dan kedamaian kehidupan warga Desa Sumber Sari, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur mulai terusik. Sebelum terik matahari menyengat, puluhan warga Desa sudah berkerumun di pertigaan jalan utama desa mereka. Berdasarkan pemberitaan yang yang dirilis kaltimkece.id³, sebagian warga desa yang berkumpul tersebut adalah para petani. Mereka berupaya memblokade persimpangan jalan desa tersebut, yang merupakan akses ke tempat wisata air terjun Bukit Biru yang berada tidak jauh dari tempat tinggal warga Desa Sumber Sari.

Aksi kerumunan warga ini rupanya dalam rangka melakukan *sweeping* truk-truk yang melintasi jalan desa mereka. Kecurigaan warga desa rupanya cukup beralasan, karena mereka menemukan tiga buah *dump truck* yang mengangkut batubara. Warga mencurigai bahwa truk yang bermuatan ‘emas hitam’ tersebut berasal dari aktivitas tambang ilegal yang telah beroperasi di sekitar Desa Sumber Sari. Warga kemudian menahan truk beserta sopir untuk kemudian dilaporkan kepada pihak kepolisian.

Aksi perlawanan warga desa terhadap aktivitas tambang ilegal yang beroperasi di wilayah mereka tidaklah berhenti sampai di situ saja. Pada Senin, tanggal 04 Oktober 2021, Legiman yang merupakan Ketua RT 09 Desa Sumber Sari, mendatangi lokasi pertambangan tersebut dan menemui operator ekskavator yang tengah beraktivitas. Operator tersebut mengakui kepada Legiman bahwa dirinya memang sedang menambang batu bara. Legiman kemudian berinisiatif untuk melarang alat berat itu beroperasi karena tambang tersebut tidak memiliki izin. Apalagi dikhawatirkan aktivitas tersebut berdampak

3 <https://kaltimkece.id/warta/kutai-kartanegara/makin-meluasnya-gerakan-warga-melawan-tambang-ilegal-di-bukit-biru-kukar-ketua-rt-diancam-preman>

Perlawanan Warga Pesisir

terhadap kerusakan lingkungan, jalan umum hingga mencemari kawasan pertanian warga dan objek wisata air terjun Bukit Biru di daerah tersebut. Bahkan jarak antara lokasi pertambangan dengan situs wisata air terjun tidak lebih dari 500 meter.



WARGA DESA MELAWAN TAMBANG ILEGAL



kaltimkece.id

- Rabu siang, 3 Agustus 2022, ratusan warga mendatangi lokasi tambang yang diduga ilegal di Desa Sumber Sari, Loa Kulu, Kutai Kartanegara.
- Di situ, warga berunjuk rasa menolak tambang tersebut karena telah menimbulkan dampak negatif.
- Kepala Desa Sumber Sari, Sutarno, mengatakan, aktivitas tambang telah membual air Sungai Pelay, yang digunakan untuk mengairi pertanian dan membudidayakan ikan, tercemar.
- Warga juga menolak tambang karena Desa Sumber Sari merupakan objek wisata.
- Kepala Polsek Loa Kulu, AKP Dedy Setiawan, belum memberikan banyak keterangan mengenai dugaan tambang ilegal tersebut.
- Dinamisiator Jatem Kaltim, Pradarma Rupang, mengatakan, aksi ini dipicu dari ketidakhadiran negara dalam mengatasi masalah tambang.
- Negara disebut tak berbuat banyak saat masyarakat ditindas oleh oknum tak bertanggung jawab.



Sumber: Artikel kaltimkece.id "Ratusan Orang Dukung Tambang Dituduh Ilegal di Rukar, Buntut Krisis Kepercayaan Terhadap Negara"

Gambar: Infografik Perlawanan Warga Sumber Sari terhadap Tambang Ilegal
Sumber: kaltimkece.id

Tidak lama setelahnya, Legiman mengaku didatangi oleh empat orang laki-laki dan mengancam untuk tidak menghalang-halangi aktivitas pertambangan. Kepala desa Sumber Sari, Sutarno, juga mengatakan bahwa dirinya tidak pernah mendapatkan pemberitahuan maupun izin melakukan aktivitas pertambangan kepada pemerintah desa. Bahkan setelah melakukan pengecekan ke lokasi tambang yang berjarak 1 kilometer dari lokasi penutupan jalan, dirinya menemukan tiga unit ekskavator yang ditinggalkan oleh operatornya. Bukti-bukti dari adanya aktivitas tambang batubara ilegal ini telah membuat warga desa gelisah sekaligus juga marah. Terlebih negara seolah absen dalam menghadapi persoalan ini. Sehingga cara yang dapat dilakukan oleh warga desa adalah dengan melakukan perlawanan sporadik untuk menentang aktivitas pertambangan ilegal di daerah mereka.

Perlawanan warga Desa Sumber Sari rupanya tidak mengenal kata surut. Dikutip pada laman berita kaltimkece.id⁴, pada Rabu siang, tanggal 03 Agustus 2022, ratusan warga desa kembali bergerak dan menyerbu lokasi tambang ilegal tersebut. Mereka membawa spanduk yang berisikan pernyataan sikap menolak dan protes keras terhadap aktivitas tambang ilegal yang ada di wilayah desa. Warga desa kemudian berunjuk rasa di lokasi tersebut, sembari menancapkan spanduk-spanduk aspirasi mereka. Warga mengeluhkan pencemaran lingkungan telah kian nyata merampas ekosistem kehidupan mereka. Kepala Desa Sumber Sari, Sutarno, melaporkan bahwa aktivitas tambang telah mencemari air Sungai Pelay. Ironisnya, sungai tersebut merupakan sumber utama untuk mengairi pertanian dan budidaya perikanan. Bahkan Desa Ponoragan yang juga mengandalkan pembibitan ikan dari air Sungai pelay juga terdampak akibat aktivitas pertambangan tersebut. Padahal Desa Ponoragan merupakan basis utama pembibitan ikan di Kalimantan Timur. Sehingga secara

4 <https://kaltimkece.id/data/infografik/infografik-warga-desa-melawan-tambang-ilegal>

Perlawanan Warga Pesisir

ekonomi, warga desa juga merasakan langsung dampak negatif dari penambangan batubara di wilayahnya. Padahal berdasarkan SK Bupati Kutai Kartanegara Nomor 1.1/590/PL/DPPD/11/2022, Desa Sumber Sari sudah ditetapkan sebagai kawasan pertanian komoditas padi di Kabupaten Kutai Kartanegara. Belum lagi Sumber Sari juga diproyeksikan sebagai lokasi lumbung pangan di Kutai Kartanegara, yang berkontribusi untuk menyuplai kebutuhan Ibu Kota Nusantara (IKN).

BAB II

GERAKAN SOSIAL SEBAGAI MANIFESTASI PERLAWANAN

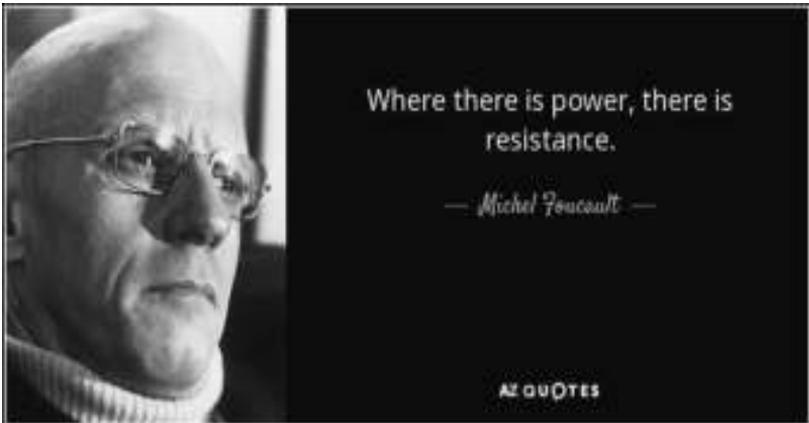
*“Merasakan ketidak-adilan adalah akar sesungguhnya dari tindakan protes dalam bentuk apapun”
(Bert Klandermans)*

Dari sekian banyak wujud kekuasaan, terdapat satu bentuk kekuasaan yang bersemayam di dalam masyarakat sipil, yakni *social movement* (gerakan sosial). Kekuasaan dalam bentuk gerakan sosial ini memiliki kekuatan potensial untuk melakukan aksi-aksi anti-kekuasaan terhadap beroperasinya praktik dominasi kekuasaan yang menciptakan ketimpangan dan ketidak-adilan sosial yang dilakukan oleh pihak-pihak lawan, elit, maupun para pemegang otoritas. Bilamana kondisi-kondisi dominasi kekuasaan, ketimpangan serta ketidak-adilan terus dijalankan oleh lembaga-lembaga/institusi-institusi sosial, maka akan sampai pada titik balik yang memunculkan penolakan, perlawanan maupun pemberontakan untuk menentang sistem-sistem dominasi tersebut (Singh, 2001).

Bahkan jika ditarik sedikit ke belakang, Foucault (1982) telah menegaskan bahwa *“where there is power, there is resistance* (dimana ada kekuasaan, disitu ada perlawanan). Sehingga dalam konteks

Perlawanan Warga Pesisir

ini perlawanan akan selalu eksis sepanjang kekuasaan itu terus berlangsung. Dari pemikiran Foucault tersebut dapat kita refleksikan bahwa perlawanan tidak dapat dihilangkan, karena sudah menjadi sifatnya dasarnya untuk melekat pada praktik kekuasaan. Perlawanan tidak bisa dilumpuhkan seluruhnya, melainkan hanya dapat dikendalikan. Untuk sampai kepada tujuan dalam melakukan penantangan terhadap pihak-pihak yang didefinisikan sebagai lawan, maka salah satu langkah yang paling rasional adalah dengan melakukan tindakan perlawanan. Oleh karenanya, suatu tindakan perlawanan memang dilakukan secara sadar, dengan membangun kolektifitas untuk melakukan penantangan kepada struktur kekuasaan (Rubin, 1996). Sehingga cara yang paling lazim dilakukan diantara berbagai pilihan alternatif seperti yang telah dikemukakan di bagian sebelumnya untuk melakukan penantangan secara efektif terhadap kekuasaan dominan, yakni dengan cara membangun gerakan sosial.



Gambar: Kutipan Pemikiran Foucault tentang Perlawanan
Sumber: www.azquotes.com

Tarrow (1998), menegaskan bahwa gerakan sosial merupakan aksi perlawanan/penentangan kolektif dari individu-individu yang mempunyai solidaritas serta kesamaan tujuan dalam proses interaksi yang berkesinambungan terhadap pihak lawan, elit, maupun para pemegang otoritas. Dari penjelasan Tarrow, kita dapat menyimpulkan bahwa barangsiapa yang berbicara tentang gerakan sosial, maka sebenarnya telah berbicara tentang aksi perlawanan. Sudah menjadi hukumnya, sebagaimana yang dikatakan Foucault (1982), dimana ada kekuasaan, maka akan selalu ada anti-kekuasaan. Maka bukan sesuatu yang mengejutkan lagi ketika sebuah perlawanan justru akan muncul saat dominasi kekuasaan sudah beroperasi. Dalam konteks ini, perlawanan hadir sebagai reaksi atas kekuasaan yang dimiliki pihak lain. Sebagaimana yang diungkapkan (Maring, 2010), bahwa aksi perlawanan merupakan entitas kuasa yang dapat dilalukan oleh suatu pihak guna mempertahankan diri dan eksistensi. Perlawanan tidak harus selalu dalam bentuk terbuka, frontal, masif, kolektif dan terkoordinir. Bentuk perlawanan juga dapat dilakukan secara pasif, sembunyi-sembunyi dan perseorangan. Telah banyak studi-studi yang menjelaskan bagaimana para petani miskin melakukan aksi perlawanan terhadap pemilik alat produksi, walaupun terlihat kecil-kecilan namun berkesinambungan. Mulai dari tindakan-tindakan pembangkangan seperti mencuri hasil panen, terlambat datang, bermalas-malasan saat bekerja, tidak mentaati instruksi kerja, hingga berpura-pura bodoh ataupun sakit (Scott, 2000).

Terminologi perlawanan (*resistance*), digunakan oleh para sarjana dalam menjelaskan beragam varian tingkah laku maupun tindakan yang terdapat pada seluruh lapisan kehidupan sosial, mulai dari individu, kelompok/kolektifitas dan institusi, serta pada berbagai seting yang berbeda, seperti sistem politik, sistem ekonomi, sistem budaya, dan lain-lain (Hollander & Einwohner, 2004). Artinya perlawanan (*resistensi*) memiliki beragam bentuk tergantung dari

tingkah laku dan seting yang berlangsung. Perlawanan juga terbagi dalam dua modus kategori, yakni bentuk perlawanan fisik maupun materi, serta bentuk perlawanan non-fisik atau simbolik (Sukmana, 2016). Para ahli juga menelisik terkait skala aksi perlawanan yang dibedakan menjadi perlawanan individual, perlawanan kolektif, perlawanan berskala makro (global), serta perlawanan berskala mikro (lokal) (Sukmana, 2016). Tidak cukup sampai di situ, perlawanan dapat pula dilihat dari level koordinasi antar aktor-aktor yang melakukan perlawanan (*resisters*), seperti perlawan kolektif/perlawanan massal hingga perlawanan individual/personal. Bahkan, variasi target dari aksi perlawan juga dapat dibedakan ke dalam bentuk lawan personal, lawan berbasis kelompok, lawan organisasi/institusi hingga struktur sosial (Sukmana, 2016).

Dari sekian banyak variasi dari bentuk-bentuk perlawanan tersebut, dapat ditarik esensi dari apa yang disebut sebagai perlawanan (Holander dan Einwohner, 2004), yakni adanya tindakan (*action*) dan adanya oposisi (*opposition*). Lebih lanjut, tindakan (*action*) dapat dipahami sebagai tingkah laku aktif yang dapat bersifat fisik, kognitif, maupun verbal. Sementara itu, oposisi (*opposition*) dapat merujuk pada istilah-istilah lain, misalnya melakukan pembalasan (*counter*), bertentangan (*contradict*), perubahan sosial (*social change*), melakukan penolakan (*reject*), melakukan penantangan (*challenge*), melakukan subversif (*subversive*), hingga melakukan gangguan dan pengrusakan (*disrupt and damage*).

Merujuk pada Holander & Einwohner (2004), perlawanan dapat dibedakan ke dalam beberapa tipe, yakni:

- a. *Covert Resistance* (Perlawanan Tertutup), merupakan tindakan yang secara sadar dilakukan/disengaja namun memiliki tujuan agar tidak diketahui oleh target, dengan melakukan perlawanan secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Bentuk konkrit dari

perlawanan tertutup ini misalnya seperti gossip (*gossip*), bitching (*omelan*) dan tindakan-tindakan subversi secara halus di tempat kerja dan lain sebagainya.

- b. *Overt Resistance* (Perlawanan Terbuka), yakni segala perbuatan untuk melawan target yang dapat terlihat serta mudah dikenali oleh pengamat ataupun target itu sendiri. Salah satu contoh perlawanan terbuka yakni tindakan individual secara fisik untuk melakukan mogok kerja misalnya, ataupun tindakan-tindakan kolektif yang bisa berbentuk gerakan sosial maupun revolusi.
- c. *Unwitting Resistance* (Perlawanan tidak disadari), ialah sebuah tindakan perlawanan yang tidak disengaja serta tidak mempunyai target khusus/tertentu. Jenis perlawanan ini memang tidak dimaksudkan sebagai aksi perlawanan oleh aktor serta tidak dirasakan sebagai sebuah ancaman bagi target.
- d. *Target-defined Resistance* (Perlawanan Target Tetap), tipe ini merupakan perlawanan yang hanya dianggap oleh satu orang sebagai aksi perlawanan.
- e. *External-defined Resistance* (Perlawanan Eksternal), adalah perbuatan-perbuatan perlawanan yang sebenarnya tidak ingin disebut sebagai aksi perlawanan oleh target ataupun oleh pelaku, tetapi justru dipandang oleh orang/pihak ketiga maupun pengamat (observer) sebagai perlawanan.
- f. *Missed Resistance* (Perlawanan Terjawab), adalah tindakan-tindakan perlawanan yang disadari dan diakui oleh target sebagai perlawanan, walaupun oleh pihak/orang ketiga maupun pengamatan (observer) tidak dikategorikan sebagai aksi perlawanan.
- g. *Attempted Resistance* (Perlawanan), merupakan perbuatan-perbuatan aktor yang bertujuan untuk melawan target, namun tidak dianggap sebagai perlawanan oleh orang/pihak ketiga maupun pengamat (observer), bahkan juga oleh target itu sendiri.

Dari pemaparan di atas, dapat kita cermati bahwa perlawanan nelayan Tabanio dikategorikan sebagai bentuk perlawanan perlawanan terbuka, dengan menunjukkan kepada target ataupun pihak *observer* bahwa mereka melakukan aksi-aksi kolektif secara fisik yang terkoordinir yang mudah terlihat sebagai bentuk penantangan terhadap dominasi kekuasaan distribusi BBM Solar bersubsidi kepada nelayan di Tabanio. Gerakan perlawanan ini mereka lakukan secara sadar sebagai respon dari ketidakpuasan yang selama ini dirasakan khususnya oleh para pemilik kapal nelayan di Tabanio yang merasa dirugikan dan diperlakukan tidak adil dan sewenang-wenang oleh pengelola Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Khusus Nelayan (SPBN) Tabanio. Tercabiknya rasa keadilan yang seharusnya mereka dapatkan dari pengelola SPBN Tabanio inilah yang menjadi sumbu utama dalam membentuk gerakan perlawanan nelayan Tabanio. Hal ini seperti menegaskan kembali apa yang disampaikan oleh Klandermans (1997), yakni walaupun keluhan sosial, deprivasi relative, maupun ketidakpuasan masyarakat (misalnya terhadap norma-norma yang berlaku, sistem politik yang menindas, struktur sosial yang tidak adil, sistem ekonomi yang eksploitatif & diskriminasi kelompok/identitas tertentu) merupakan bahan bakar yang memungkinkan individu-individu dapat dimobilisasi, namun merasakan ketidak-adilan adalah akar sesungguhnya dari tindakan protes dalam bentuk apapun.

Embrio Gerakan Perlawanan Nelayan Tabanio

“Walaupun kami merasa berpendidikan rendah dan mungkin juga bodoh, tapi tidak boleh juga dia (pengelola SPBN) semaunya membodohi kami”, (Fulan, nama disamarkan)

Alur cerita gerakan perlawanan nelayan Tabanio dapat ditelusuri dari diadakannya kegiatan Reses oleh Khairil Anwar, anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut yang berasal dari Partai Gerindra. Desa

Tabanio, Kecamatan Takisung merupakan salah satu dari daerah pemilihan tempat Khairil Anwar maju sebagai calon anggota legislatif pada 2019 yang lalu. Tepatnya pada tanggal 4 November 2021, bertempat di rumah salah satu warga Desa Tabanio yang bernama Haji Ahmad Hormansyah, para nelayan dan pemilik kapal mengeluhkan persoalan distribusi solar bersubsidi. Para nelayan selama ini begitu resah karena merasa telah banyak dirugikan oleh Hajjah Nurul Tasiah, selaku pihak pengelola Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Nelayan (SPBN) di Desa Tabanio. Masyarakat nelayan menganggap pangkalan SPBN Tabanio dioperasikan secara manipulatif, karena dinilai sarat akan ketidak-jujuran dan ketidak-profesionalan. Dalam kegiatan reses tersebut, masyarakat nelayan menyampaikan aspirasi mereka terkait beberapa hal:

1. Penyaluran solar bersubsidi di desa Tabanio belum diawasi dengan baik
2. Harga jual solar bersubsidi yang dipatok oleh SPBN Tabanio di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang sudah ditetapkan Pertamina, yakni Rp 5.150,- per liter nya.
3. Masyarakat nelayan menginginkan agar kuota pembelian solar bersubsidi tidak dibatasi secara sepihak oleh pihak pengelola. Selama ini mereka merasa kebutuhan bahan bakar untuk kapal-kapal nelayan di Tabanio terkadang tidak mencukupi, dan terpaksa sebagian para pemilik kapal harus membeli solar kepada para pengecer di luar Desa Tabanio, walaupun dengan harga mahal, di atas Rp 8.000,- per liter nya. Hal ini terpaksa dilakukan untuk memastikan setiap kapal yang melaut mampu beroperasi hingga 2 minggu di laut.
4. Beberapa pemilik kapal juga mengeluhkan kuota distribusi solar bersubsidi yang tidak merata kepada sesama para pemilik kapal, sehingga berpotensi menimbulkan kecemburuan diantara

Perlawanan Warga Pesisir

mereka. Beberapa orang pemilik kapal justru diberikan suplai solar bersubsidi yang relatif melebihi keperluan mereka, hanya karena dianggap memiliki kedekatan secara personal dan mendukung secara penuh apapun yang menjadi kebijakan pengelola SPBN Tabanio.

5. Para pemilik kapal menyayangkan ketika pembelian solar bersubsidi di SPBN Tabanio, mereka harus menyerahkan uang terlebih dahulu kepada pihak pengelola, baru kemudian beberapa hari kemudian kouta solar tersebut didistribusikan oleh pengelola.

Setelah menyimak dengan seksama, Khairil Anwar kemudian memberikan masukan kepada Pemerintah Desa Tabanio untuk segera menindaklanjuti keluhan masyarakat tersebut. Sebagai warga Tabanio, Khairil Anwar juga menyarankan kepada pemerintah desa untuk secepatnya mengadakan rapat dengan seluruh pemilik kapal untuk mencari solusi bersama terhadap permasalahan tersebut. Menindaklanjuti masukan dan saran dari Anggota DPRD (Khairil Anwar) tersebut, kemudian pihak Pemerintah Desa Tabanio menggelar rapat dengan dihadiri oleh:

1. Kepala Desa dan Aparatur Perangkat Desa Tabanio
2. Ketua & Anggota BPD Tabanio
3. Pemilik kapal & nelayan Desa Tabanio
4. Pengelola SPBN Tabanio (Hajjah Nurul Tasiah)
5. BABINKAMTIBMAS Desa Tabanio
6. TNI Angkatan Laut

Rapat tersebut dilaksanakan pada hari Kamis, 23 Desember 2021, bertempat di Balai Desa Tabanio. Dalam rapat tersebut Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tabanio, Muhammad Ikbal mengajukan beberapa pertanyaan kepada pengelola SPBN, antara lain:

1. Berapa jumlah kuota BBM solar bersubsidi yang didistribusikan pihak Pertamina untuk para nelayan Desa Tabanio?
2. Berapa jumlah kapal penangkap ikan yang telah terdata oleh pihak SPBN?
3. Mengapa penjualan solar bersubsidi di Tabanio hanya menggunakan alat ukur berupa drum berkapasitas 220 liter, tanpa memakai alat ukur berupa *nozzle gun* dan dispenser agar jumlah solar yang dikeluarkan oleh pengelola lebih akurat?
4. Bagaimana mekanisme proses penetapan harga solar bersubsidi yang dikelola oleh SPBN Tabanio?

Cecaran pertanyaan yang dilemparkan Ikkal kepada pihak pengelola SPBN sangat beralasan, sebab masyarakat nelayan dan pemerintah desa perlu mendengar penjelasan langsung dari yang bersangkutan, termasuk memberikan kesempatan untuk memberikan klarifikasi jika terdapat ketidaksesuaian data antara apa yang dituturkan oleh pihak pengelola dengan apa yang dirasakan dan dicurigai oleh masyarakat nelayan. Terkait pertanyaan pertama, pengelola SPBN menjelaskan bahwa kuota solar bersubsidi yang didistribusikan oleh pihak Pertamina di Desa Tabanio berjumlah 110.00 liter, namun yang disalurkan kepada para pemilik kapal hanya berkisar 68.000 liter. Sementara sisanya sekitar 42.000 liter disalurkan ke desa-desa di sekitar Tabanio. Menanggapi pertanyaan kedua, pengelola SPBN menyebut dari data yang dimiliki oleh pihaknya, terdapat sebanyak 169 kapal nelayan Tabanio yang selama ini telah tercatat. Menjawab pertanyaan ketiga, pengelola SPBN menerangkan bahwa pihaknya tidak bisa memperbaharui/memodernisasi alat ukur yang diinginkan masyarakat agar jumlah solar yang dikeluarkan dapat lebih akurat, karena sudah terikat kontrak dengan Pertamina sejak tahun 2021-2027. Selanjutnya, pihak pengelola SPBN juga melanjutkan penjelasannya guna menjawab pertanyaan keempat,

Perlawanan Warga Pesisir

dimana Pertamina sebenarnya menjual solar bersubsidi Rp 5.150,- per liter. Namun karena terdapat kesepakatan pada tahun 2018 dengan pihak-pihak terkait, maka harga jual solar tersebut di SPBN Tabanio naik menjadi Rp 5.681,- per liter. Margin antara harga standar Pertamina dan pihak SPBN tersebut kemudian dikelola oleh untuk dibagi-bagikan kepada pengurus Masjid Tabanio, tokoh masyarakat Tabanio, oknum aparat TNI-AL dan kas desa. Sayangnya ketika di desak oleh para hadirin dalam rapat tersebut, pihak pengelola tidak bisa menunjukkan dokumen perjanjian bagi hasil atas keuntungan dari margin harga solar bersubsidi tersebut. Pihak pengelola beralih bahwa pembagian keuntungan tersebut didasarkan atas kebijakannya Hajjah Nurul Tasiah sendiri selaku pemilik SPBN Tabanio.

Penjelasan-penjelasan yang telah diuraikan pengelola SPBN tadi rupanya tidak membuat para pemilik kapal dan anak buah kapal merasa puas. Masyarakat nelayan pada dasarnya merasa kecewa dan memilih untuk bersikap resisten dengan penjelasan Hajjah Nurul, sehingga dialog yang berlangsung selama lebih kurang 2 jam di balai desa Tabanio berjalan dengan penuh ketegangan. Masyarakat nelayan dan Anggota BPD Tabanio meminta normalisasi harga dan standarisasi pengelolaan SPBN Tabanio segera diimplementasikan oleh Hajjah Nurul. Namun saat itu dialog mengalami *dead-lock* (kebuntuan), karena pihak pengelola SPBN tetap bergeming dan bersikukuh mempertahankan kebijakan yang telah dijalkannya selama ini. Para pemilik kapal yang merasa muak dan kecewa terhadap kebijakan pengelola berangsur-angsur meninggalkan balai desa, meskipun rapat belum usai. Ini merupakan salah satu ekspresi perlawanan yang telah mereka kibarkan kepada pengelola SPBN.

Beruntungnya masih ada beberapa orang pemilik kapal yang masih bersedia bertahan untuk membujuk pengelola agar mencari jalan tengah atas persoalan ini. Beberapa orang pemilik kapal yang masih tersisa di ruangan tersebut menyadari bahwa walaupun mereka

kecewa, namun sikap emosional yang ditunjukkan oleh rekan-rekannya jelas tidak akan menghasilkan solusi apapun. Mereka berusaha untuk melakukan negosiasi kepada Hajjah Nurul dengan opsi yang sedikit melunak guna mendapatkan *win-win solution*. Para pemilik kapal nelayan menawarkan bagaimana jika harga solar bersubsidi diturunkan hanya sebesar Rp 40.000,- saja per drumnya (satu drum memiliki kapasitas 220 liter). Selama ini harga solar per drumnya dipatok oleh Hajjah Nurul sebesar Rp 1.250.000,-. Berdasarkan aspirasi beberapa pemilik kapal tadi maka harga per drumnya menjadi Rp 1.210.000,-, walaupun harga tersebut masih di atas standar harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan Pertamina. Kemudian mereka juga membujuk Hajjah Nurul agar memberikan kuota solar bersubsidi yang sedikit lebih banyak bagi kapal-kapal yang menggunakan mesin berkapasitas 6 silinder mendapatkan solar 3 drum, karena selama ini baik kapal-kapal yang menggunakan mesin diesel 4 silinder maupun 6 silinder mendapatkan pembagian jatah pembelian solar merata sebanyak 2 drum. Menurut para pemilik kapal yang memiliki kapasitas mesin diesel 6 silinder, kuota 2 drum itu mereka rasakan sangat kurang untuk operasional kapal selama 2 minggu melaut.

Setelah mendengarkan poin-poin negosiasi dari beberapa pemilik kapal tadi, maka sikap pengelola mulai melunak dan bersedia mengakomodir sebagian aspirasi pemilik kapal. Titik kesepakatan antara pemilik kapal dan pengelola SPBN mulai terbentuk, dimana harga solar bersubsidi yang dijual oleh pengelola SPBN masih berada di angka Rp 5.350 per liter, namun para pemilik kapal yang memiliki mesin diesel berkapasitas 6 silinder boleh mendapatkan tambahan kuota pembelian solar bersubsidi menjadi 3 drum, dengan syarat menyerahkan foto lengkap kapal dan mesin yang digunakan serta fotokopi KTP pemilik kapal. berdasarkan kesepakatan tersebut, maka ditandatangani berita acara yang berisi poin kesepakatan sebagai berikut:

Perlawanan Warga Pesisir

1. Harga solar bersubsidi untuk kapal nelayan Desa Tabanio Rp 1.210.000,- per drum.
2. Alokasi kuota solar bersubsidi untuk kapal nelayan Tabanio yang memiliki kapasitas mesin 6 silinder berhak mendapatkan jatah 6 drum (660 liter) solar, sementara untuk kapal nelayan yang berkapasitas mesin 4 silinder mendapatkan jatah solar sebanyak 2 drum (440 liter).
3. Apabila kebutuhan solar bersubsidi untuk kapal nelayan Desa Tabanio telah terpenuhi, maka sisa lebih solar yang masih tersedia dapat dilimpahkan untuk kebutuhan kapal nelayan desa lain.
4. Pengiriman solar bersubsidi dari depo Pertamina menuju SPBN Tabanio, diupayakan mengikuti regulasi dan kebijakan dari Pertamina serta menyesuaikan dengan waktu keberangkatan kapal-kapal nelayan Desa Tabanio.

Dalam dokumen berita acara tersebut terdapat beberapa orang yang membubuhkan tanda tangan, diantaranya yakni Haji Mahruni, atas nama perwakilan pemilik kapal nelayan Desa Tabanio, kemudian Hajjah Nurul, selaku pengelola SPBN Desa Tabanio, diikuti Madiansyah sebagai Kepala Desa Tabanio, Muhammad Iqbal selaku Ketua BPD Tabanio, dan yang terakhir yakni Nazarudin sebagai BABINKAMTIBMAS POLRI. Walaupun berita acara terkait beberapa kesepakatan yang dibuat oleh pemerintah Desa Tabanio telah ditandatangani oleh berbagai pihak yang terkait di dalamnya, namun tampaknya hal tersebut dirasa masih belum memuaskan bagi masyarakat nelayan Tabanio lainnya. Pada hari Senin, tanggal 03 Januari 2022, beberapa orang perwakilan masyarakat nelayan desa Tabanio mencoba mendatangi kantor cabang PT. Pertamina di Kota Banjarmasin, untuk mempertanyakan mekanisme kebijakan Pertamina dalam penyaluran solar bersubsidi khusus nelayan sekaligus melaporkan keluhan yang mereka alami. Berdasarkan keterangan

salah satu informan (berinisial H) dari pihak Pertamina, diketahui bahwa tidak benar jika pihak PT. Pertamina menjalin kontrak kerjasama dengan pihak SPBN Tabanio dari tahun 2021-2027. Selain itu informan tersebut juga menyangkal jika pihak PT. Pertamina tidak memberikan izin bagi pengelola SPBN Tabanio menggunakan *nozzle gun* dan dispenser untuk melakukan pengisian solar bersubsidi kepada drum-drum maupun jerigen milik para pemilik kapal. PT. Pertamina justru menyayangkan bahwa pendistribusian solar bersubsidi yang dilakukan SPBN Tabanio justru tidak mengikuti standar operasional prosedur yang telah ditetapkan. Satu hal yang paling disesalkan informan tersebut yakni penjualan solar bersubsidi oleh SPBN tidak dibenarkan dengan alasan apapun di atas standar harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah yakni sebesar Rp 5.150,- per liternya.

Mendengar keterangan informan dari pihak PT. Pertamina yang bertolak belakang dari penjelasan yang disampaikan oleh Hajjah Nurul Tasiah pada saat rapat di balai desa pada tanggal 23 Desember 2021 yang lalu, membuat warga desa yang mayoritasnya merupakan keluarga nelayan mulai meradang. Warga nelayan mulai bereaksi. Sebagian dari mereka berpendapat untuk mempersoalkan dan membawa kasus ini kepada pemerintah daerah dan pihak Pertamina. Mereka tidak mau tunduk terhadap dominasi permainan Hajjah Nurul dalam mengelola SPBN di Desa Tabanio. Dalih apapun yang coba dijelaskan oleh pengelola SPBN sebagai justifikasi mekanisme pendistribusian solar bersubsidi, yang telah berlangsung selama ini, ternyata tidak bisa meredam kekesalan dan kekecewaan masyarakat Desa Tabanio. Mereka tidak saja menjadi muak, tetapi juga memendam amarah terhadap pengelola SPBN Tabanio, karena selama ini merasa dipermainkan dan diperlakukan tidak adil.

Sebagai aksi kongkritnya, masyarakat nelayan mendesak kepala desa Tabanio, Madiansyah untuk melayangkan surat protes terkait pengelolaan SPBN Tabanio yang dinilai merugikan masyarakat

Perlawanan Warga Pesisir

nelayan kepada PT. Pertamina, pada hari rabu, tanggal 17 Januari 2022. Adapun yang menjadi poin-poin permintaan masyarakat nelayan yakni sebagai berikut:

1. Harga penjualan solar bersubsidi di SPBN Tabanio harus disesuaikan dengan harga yang telah ditetapkan oleh pihak PT. Pertamina.
2. Masyarakat nelayan Tabanio meminta agar metode pengisian solar bersubsidi kepada nelayan yang hanya menggunakan drum diganti dengan pengisian menggunakan alat dispenser dan *nozzle gun*, agar jumlah yang dikeluarkan lebih akurat, sehingga tidak merugikan nelayan.
3. Masyarakat nelayan Tabanio meminta agar metode pembelian solar bersubsidi yang selama ini harus melalui *indent* pelunasan di depan, dapat ditinjau-ulang kembali. Sehingga proses pembeliannya dapat mengikuti ketentuan yang berlaku, sesuai dengan standar operasional prosedur PT. Pertamina.
4. Pendistribusian solar bersubsidi kepada nelayan Tabanio dapat menyesuaikan kebutuhan dari kapasitas mesin diesel yang ada pada masing-masing kapal nelayan.
5. Pihak PT. Pertamina hendaknya menanggapi dengan secepat mungkin akan hal tersebut.

Surat tersebut ditandatangani oleh Ketua BPD Tabanio (M. Ikkal), Kepala Desa Tabanio (Madiansyah) dan Perwakilan Masyarakat Nelayan Tabanio (Haji Yusdiansyah), dengan ditembuskan kepada Bupati Kabupaten Tanah Laut, Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tanah Laut, DPRD Kabupaten Tanah laut, Camat Takisung, serta pengelola SPBN. Sontak, setelah surat tersebut dikirimkan, bak disengat lebah, pengelola SPBN Tabanio langsung meradang. Hajjah Nurul Tasiah merasa tidak bisa menerima atas perlakuan masyarakat nelayan yang telah melayangkan surat protes kepada PT.

Pertamina dan mengirimkan tembusannya kepada *stake-holder* terkait. Pihak SPBN Tabanio lalu menuduh bahwa masyarakat nelayan telah disusupi provokator, sembari menuding bahwa Madiansyah (Kepala Desa Tabanio) telah dipaksa untuk menandatangani surat tersebut. Walaupun menurut informan penelitian yang namanya disamarkan (A1), kepala desa sama sekali tidak dipaksa dan malah ikut terlibat dalam merevisi redaksi kalimat dalam surat tersebut. Pengelola SPBN selanjutnya mengambil langkah cepat dengan mengajak tokoh masyarakat Desa Tabanio (yang dianggap berpihak terhadap Hajjah Nurul, yakni Haji Dandrawi dan Haji Sarwani) untuk mendatangi kantor PT. Pertamina di Banjarmasin guna memberikan klarifikasi dan penjelasan dari sudut pandang pengelola SPBN Tabanio, terkait surat masyarakat nelayan Tabanio yang diterima PT. Pertamina pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2022 yang lalu. Tidak hanya berhenti sampai di situ saja, pengelola SPBN ternyata juga berupaya menggalang dukungan dari sebagian masyarakat nelayan agar berpihak kepadanya, dengan mengumpulkan beberapa orang masyarakat nelayan (pemilik kapal dan anak buah kapal) yang apatis, kurang tertarik serta tidak mengikuti perkembangan persoalan tersebut.

Pada sore itu, Jum'at, tanggal 11 Februari 2022, beberapa anggota Polres Tanah Laut datang langsung menuju pangkalan SPBN Tabanio guna mencari informasi terkait persoalan masyarakat nelayan dengan pihak SPBN Tabanio. Dua hari berselang, pada hari Minggu, 13 Februari 2022, pukul 13.30 WITA bertempat di pangkalan SPBN Tabanio, Hajjah Nurul kemudian mengundang masyarakat nelayan untuk menghadiri kegiatan silaturahmi dengan pihak pengelola. Sebanyak 69 orang pemilik kapal yang tercatat hadir. Dalam acara tersebut, juga dihadiri oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut (Ir. Rizayadi), Kasi Perikanan DKPP Kabupaten Tanah Laut (Edi Santoso, S.Pt), Danramil Takisung (Kapten Inf. Muhammad Zaed), Kanit Reskrim Polsek Takisung

Perlawanan Warga Pesisir

(Aiptu N. Aini), Kepala Desa Tabanio (Madiansyah) dan tokoh agama Desa Tabanio (Haji Danderawi).

1. Pihak SPBN Tabanio telah mengusulkan alat ukur (penakar) dispenser ke Pertamina Cabang Banjarmasin, sesuai dengan keinginan para pemilik kapal, namun demikian pihak SPBN Tabanio memohon waktu untuk merealisasikannya.
2. Bahwa pihak SPBN Tabanio akan menerapkan harga eceran tertinggi (HET) BBM jenis solar bersubsidi sesuai ketentuan yang berlaku, yakni sebesar Rp 5.150,- per liter.
3. Bahwa para pemilik kapal (nelayan) akan bersedia mengikuti prosedur yang berlaku, sehubungan dengan prosedur untuk mendapatkan BBM jenis solar bersubsidi bagi nelayan di SPBN Tabanio.
4. Para nelayan serta para pemilik kapal se-Desa Tabanio akan melakukan komunikasi terlebih dahulu dengan pihak SPBN Tabanio bila dikemudian hari ada permasalahan terkait BBM jenis solar bersubsidi.
5. Bahwa para nelayan dan para pemilik kapal Desa Tabanio dan pihak SPBN Tabanio menyatakan tidak akan mempermasalahkan lagi kesepakatan yang dibuat sebelumnya dengan kata lain bahwa kesepakatan sebelumnya telah gugur/tidak berlaku dengan terbitnya surat kesepakatan ini.

Dalam acara tersebut, pengeloa SPBN langsung menyampaikan perihal utama bahwa harga solar bersubsidi akan diturunkan sebagaimana harga yang telah ditetapkan PT. Pertamina, yakni Rp 5.150,- per liter. Kebijakan baru dari pengelola SPBN ini langsung disambut hangat oleh para nelayan dan pemilik kapal. Berita acara hasil pertemuan antara pengeloa SPBN dan masyarakat nelayan terkait pemberlakuan harga solar bersubsidi yang menyesuaikan standar PT. Pertamina inipun dibuat. Ironisnya, setelah pertemuan itu selesai

ternyata pengelola SPBN tidak bersungguh-sungguh berkomitmen mentaati konsensus yang baru saja dibuat. Buktinya selang beberapa jam usai acara tersebut, para pemilik kapal tetap diminta untuk menyetorkan uang terlebih dahulu kepada pengelola SPBN walaupun solar bersubsidi belum tersedia di SPBN. Ironisnya, harga solar bersubsidi tiba-tiba kembali dinaikkan di atas HET yang ditetapkan PT. Pertamina oleh pengelola SPBN secara sepihak, dimana harga perdrum (220 liter) yang seharusnya Rp 1.133.000,- berubah menjadi Rp 1.150.000,- per drum. Kondisi ini membuat para pemilik kapal membunah. Kenapa tiba-tiba kesepatan bersama yang telah dicapai justru dikangkangi oleh pengelola SPBN sendiri. Masyarakat nelayan pada awalnya telah mencoba memberikan toleransi kepada pengelola SPBN untuk tidak mendesak sesegeranya menggunakan alat ukur dan dispenser yang telah menjadi standarisasi PT. Pertamina dalam proses pendistribusian bahan bakar minyak. Walaupun pihak pengelola SPBN berkomitmen akan segera menggunakan piranti tersebut, namun tidak disebutkan secara jelas kapan tenggat-waktu yang dapat dijanjikan, hingga bagaimana kompensasi yang diterima maupun sanksi yang harus ditanggung pihak pengelola.

Eskalasi kekecewaan masyarakat nelayan Tabanio semakin memuncak manakala menyadari bahwa dalam berita acara perjanjian tersebut, ternyata pengelola SPBN tidak turut bertanda-tangan seperti sebagaimana seharusnya yang tertuang dalam berita acara pertemuan. Hal ini mengakibatkan kecurigaan masyarakat nelayan kian menyeruak, bahwa pengelola SPBN masih ingin bermain “*kucing-kucingan*” terhadap mekanisme distribusi solar bersubsidi yang telah diatur oleh pihak PT. Pertamina. Masyarakat nelayan Tabanio kemudian menduga, pengelola SPBN tidak bersungguh-sungguh dan amanah untuk mengimplementasikan hasil kesepakatan bersama. Ditambah lagi, salinan dokumen sebagai arsip berita acara hasil perjanjian dalam pertemuan tersebut sempat tidak diserahkan oleh pengelola SPBN

Perlawanan Warga Pesisir

Tabanio kepada pemerintah Desa Tabanio hingga dua minggu lamanya. Kegusaran warga nelayan semakin mengkrystal manakala pada kesepakatan sebelumnya kapal nelayan yang memiliki mesin berkapasitas 6 silinder berhak mendapatkan solar bersubsidi sebanyak 3 drum (660 liter) dari pengelola, namun dalam implementasinya justru dilanggar oleh pengelola SPBN. Semua kapal mendapatkan alokasi bahan bakar yang sama rata jumlahnya, baik kapal yang bermesin 4 silinder atau 6 silinder, yakni sebanyak 2 drum (440 liter). Sementara jumlah kapal nelayan yang ada di Desa Tabanio hanya berjumlah 161 buah kapal, sehingga jumlah solar bersubsidi yang disalurkan pengelola SPBN Tabanio kepada para pemilik kapal nelayan di Tabanio hanya 70.840 liter saja, sedangkan pihak SPBN Tabanio sendiri menerima kuota solar bersubsidi dari PT. Pertamina mencapai 110.000 liter. Berikut diungkapkan beberapa pernyataan dari para pemilik kapal nelayan Tabanio terkait persoalan BBM Solar bersubsidi bagi nelayan:

1. Pernyataan Haji Pulah (Bulan Februari-Mei)

Mengenai pembayaran harga BBM solar, waktu itu saya membeli minyak karena ada penurunan harga yang sudah disampaikan pengelola pada tanggal 13 Februari 2022 baru saja Rp 5.150,- kemudian saya membeli sebanyak 18 drum (3.960 liter) dan saya diminta bayar Rp 20.698.920,- tapi setelah dihitung ulang saya bayar Rp 5.225,- per liternya. Saya terkejut uang saya kelebihan sebanyak Rp 304.920,-. Pengelola ngotot tetap menaikkan harga atau tidak mengembalikan kelebihan tersebut. Seharusnya saya bayar cuma Rp 20.394.000,-.

2. Haji Runi (Bulan Februari-Mei)

Mengenai pembayaran harga BBM solar, waktu itu saya membeli minyak karena ada penurunan harga yang sudah di sampaikan pengelola pada tanggal 13 Februari 2022 Rp 5.150,- per liter. Kemudian saya membeli sebanyak 10 drum (2.200 liter) dan saya bayar Rp 11.449.400,-, tapi setelah dihitung ulang saya bayar Rp

5.227,- per literanya. Saya terkejut uang saya kelebihan sebanyak Rp 169.400,-. Pengelola ngotot tetap menaikkan harga atau tidak mengembalikan kelebihan tersebut.

3. Haji Ikin (Bulan April)

Bahwa saya membeli BBM solar subsidi ke pengelola 2 drum dengan harga Rp 2.300.000,-. Harga per liter Rp 5.227,-, sedangkan saya perlu minyak 3 drum, yang satu drumnya saya beli lagi sama pengelola tapi pihak pengelola menjual dengan harga Rp 1.900.000,-, dimana 1 drum (220 liter) harga perliter mencapai Rp 8.636,-, dengan uangnya disetorkan kepada Hajjah I/EM (nama disamarkan).

4. Penyataan Haji Jumari (bulan April)

Bahwa saya tidak mendapatkan BBM solar subsidi sehingga tidak bisa pergi ke laut karena kata pengelola SPBUN BBM solar habis karena adanya pengurangan kuota minyak dari Pertamina, sedangkan yang saya ketahui kuota minyak di Tabanio 110.000 liter perbulannya.

5. Penyataan Anang Kuni (bulan April)

Bahwa saya mendapatkan BBM solar bersubsidi hanya 1,5 drum (330 liter), sehingga tidak bisa pergi ke laut karena kata pengelola SPBUN BBM solar adanya pengurangan kuota minyak dari Pertamina, sedangkan yang saya ketahui kuota minyak di Tabanio masih 110.000 liter perbulannya.

6. Pernyataan Harpuli (bulan April)

Bahwa saya mendapatkan BBM solar subsidi setiap bulannya 440 liter (2 drum) namun pada bulan April 2022 saya diberikan hanya 1,5 drum (330 liter) sehingga tidak bisa pergi ke laut karena kata pengelola SPBUN BBM solar adanya pengurangan kuota minyak dari Pertamina, sedangkan yang saya ketahui kuota minyak di Tabanio 110.000 liter perbulannya.

Perlawanan Warga Pesisir


PT ASFIN PENGINDIAN BAHAN BAKAR UMUM UNTUK KELAYAN
 SPBU-N No. 48.708.002 A/N PUSAT KOPERASI UNIT DESA
 KALIMANTAN SELATAN
 Jl. Kayan Desa Tabanio RT. 12 AN 7 Km. Tabanio Kab. Tanah Laut

Taliemo, 01 Februari 2022

Nomor : 1/SPBU-N.05/1/2022
 Perihal : Laporan Bulanan Periode Januari 2022

SURAT PENGANTAR

Dengan Hormat,
 Bersama ini kami sampaikan Laporan Bulanan sebagai berikut.

No. SPBU-N : 48.708.002
 Pemilik : HI. NURUL TASIAH
 Alamat : DESA. TABANIO KEL. TABANIO
 Kecamatan :
 Kabupaten :
 - Minyak Solar :
 - Minyak Bio : Januari 2022

Dimana dalam laporan ini kami sampaikan hasil kegiatan operasional sebagai berikut,
 Periode : Bulan Januari 2022

Produk	Stok Awal (Ltr)	Penyerahan (Ltr)	Penjualan (Ltr)	Stok Akhir Teori (Ltr)	Stok Akhir Aktual (Ltr)	Losses (Ltr)
Minyak Solar	-	-	-	-	-	-
Minyak Bio	520	110.000	110.000	520	520	-

Demikian Surat Pengantar ini kami sampaikan dan terima kasih

Mengetahui & Menyetujui,


HI. NURUL TASIAH


DESA TABANIO


**KOPERASI UNIT DESA
TABANIO**

Gambar: Laporan Bulanan SPBN Tabanio, periode Januari 2022
 Sumber: Arsip BPD Tabanio


STAHUN PENGHIAN BAHAN BAKAR UMUM ENYUR SELAYAN
 SPBU-N No. 08.706.002 A/N PUSAT KOOPERASI UNIT DESA
 KALIMANTAN SELAYAN
 Jl. Erawan Jene Tabanio RT. 27 RW. 2 Km. Tahung Kab. Tanah Laut

REKAPITULASI
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENJUALAN BBM

No. SPBU-N : 08.706.002
 Pemilik : HI NURUL TASAM
 Alamat : DESA TABANIO KEC. TAHUNG
 Alokasi per Bulan :
 Periode : Januari 2022
 Produk : MINYAK B10

Tgl	1	2	3	4 = 2-3	5	6 = 5-4
	Stok Awal (Ltr)	Penerimaan (Ltr)	Penjualan (Ltr)	Stok Akhir Teori (Ltr)	Stok Akhir Aktual (Ltr)	Losses (Ltr)
1	520	10,000	10,100	420	420	-
2						
3						
4	420	10,000	10,200	320	320	-
5	320	10,000	10,300	20	20	-
6						
7						
8						
9						
10						
11	20	10,000	9,800	220	220	-
12	220	10,000	9,920	100	100	-
13	100	10,000	9,920	80	80	-
14	180	10,000	10,040	80	80	-
15	140	10,000	9,980	80	80	-
16	160	10,000	10,060	80	80	-
17						
18						
19						
20						
21	100	10,000	9,720	180	180	-
22	180	5,000	5,000	180	180	-
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29	180	5,000	5,000	180	180	-
30						
31						
TOTAL		100,000	110,000	120		

Gambar: Rekapitulasi Laporan SPBN Tabanio tentang Penerimaan dan Penjualan BBM Solar Bersubsidi.

Sumber: Arsip BPD Tabanio.

Perlawanan Warga Pesisir

Pada bulan berikutnya, masyarakat nelayan yang ingin membeli solar berbsubsidi kembali diperlakukan semena-mena oleh pengelola SPBN Tabanio. Masyarakat nelayan yang ingin membeli solar bersubsidi di bulan April selain disyaratkan untuk menyerahkan uang pembelian terlebih dahulu sebelum solar bersubsidi dikirimkan, mereka juga diharuskan untuk mendandatangani surat pernyataan yang telah disiapkan oleh pengelola SPBN. Walaupun sempat merasa keberatan akan hal ini, para pemilik kapal tidak bisa menghindarinya lagi karena mereka tidak ada pilihan lain agar bisa segera mendapatkan solar bersubsidi. Tanpa adanya pendantanganan surat pernyataan tersebut, para pemilik kapal tidak bisa membeli solar bersubsidi di SPBN Tabanio. Berikut poin-poin yang tercantum dalam surat pernyataan tersebut:

1. Bahwa saya memohon kepada SPBN Desa Tabanio untuk dapat menyerahkan/menitipkan uang terlebih dahulu dalam hal pembelian BBM jenis solar di SPBN Desa Tabanio.
2. Bahwa penyerahan uang atau penitipan uang terlebih dahulu ke SPBN Desa Tabanio dalam hal pembelian BBM jenis solar adalah murni keinginan saya dan bukan ketetapan yang diatur oleh SPBN Desa Tabanio, sehingga hal-hal yang ditimbulkan oleh perbuatan saya tersebut adalah menjadi tanggung-jawab saya dan bukan tanggung-jawab SPBN Desa Tabanio.
3. Bila kemudian hari perbuatan saya yang telah menyerahkan/ menitipkan uang terlebih dahulu ke SPBN Desa Tabanio tersebut mendapatkan teguran dari PT. Pertamina maupun instansi terkait, maka saya siap menyelesaikan masalah tersebut tanpa keterlibatan SPBN Tabanio sebagai bentuk tanggung jawab saya.
4. Bahwa saya mendukung SPBN Desa Tabanio dalam hal penyaluran atau distribusi BBM jenis solar kepada nelayan secara

profesional dan prosedural berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Bilamana dikemudian hari saya mengingkari atau tidak menepati pernyataan saya ini, maka saya siap dan sanggup untuk diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Walaupun telah menandatangani surat tersebut, persoalan solar bersubsidi yang dialami oleh masyarakat nelayan Tabanio tidak serta-merta berhenti sampai di sini. Dari pengakuan beberapa pemilik kapal yang membeli solar bersubsidi di SPBN Tabanio di bulan April 2022, diketahui bahwa sebagian dari mereka yang hanya mendapatkan jatah Cuma 330 liter (1,5 drum), bahkan ada juga yang mengaku mereka justru tidak mendapatkan kuota pembelian solar bersubsidi sama sekali. Pihak SPBN Tabanio beralih bahwa pihaknya mendapatkan pengurangan alokasi solar bersubsidi dari PT. Pertamina, padahal setelah dilakukan *cross-check* kepada pihak PT. Pertamina Cabang Banjarmasin, dikonfirmasi bahwa pihaknya tidak melakukan pengurangan distribusi solar bersubsidi kepada SPBN Tabanio pada bulan April 2022. Sehingga secara jelas, pernyataan dari pihak SPBN Tabanio telah dibantah sendiri oleh pihak PT. Pertamina Cabang Banjarmasin. Persoalan ini menimbulkan dugaan kuat bahwa telah terjadi penyalahgunaan distribusi BBM Solar bersubsidi oleh pengelola SPBN Tabanio bagi nelayan di wilayah Tabanio. Jika hal ini terbukti, maka dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Berdasarkan Pasal 53-58 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, menegaskan bahwa penyalahgunaan BBM bersubsidi merupakan tindak pidana, dengan ancaman kurungan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp 60.000.000.000,- (enam puluh miliar rupiah).

Perlawanan Warga Pesisir

**LAPORAN MANIPULASI DATA BBM SOLAR BERSUBSIDI NELAYAN
DESA TABANIO TAHUN 2022**

Nama-nama yang terdapat di Data ini adalah data nya pemilik Kapal namun sekarang, Kapal – Kapal nya ada yang terbagas di jual. Namun nama-nama ini lah yang dipaparkan pengelola SPBN supaya seolah-olah Kalau BBM Solar Bersubsidi yang ada di Tabanio 110.000 Lit. Per Bulan terjual habis, tapi kenyataan nya di lapangan Data yang Pengelola buat untuk laporan ke PT. Pertamina banyak yang di palsukan (Fiktif). Inilah nama-nama yang di manipulasi Pengelola SPBN Tabanio (HL NURUL Y) :

No	NAMA PENERIMA	KAPAL	LITAR	RETERANGAN
1.	M.FUSIP	3	1.100	> Kapal nya Tidak Ada (sudah dijual) tapi sebagai tetap Bulan laporan solar diberikan kepada nama yang bersangkutan, apakah ini Peripuan.
2.	H. UMAR	1	440	> Modul sama / Fiktif
3.	MARDAN	1	440	> Modul sama / Fiktif
4.	M. NASRI / NASIR	1	440	> Modul nya Sama
5.	PAGANTEN	1	880	> Modul yang Sama
6.	BANDI	1	440	> Modul nya sama
7.	HL. BUSTANI	1	440	> Modul nya Sama
8.	ABD	2	880	> Modul nya Sama
9.	AWAT IGAR	1	440	> Modulnya Sama
10.	HAJRABAD	1	440	> Modul sama / Fiktif
11.	SAMDIM	1	440	> Modul nya Sama
12.	MIS	2	880	> Modul nya sama
13.	HANWAR	1	440	> Modul nya Sama
14.	ABP	1	440	> Modul nya Sama
15.	KPLAN	1	440	> Modul nya Sama
16.	H. SAPWANI	2	880	> Modul nya Sama
17.	IBAH	2	880	> Modul nya Sama
18.	H. WIMKAC	1	1.320	> Modul nya Sama
19.	ISAI	1	440	> Modul sama / Fiktif
20.	IBAR	1	440	> Modul nya sama
21.	HL. JANA	1	440	> Modul nya Sama
22.	H. JUBBI	1	440	> Modul nya Sama
23.	P. A. SURBAN	1	440	> Modul nya sama
24.	MASJAN	1	440	> Modul sama / Fiktif

Gambar: Dokumen BPD Tabanio terkait Laporan Dugaan Manipulasi Data Distribusi BBM Solar Bersubsidi oleh SPBN Tabanio.

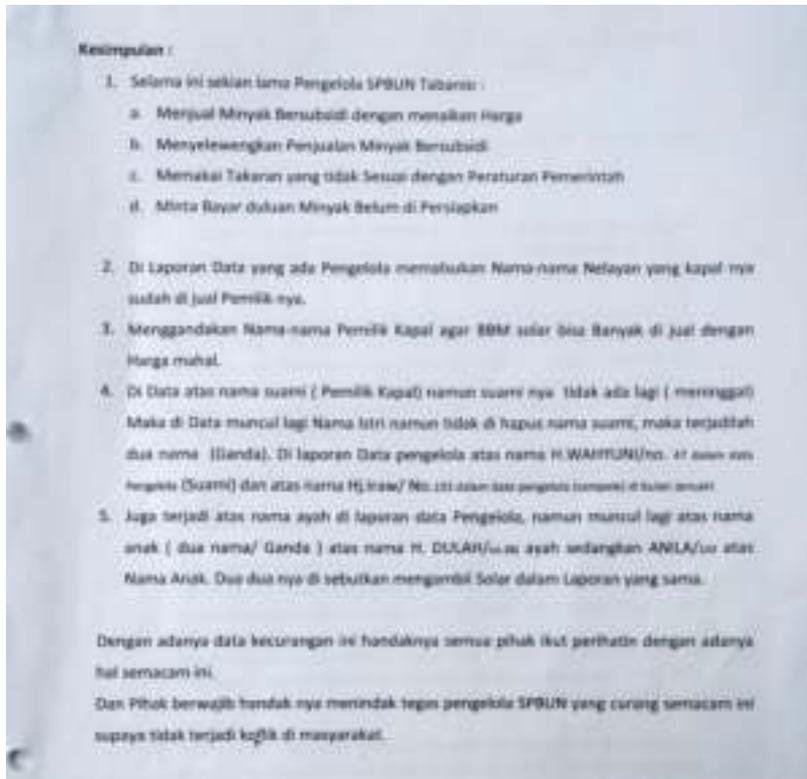
Sumber: Arsip BPD Tabanio.

26.	AMANG NORSAN	1	400	> Mobil nya rusak
27.	AMANG SAMBANG	1	400	> Mobil nya rusak
28.	H. GUSMAN No 25	1/1	800/400	> Mobil ada dua nama punya 1 kapal
29.	H. GUSMAN No 26	✓	✓	> Mobil ada dua nama (No 25/110 dalam data)
30.	SAMBAH	1	400	> Mobil / Kapal
31.	H. KAI	1/1	800/400	> Peralat Cuma satu kapal (FIKAF 1 Kapal)
32.	H. KEMBAR	1/1	800/400	> Peralat Cuma satu kapal (FIKAF 1 Kapal)
33.	H. LAMAR	4/2	1.700/800	> Peralat Cuma 2 kapal (FIKAF 2 Kapal)
34.	H. SAMBANG	4/2	1.700/800	> Peralat Cuma 2 kapal (FIKAF 2 Kapal)
35.	H. SENI HPS	4/2	1.700/800	> Cuma 2 kapal yang ngambil (BAWA No 110)
36.	AWAN No 101	✓	✓	> Anak Mawani dari H 1000 HP
37.	PAWA No 54	1	400	> FIKAF (sudah termasuk H 1000/ Awia/10/111)
38.	H. LAMAR	1/1	1.100/400	> FIKAF 1 Kapal
39.	H. AWP	1/1	800/400	> FIKAF 1 Kapal
40.	H. SAMBAH/1000	1/1	1.100/400	> FIKAF 1 Kapal
41.	OSNE	1/1	800/400	> FIKAF 1 Kapal
42.	H. HASMAY No. 98	1	1.100	> H. HASMAY nama nya memang kapal pemilik kapal tapi nama anaknya juga di cantumkan di dalam data pengembilan solar yaitu nama MURJANI, jadi dua nama dalam data, SELISIH 1.320 Lt. (H. Hasim No. 98 Murjani No. 98)
43.	MURJANI/98	✓	✓	
44.	H. WAHYUNI / A7	1	1.100	> H. WAHYUNI (biri) nama pemilik kapal, karena orang nya meninggal digantikan sama istrinya, sama nama istri nya dimasukkan juga dalam pengembilan solar atas nama H. WAH jadi dua nama dalam data, SELISIH - 2.200 Lt.
	H. WAH / 101	✓	✓	
45.	H. DILLAH / 10	4	1.700	> H. DILLAH nama nya memang kapal pemilik kapal tapi nama anak nya juga di cantumkan di dalam data pengembilan solar yaitu nama ANYA, jadi ada dua nama dalam data, SELISIH : 1.700 (H. Dillah No. 10 Anya No. 111)
	ANYA / 111	✓	✓	
	JUMILAH	60 Kap	20.000 Lt.	* Kecurangan Manipulasi Data (FIKAF) sample di ambil pada bulan Januari 2022 kemungkinan besar data bulap berikutnya nama dan kuantitasnya pada BBM Solar Bersubsidi untuk nelayan Desa Tabanio ada yang tidak dimasukkan ke data.

Gambar: Dokumen BPD Tabanio terkait Laporan Dugaan Manipulasi Data Distribusi BBM Solar Bersubsidi oleh SPBN Tabanio.

Sumber: Arsip BPD Tabanio.

Perlawanan Warga Pesisir



Gambar: Dokumen BPD Tabanio terkait Laporan Dugaan Manipulasi Data Distribusi BBM Solar Bersubsidi oleh SPBN Tabanio.

Sumber: Arsip BPD Tabanio.



Gambar: Dokumen BPD Tabanio terkait Permasalahan BBM Solar Bersubsidi untuk Nelayan Tabanio.

Sumber: Arsip BPD Tabanio.

DATA PENYALURAN BBM SOLAR BERSUBSIDI
BULA JANUARI TAHUN 2022

Total tangki yang datang sebanyak 15 tangki X 5000 L	=	75.000L.
Rekomendasi Kouta Minyak Yang ditandatangani kades setiap bulanya	=	110.000 L
Dugaan ada penyelewengan sebanyak	=	35.000L.

Gambar: Dokumen BPD Tabanio terkait Permasalahan BBM Solar Bersubsidi untuk Nelayan Tabanio.

Sumber: Arsip BPD Tabanio.

DATA PENYALURAN BBM SOLAR BERSUBSIDI
BULA FEBRUARI TAHUN 2022

Total tangki yang datang sebanyak 16 tangki X 5000 L	=	80.000L
Rekomendasi Kouta Minyak Yang ditandatangani kades setiap bulanya	=	110.000 L
Dugaan ada penyelewengan sebanyak	=	30.000L

Gambar: Dokumen BPD Tabanio terkait Permasalahan BBM Solar Bersubsidi untuk Nelayan Tabanio.

Sumber: Arsip BPD Tabanio.

Perlawanan Warga Pesisir

DATA PENYALURAN BBM SOLAR BERSUBSIDI
BULA MARET TAHUN 2022

Total tangki yang datang sebanyak 14tangki X 5000 L	=	70.000L
Rekomendasi Kouta Minyak Yang ditandatangani kades setiap bulanya	=	110.000 L
Dugaan ada penyelewengan sebanyak	=	40.000L

Gambar: Dokumen BPD Tabanio terkait Permasalahan BBM Solar Bersubsidi untuk Nelayan Tabanio.

Sumber: Arsip BPD Tabanio.

DATA PENYALURAN BBM SOLAR BERSUBSIDI
BULA MARET TAHUN 2022

Total tangki yang datang sebanyak 14tangki X 5000 L	=	70.000L
Rekomendasi Kouta Minyak Yang ditandatangani kades setiap bulanya	=	110.000 L
Dugaan ada penyelewengan sebanyak	=	40.000L

Gambar: Dokumen BPD Tabanio terkait Permasalahan BBM Solar Bersubsidi untuk Nelayan Tabanio.

Sumber: Arsip BPD Tabanio.

Perlawanan Warga Pesisir

DATA PENYALURAN BBM SOLAR BERSUBSIDI
BULA APRIL TAHUN 2022

Total tangki yang datang sebanyak 12tangki X 5000 L	= 60.000L
Rekomendasi Kouta Minyak Yang distandatangan kades setiap bulanya	= 110.000 L
Dugaan ada penyelewengan sebanyak	= 50.000L

Gambar: Dokumen BPD Tabanio terkait Permasalahan BBM Solar Bersubsidi untuk Nelayan Tabanio.

Sumber: Arsip BPD Tabanio.

DATA PENYALURAN BBM SOLAR BERSUBSIDI
BULA MEI TAHUN 2022

Total tangki yang datang sebanyak 15 tangki X 5000 L	= 75.000L
Rekomendasi Kouta Minyak Yang ditandatangani kades setiap bulanya	= 110.000 L
Dugaan ada penyelewengan sebanyak	= 35.000L

Gambar: Dokumen BPD Tabanio terkait Permasalahan BBM Solar Bersubsidi untuk Nelayan Tabanio.

Sumber: Arsip BPD Tabanio.

BAB III

KONSEPTUALISASI GERAKAN SOSIAL

*“Kita telah melawan Nak, Nyo. Sebaik-baiknya, sehorat-hormatnya.
Dengan melawan kita takkan sepenuh kalah”. (*
Pramoedya Ananta Toer, Bumi Manusia)

Mulanya, terminologi gerakan sosial pertama kali diperkenalkan oleh Sosiolog kebangsaan Jerman yang bernama Lorenz Von Stein dalam karyanya yang berjudul *Socialist & Communist Movement since the Third French Revolution* (Sukmana, 2016). Di era awal perhatian para intelektual terhadap gerakan sosial, mereka memosisikannya pada cakupan lingkup yang sangat besar, yang dipandang memiliki tujuan untuk melakukan penolakan terhadap kebijakan pemerintah yang tidak memihak pada kepentingan publik. Namun di era kontemporer seperti sekarang ini, perkembangan studi gerakan sosial semakin mencair pada perhatian terhadap suatu kelompok maupun organisasi yang secara sukarela terorganisir dan berada di luar sistem pemerintahan.

Secara konseptual, para teoritis yang melakukan studi tentang Gerakan Sosial (*Social Movement*) terbagi menjadi beberapa kelompok besar. Kelompok pertama, menempatkan gerakan sosial sebagai

dimensi utama dari perilaku kolektif (*collective behavior*) (Macionis, 1999). Sementara itu, kelompok yang lain memandang gerakan sosial lebih cenderung sebagai suatu bentuk tindakan kolektif (*collective action*), daripada sebagai bentuk perilaku kolektif, karena menurut mereka gerakan sosial memiliki perbedaan dengan bentuk-bentuk perilaku kolektif yang ada selama ini, oleh sebab itu gerakan sosial menjadi salah satu sub-varian dari kajian perilaku kolektif yang berkembang di Eropa (Locher, 2002; Crossley, 2002).

Menurut Locher (2002), terdapat tiga aspek yang menjadi pondasi perbedaan antara gerakan sosial dengan bentuk-bentuk perilaku kolektif lainnya seperti penolakan/pembangkangan (*rebel*), kerusuhan (riot) maupun kerumunan (crowd), yaitu:

- a. Adanya pengorganisasian (*organized*), dimana gerakan sosial memiliki kejelasan para pemimpin (*leaders*), kemudian menetapkan pembagian tugas tertentu kepada partisipan gerakan, serta merancang strategi-strategi yang akan diambil oleh gerakan. Contoh Kasus Tabanio.
- b. Adanya pertimbangan (*deliberate*), dalam setiap aksi-aksi yang dilakukan oleh gerakan, tidak terjadi secara spontanitas melainkan melalui penyusunan rencana-rencana aksi sebelumnya. Para aktor gerakan akan mempertimbangkan secara seksama kapan mereka akan bergerak, siapa saja yang dilibatkan, seberapa besar partisipan yang akan diikutsertakan, strategi apa yang akan digunakan untuk menarik perhatian publik, siapa target yang disasar, dan lain sebagainya. Setiap gerakan selalu memiliki berbagai macam pilihan rencana dalam menjalankan aksinya. Disinilah peran pemimpin gerakan menjadi penting untuk mempertimbangkan dan menentukan aksi seperti apa yang akan dipilih, termasuk resiko maupun konsekuensi yang menyertainya.

- c. Adanya daya tahan (*enduring*), salah satu ciri khas gerakan sosial dibandingkan dengan bentuk perilaku kolektif lainnya seperti *crowd*, *riot*, *rebel* & *fads* yakni dari segi kemampuan dari gerakan sosial yang mampu bertahan relatif lebih lama, dari beberapa tahun hingga mencapai beberapa dekade. Sebagai contoh misalnya terjadinya sebuah kerusuhan (*riots*), biasanya hanya berlangsung dalam hitungan jam ataupun beberapa hari saja. Sebut saja aksi kerusuhan Jumat Kelabu di Banjarmasin.....

Tabel

Diferensiasi bentuk gerakan sosial dan bentuk perilaku kolektif lainnya

Varian Bentuk Perilaku Kolektif	Indikator		
	Pengorganisasian	Pertimbangan	Daya Tahan
Gerakan Sosial	Terdapat organisasi gerakan yang berfungsi dengan baik, adanya pemimpin gerakan, adanya pembagian masing-masing tugas diantara para partisipan gerakan, mampu merancang strategi dan rencana aksi dengan baik.	Dibentuk dan digerakkan berdasarkan kalkulasi dan rencana matang, partisipan/ keanggotaan gerakan juga berdasarkan atas kesadaran dan pertimbangan tanpa adanya tekanan serta paksaan dari kelompok manapun;	Waktu berlangsungnya sebuah gerakan relatif lama hingga mencapai beberapa dekade

Perlawanan Warga Pesisir

Bentuk-bentuk lainnya (Crowd, Riot, Rebel & Fads)	Mayoritas tidak terorganisir karena terbentuk secara spontanitas dan emosional, ikatan antara partisipan bersifat tentatif & berlangsung singkat, tidak ada kejelasan siapa yang menjadi pemimpin & terkadang tidak ada pembagian peran dan tugas diantara partisipan	Terbentuk dan berjalannya aksi secara spontanitas & emosional, tanpa adanya kalkulasi dan perencanaan sebelumnya; bergabungnya para partisipan dalam aksi juga tanpa dilandasi pertimbangan dan kesadaran penuh.	Waktu berlangsungnya relatif singkat, misalnya hanya beberapa menit atau jam saja, atau paling lama beberapa hari.
--	---	--	--

Sumber: Locher (2002: 233-234), dengan beberapa penyesuaian.

Secara sederhana, beberapa teoritis sepakat bahwa gerakan sosial dapat dipahami sebagai aktivitas kolektif dan terorganisir yang bertujuan untuk mendorong atau menolak perubahan sosial (Macionis, 1999; Spencer, 1982; Locher, 2002). Namun, sedikit berbeda dengan apa yang dikemukakan Sydney Tarrow (1998), seorang pakar ilmu politik yang memandang gerakan sosial memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Gerakan sosial merupakan aksi perlawanan kepada elit, penguasa, otoritas, maupun penentangan terhadap aturan kelompok ataupun budaya mapan lainnya;
- b. Aksi gerakan tersebut dilandasi oleh adanya solidaritas pembentukan identitas kolektif para individu-individu;

- c. Gerakan yang muncul akan melakukan klaim dan menentukan target yang sama terhadap pihak lawan, otoritas maupun kelompok elit yang menjadi sasaran;
- d. Sebagai upaya untuk meneruskan arah tujuan dari tindakan kolektifnya, kemudian para aktor-aktor yang terlibat melakukan transformasi bentuk persetujuan ke dalam bentuk gerakan sosial.

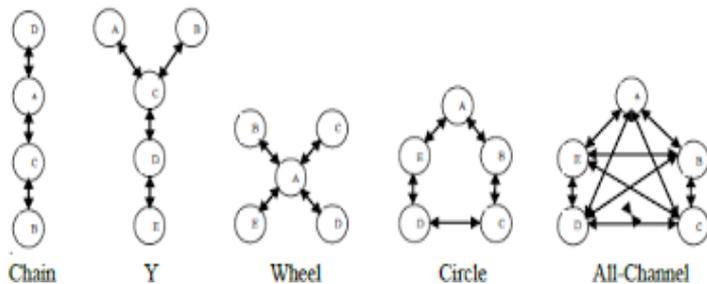
Dalam riset yang dilakukannya untuk menganalisis berbagai gerakan sosial yang terjadi pada dekade 1960-1970, Freeman (dalam Stolley, 2005) menemukan empat model gerakan sosial berbeda, yakni:

- a. The civil rights movements;
- b. Student protests movements;
- c. Welfare rights movements; dan
- d. Women's liberation movements.

Walaupun Freeman (dalam Stolley, 2005) menemukan variasi dari keempat model tersebut, namun menurutnya kesemuanya memiliki kesamaan akan prasyarat terbentuknya suatu gerakan sosial, yaitu:

1. Munculnya krisis yang memicu individu-individu untuk tertarik & terlibat melakukan tindakan;
2. Ketika para individu sudah mulai tertarik untuk bergabung ke dalam kelompok, maka dilakukan upaya untuk mengorganisasikan kelompok tersebut ke dalam suatu gerakan;
3. Dibangunnya jaringan komunikasi antar individu-individu yang tergabung dalam gerakan untuk memudahkan proses mobilisasi dan mendorong proses dinamika relasi antar-individu;

Perlawanan Warga Pesisir

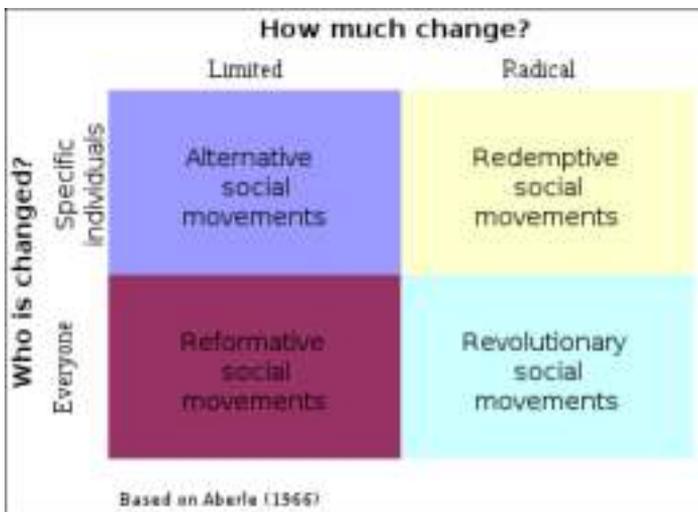


Gambar: Model Jaringan komunikasi

Sumber: Lunenberg, F. C. (2011).

4. Tersedianya ide-ide/wacana yang akan menjadi tulang-punggung dari aksi-aksi yang dilakukan yang sesuai dengan karakter, tujuan, visi dan misi dari gerakan tersebut.

Berbeda dengan apa yang ditawarkan oleh Freeman di atas, Aberle (1966) mengkategorikan bentuk-bentuk gerakan sosial dalam suatu kuadran, yakni:



Gambar: Kuadran Bentuk-Bentuk Gerakan Sosial

Sumber: Aberle (1966)

1. *Alternative Movement*, adalah gerakan sosial yang memiliki tujuan guna mengubah tindakan-tindakan tertentu dari individu dalam suatu masyarakat. Pada prinsipnya, aksi-aksi dalam gerakan ini dilakukan sebagai upaya untuk memberikan pemahaman kepada kelompok individu tertentu melalui aktivitas sosialisasi dan kampanye yang menyasar kelompok target secara langsung. Salah satu contoh dari bentuk gerakan sosial ini adalah sosialisasi bahaya membuang sampah di sungai bagi warga Kota Banjarmasin, dengan tujuan untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan yang diakibatkan tercemarnya sungai-sungai yang mengalir di wilayah kota Banjarmasin.
2. *Redemptive Movement*, merupakan gerakan sosial yang bertujuan melakukan perubahan yang tidak terbatas pada satu bidang tertentu, akan tetapi gerakan yang menginginkan perubahan secara holistik (menyeluruh) bagi individu-individu yang menjadi sasaran dari gerakan.
3. *Reformative Movement*, yakni bentuk dari gerakan sosial yang menginginkan perubahan pandangan masyarakat terhadap isu-isu tertentu. Gerakan ini memiliki tujuan yang relatif terbatas. Misalnya gerakan feminisme-radikal yang menginginkan kesadaran masyarakat bahwa perempuan harus diperlakukan sama dengan laki-laki dalam bentuk apapun dan tanpa ada pengecualian.
4. *Transformative Movement*, adalah gerakan sosial yang mempunyai target untuk mengubah tatanan masyarakat secara komprehensif. Gerakan ini bersifat kolektif dengan melibatkan banyak pihak dan elemen masyarakat, namun dalam nejalankan aksinya gerakan ini relatif ekstrim dan berupaya menggunakan metode pemaksaan maupun kekerasan demi tercapainya tujuan dari gereakan. Kita ambil contoh misalnya gerakan yang mengusung ideologi-ideologi tertentu guna mengubah pemahaman, pemikiran dan

Perlawanan Warga Pesisir

sikap masyarakat untuk menerima serta menganut ideologi yang diinginkan oleh pemimpin gerakan. Sebagai contoh dari bentuk gerakan ini yakni Gerakan Politik Darul Islam-Tentara Islam Indonesia (DI-TII) pimpinan Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo yang terjadi pada awal tahun 1948, dimana gerakan ini bertujuan untuk mendirikan Negara Islam Indonesia (NII).



Gambar: Kartosoewirjo.
Sumber: Kempalan.com

Melalui gerakan ini, Kartosoewirjo pada tanggal 7 Agustus 1949 memproklamkan berdirinya Negara Islam Indonesia. Gerakan ini bertahan cukup lama, yakni 13 tahun sebelum akhirnya Kartosoewirjo berhasil ditangkap Pasukan Divisi Banteng Raiders, Angkatan Darat Indonesia pada tahun 1962, untuk selanjutnya dieksekusi mati oleh pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1965. Gerakan ini menyebar tidak hanya di Pulau Jawa saja, akan tetapi merambah hingga ke Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi.



Gambar: Bendera Negara Islam Indonesia.

Sumber: <https://p2k.utn.ac.id/>

Di Kalimantan Selatan sendiri, pada tahun 1950 gerakan DII-TII dipimpin oleh Ibnu Hajar atau nama aslinya adalah Haderi, seorang Letnan Dua Tentara Nasional Indonesia (TNI). Ibnu Hajar atau Haderi alias Angli, adalah putra dari seorang asli Ambutun dan ibunya, Siti Hadijah, seorang putri kepala suku Dayak di Tamiang Layang, Kalimantan Tengah (Sudharmono, 1977).



Gambar: Ibnu Hajar (Haderi), Pemimpin DI-TII Di Kalimantan Selatan

Sumber: Sudharmono (1977)

Perlawanan Warga Pesisir

Selanjutnya, Zanden (1988: 575) membagi bentuk-bentuk gerakan sosial ke dalam empat varian yang dibedakan berdasarkan basis tujuan ideologinya, yakni:

1. Gerakan Ekspresif (*Expressive Movements*), merupakan gerakan yang ditujukan untuk mendorong perubahan internal kelembagaan melalui pembaharuan maupun renovasi nilai-nilai yang dianggap kurang relevan untuk dipertahankan.
2. Gerakan Perlawanan (*Resistance Movements*), adalah suatu gerakan yang bertujuan melakukan penolakan, pencegahan ataupun pengeliminasian terhadap perubahan sebelum dilembagakan.
3. Gerakan Reformasi (*Reform Movements*), bentuk gerakan ini memiliki tujuan untuk menciptakan perubahan maupun pembaharuan terhadap nilai-nilai yang sudah dianggap usang agar dapat diimplementasikan secara lebih baik dan memberikan hasil yang lebih maksimal.
4. Gerakan Revolusi (*Revolutionary Movements*), yaitu gerakan yang bertujuan untuk menggantikan nilai-nilai yang sudah ada dengan nilai-nilai baru yang memiliki perbedaan dengan sebelumnya.

Sedikit lebih spesifik dari pembagian tipe-tipe gerakan sosial yang telah dipaparkan beberapa teoritis sebelumnya, Spencer (1982) memiliki tujuh kategori yang dapat menggambarkan varian dari gerakan sosial, yaitu:

1. Gerakan Revolusi (*Revolutionary Movement*), yaitu gerakan yang berupaya menggantikan suatu kekuasaan, rezim ataupun otoritas yang mapan, melalui cara-cara persuasif ataupun dengan cara koersif.
2. Gerakan Reformasi (*Reform Movement*), yakni tipe gerakan yang bertujuan untuk memperbaiki sistem yang sudah ada, karena dianggap banyak mengandung permasalahan.

3. Gerakan Reaksioner (*Reactionary Movement*), terjadi karena sekelompok individu membentuk gerakan yang menghendaki dikembalikannya tatanan dan situasi kehidupan masa lalu, karena mereka merasa tidak puas dengan kehidupan saat ini dan menganggap rezim lama lebih baik. Salah satu contoh dari tipe ini yaitu gerakan yang ingin menghidupkan lagi kerinduan terhadap era Orde Baru pimpinan Presiden Soeharto. Di medio tahun 2013, sempat ramai kemunculan poster wajah Pak Harto yang tersenyum simpul sembari slogan yang bertuliskan “*Piye Kabare, Isih Penak Jaman Ku To??*”



Gambar: Poster Meme Soeharto. Sumber: KabarKampus.com

Poster-poster ini tidak hanya dibagikan oleh berbagai akun di media sosial saja, akan tetapi juga telah merambah hingga ke level akar rumput. Ada banyak truk-truk yang beroperasi di wilayah Pantura (Pantai Utara) Jawa yang pintu belakangnya dilukis

Perlawanan Warga Pesisir

poster tersebut. Bahkan slogan ini juga ada yang memasangnya di baliho dan spanduk-spanduk politisi hingga dibuat stiker, grafiti, flyer di internet dan lain sebagainya. Bahkan ada juga buku yang ditulis dengan slogan tersebut dan foto Pak Harto yang tersenyum.

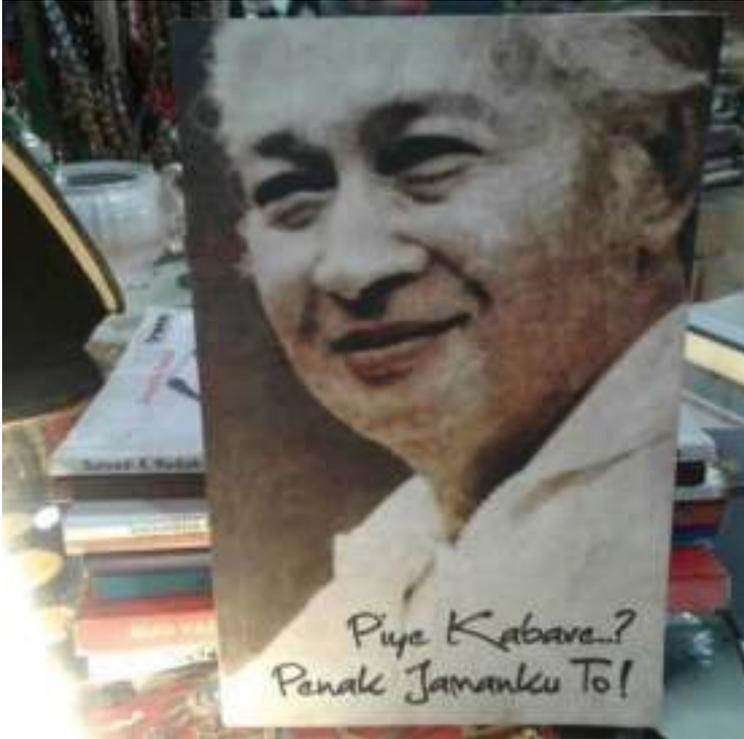


Gambar: Meme Pak Harto yang dicat di Bak Truk.

Sumber: PinterPolitik.com

Tidak bisa dipungkiri, salah satu motif dari kemunculan gerakan ini untuk menunjukkan protes atas ketidakpuasan berbagai pihak terhadap kondisi bangsa dan negara saat ini. Orang-orang lalu membandingkan antara pemerintahan saat ini (era reformasi) dengan pemerintahan sebelumnya (era Orde Baru). Walaupun rezim Soeharto banyak ditentang oleh kelompok pro demokrasi hingga melahirkan gerakan reformasi 1998, namun bagi sebagian masyarakat awam era tersebut setidaknya terdapat

stabilitas serta kepastian ekonomi dan politik di Indonesia. Sehingga gerakan ini tidak hanya didorong oleh para loyalis Orde Baru semata, namun juga menjadi populer karena sebagian rakyat juga mulai kecewa terhadap hasil dari Reformasi.



Gambar: Buku *Piye Kabare..? Penak Jamanku To!*

Sumber: Bukukita.com

Slogan yang menggunakan bahasa Jawa Ngoko Halus dengan makna “*Bagaimana kabarnya nak? Masih penak jamaku kan?*” ini walaupun terlihat cukup sederhana namun membuat orang-orang yang membacanya kembali berpikir, apakah mungkin ada benarnya apa yang tertulis dalam slogan tersebut, dimana Orde

Perlawanan Warga Pesisir

Baru masih tetap lebih baik dari Reformasi? Poster dan slogan tersebut seolah dapat ditafsirkan seperti ini: meskipun dikenal dengan kekuasaan otoriternya, pak Harto lebih memberikan harapan kehidupan yang lebih baik bagi warga kecil. Gerakan ini semakin masif dirasakan ketika pemerintah memangkas alokasi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang mengakibatkan harga BBM Premium melonjak dari Rp 4.500,- , menjadi Rp 6.500,- pada Juni 2013. Kenaikan harga BBM tersebut membawa efek domino yang turut melambungkan harga barang-barang dan kebutuhan pokok rakyat, sehingga turut mengguncang neraca perekonomian negara. Rakyat kecil kembali harus menelan pil pahit, karena mereka merasa harga kebutuhan pokok lebih murah di era Pak Harto dibandingkan dengan Reformasi.



Gambar: Komik Kartun Mice tentang Meme Soeharto di Bak Truk

Sumber: Kompas, Edisi 9 Februari 2014.

4. Gerakan Konservatif (*Conservative Movement*), merupakan gerakan yang bertujuan untuk mempertahankan sistem nilai dan kehidupan mereka saat ini dari berbagai ancaman potensial, seperti perubahan kultur masyarakat, modernisasi, kemajuan teknologi dan lain sebagainya.
5. Gerakan Utopis (*Utopian Movement*), adalah gerakan dengan durasi jangka panjang yang digagas untuk membentuk tatanan situasi dan kondisi masyarakat seperti dalam cita-cita ideal para aktor gerakan.
6. Gerakan Religius (*Religious Movement*), yaitu gerakan yang bertujuan untuk memperjuangkan dan memperkuat internalisasi nilai-nilai religiusitas di dalam masyarakat.
7. Gerakan Etnis/Nasionalis (*Ethnic or Nationalistic Movement*), adalah tipe gerakan yang berbasis pada kelompok etnis ataupun bangsa tertentu yang bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan kelompok etnis/bangsa tersebut.

Pemetaan Teori Gerakan Sosial

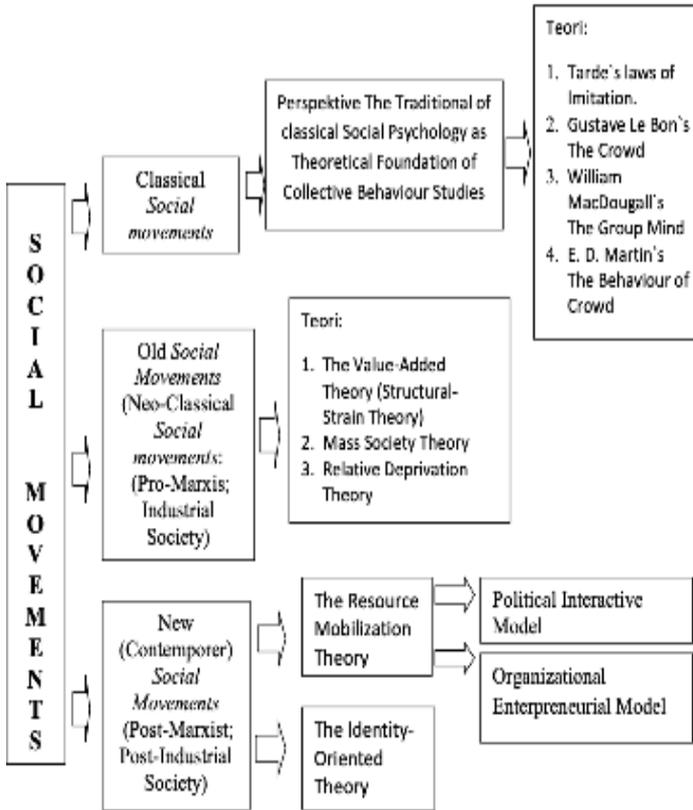
Di Indonesia, studi-studi terkait gerakan sosial menggunakan analisis teoritiknya yang merujuk pada Singh (2001), yang membagi klasifikasi gerakan sosial ke dalam 3 klaster, yakni:

- a. Gerakan Sosial Klasik, dimana tradisi klasik ini tidak hanya memfokuskan pada studi-studi gerakan sosial yang terjadi sebelum tahun 1950-an saja, akan tetapi juga mencakup studi perilaku kolektif lainnya seperti riot (kerusuhan), crowd (kerumunan) dan rebel (pembangkangan). Jika mengacu pada tradisi klasik, studi gerakan sosial dan tindakan kolektif lainnya memiliki fondasi konseptual yang dikembangkan dari perspektif psikologi-sosial klasik.

Perlawanan Warga Pesisir

- b. Gerakan sosial neo-klasik, terlahir dari studi-studi yang menganalisis gerakan sosial pasca dekade 1950-an, yang mayoritasnya dipengaruhi oleh sosiolog barat (Amerika Serikat serta Eropa) dan India. Tradisi neo-klasik ini juga memiliki dua model populer dalam perspektifnya, yakni model fungsional dan dialektika Marxis (bisa juga disebut Hegelian). Khususnya di Eropa, perdebatan para sosiolog dalam melihat kemunculan gerakan sosial masih dipengaruhi perspektif Marxist yang berpandangan bahwa substansi dari suatu masyarakat akan selalu ditandai oleh pertentangan/konflik serta kontradiksi. Dengan adanya konflik dan kontradiksi inilah maka akan menjadi “kayu bakar” dari hadirnya gerakan dalam masyarakat.
- c. Gerakan Sosial Baru (*New Social Movements*; NSMs) atau dalam istilah lainnya juga disebut sebagai Gerakan Sosial Kontemporer. Tradisi studi gerakan sosial baru ini menjadi populer karena para sarjana di Eropa dan Amerika sangat tertarik pada perkembangan isu-isu non-Marxis dalam gerakan sosial dipenghujung dekade 1970-an. Isu-isu lingkungan hidup, humanisme, kultural dan non-materialistik lainnya menjadi populer digunakan dalam gerakan-gerakan berskala besar dalam masyarakat Eropa dan Amerika kala itu. Ide-ide revolusi, anti-kapitalisme, serta perjuangan menjadi kurang diminati dalam pembentukan gerakan sosial, berganti menjadi nilai-nilai esensial yang bersifat universal, seperti persoalan Hak Asasi Manusia (HAM) dan perdamaian. Contohnya seperti anti-rasialisme, persoalan lingkungan hidup, feminsme, paham anti-perang & anti-nukliarisme, kebebasan sipil, dan lain sebagainya. Singkatnya, perkembangan bentuk masyarakat modern menjadi masyarakat pasca-modern mempengaruhi perubahan bentuk gerakan sosial dari tradisi klasik & neo-klasik menuju tradisi gerakan sosial baru (Singh, 2001).

Klasifikasi Teoritis Studi Gerakan Sosial



Gambar: Klasifikasi Studi Gerakan Sosial

Sumber: Sukmana (2016)

Selain tipologi yang dikemukakan Singh di atas, terdapat rujukan populer lainnya yakni Crossley (2001) yang membagi pemetaan gerakan sosial berlandaskan kategorisasi waktu dan setting lokasi. Dalam setting lokasi, Crossley membagi ke dalam dua wilayah besar yakni wilayah Eropa dan Amerika Serikat. Dalam perkembangan studi-

studi gerakan di Amerika Serikat, sebelum dekade 1970-an, pendekatan analisis studi gerakan sosial didominasi oleh pemikiran perspektif perilaku kolektif. Sementara pasca dekade 1970-an, tradisi kajian gerakan sosial lebih banyak menggunakan analisis yang dipengaruhi oleh perspektif mobilisasi sumberdaya (*resource mobilization*) dan proses politik (*political process*), dimana para teoritis yang berpengaruh saat itu misalnya Tilly (1978), McAdam (2004) dan Tarrow (1998). Melalui pendekatan mobilisasi sumberdaya inilah, para teoritis gerakan sosial mulai menguji variabel-variabel determinan seperti biaya (*cost*), insentif (*incentive*) dan hadiah (*rewards*), untuk menjelaskan bagaimana motivasi agen untuk terlibat dalam perjuangan gerakan. Sementara itu, teoritis penganut pendekatan proses politik juga mengembangkan analisis untuk menguji bagaimana terbuka dan tertutupnya peluang politik memberikan kontribusi utama dalam mendorong terjadinya aksi-aksi protes maupun gerakan sosial. Para teoritis proses politik sangat meyakini bahwa para aktor gerakan adalah individu-individu yang rasional dan penuh pertimbangan, sehingga mereka akan cenderung memperhitungkan apakah peluang politik sedang terbuka ataukah tertutup, yang akan mempengaruhi keberhasilan suatu gerakan yang dilakukan.

Berbeda dari tradisi analisis yang berkembang di Amerika Serikat, para sarjana di Eropa sebelum dekade 1970-an sangat dipengaruhi oleh tradisi Marxis, baru setelah dekade 1970-an, tradisi kajian-kajian gerakan sosial lebih didominasi oleh analisis-analisis berbasis perspektif Gerakan Sosial Baru (*New Social Movements*). Tradisi Gerakan Sosial Baru ini juga populer disebut sebagai pandangan pos-Marxis (*post-Marxis notion*) yang mulai meninggalkan perdebatan pemikiran Marx seperti model masyarakat kapitalistik, perjuangan kelas (*class struggle*), konsep kelas sebagai agen dari perubahan sejarah (*historical change*), maupun perdebatan revolusi proletarian (*proletarian revolution*).

Input Tradisi Analisis Gerakan Sosial

	Amerika Serikat	Eropa
Sebelum Era 1970	Perilaku Kolektif (<i>Collective Behaviour</i>)	Marxisme (<i>Marxism</i>)
Setelah Era 1970	Mobilisasi Sumberdaya/ Proses Politik (<i>Resource Mobilization/ Political Process</i>)	Gerakan Sosial Baru (<i>New Social Movements</i>)

Sumber: Crossley, 2003: 10

Resistensi Gerakan Sosial

Sudah menjadi kondisi alamiahnya, setiap munculnya sebuah gerakan sosial maka akan selalu ada pihak-pihak tertentu yang berupaya untuk menentang dan melakukan perlawanan terhadapnya. Dukungan dan penolakan terhadap suatu gerakan akan terus mengalir sepanjang gerakan tersebut masih menunjukkan eksistensinya. Sebagaimana yang diungkapkan Foucault (1990) tentang kekuasaan, dimana ada kekuasaan di situ juga ada anti-kekuasaan (*resistance*).

Locher (2002), mengategorikan empat matra resistensi terhadap sebuah gerakan sosial, yakni:

1. *Ridicule* (Ejekan)

Ejekan yang dilakukan oleh pihak yang tidak menginginkan suatu gerakan sosial berhasil (biasanya orang-orang yang dirugikan jika gerakan tersebut mengalami keberhasilan, misalnya kelompok politisi, pengusaha ataupun pemimpin sosial), yang diyakini sebagai cara yang sangat efektif dalam melemahkan ataupun

melawan suatu gerakan sosial. Para kelompok yang melawan gerakan ini pada umumnya melakukan ejekan dengan melecehkan sebuah gerakan tersebut di agar dipandang aneh dan buruk di bagi masyarakat ataupun komunitas/kelompok tertentu. Ejekan diarahkan kepada pemimpin gerakan, pengikut gerakan hingga tujuan dari sebuah gerakan. Media dalam melontarkan ejekan dapat bermacam-macam, seperti melalui acara *Talk Show*, komedi, kartun politik dan bentuk satire-satire lainnya dalam sebuah pertunjukan. Ejekan ini bertujuan untuk menghilangkan marwah (harga diri) dan kehormatan dari gerakan, termasuk para aktor di dalamnya.

2. *Co-Opting* (Kooptasi), yakni upaya yang dilakukan oleh orang yang melawan suatu gerakan dengan cara membentuk gerakan/ organisasi yang memiliki kesamaan nama dengan gerakan yang ingin dilemahkan. Gerakan palsu (tandingan) yang memiliki kesamaan nama ini juga melakukan hal yang misalnya menulis pernyataan pers, namun berbeda sikap dari gerakan yang asli. Tujuannya untuk mengaburkan aksi perjuangan gerakan yang otentik, termasuk membingungkan opini publik karena gerakan terlihat memiliki dualisme. Respon publik dapat menjadi terbelah dan sulit untuk menentukan gerakan mana yang harus dipercaya. Selain itu, langkah kooptasi terhadap suatu gerakan juga dapat dilakukan melalui upaya menggembosi aktor-aktor gerakan dengan cara menyuap pemimpin gerakan untuk menghentikan gerakan dan berbalik mendukung kelompok yang melawan gerakan tersebut. Iming-iming yang ditawarkan oleh kelompok lawan gerakan tidak harus selalu berupa kekayaan (wealth). Tetapi juga dapat berbentuk ketenaran (fame) dan kejayaan (glory). Misalnya pemimpin gerakan buruh dibujuk untuk menghentikan gerakan atau keluar dari gerakan tersebut dengan iming-iming dijanjikan pekerjaan yang lebih bergengsi, misalnya

sebagai manajer perusahaan maupun jabatan-jabatan strategis dalam struktur birokrasi, dan lain sebagainya.

3. Kontrol Sosial Formal (*Formal Social Control*)

Dalam konteks ini, suatu gerakan akan menghadapi upaya-upaya resistensi dari pihak-pihak yang terganggu jika gerakan ini berhasil, melalui kontrol-kontrol yang terlembaga secara formal baik itu berbentuk fisik maupun non-fisik. Kontrol yang terlembaga secara fisik (*Legitimate Force*) misalnya penguasa politik yang menjadi lawan dari sebuah gerakan berupaya memainkan otoritasnya dengan mengerahkan alat-alat negara seperti kepolisian, birokrasi, intelijen negara ataupun kekuatan militer untuk meredam dan mengambat aksi gerakan, memberikan teror terhadap aktor-aktor gerakan, maupun mengacaukan opini publik terhadap gerakan tersebut.



Gambar: Kartun Parodi perlakuan aparat terhadap aktor gerakan.

Sumber foto: inilah.com

Perlawanan Warga Pesisir

Selain kontrol *Legitimate Force*, terdapat juga upaya resistensi melalui kontrol sosial formal lainnya dalam bentuk hukum dan peraturan (*Laws and Ordinances*). Bentuk kontrol non-fisik ini dilakukan untuk mempersempit ruang-ruang bagi aktor gerakan untuk menjalankan aksi-dan strategi gerakan, sehingga gerakan akan semakin terhambat untuk berkembang dan mencapai tujuannya. Dalam menjalankan aksinya, para penguasa dapat menggunakan salah satu ataupun kombinasi dari bentuk kontrol sosial formal ini, tergantung dari situasi kondisi yang dihadapi. Semakin sebuah gerakan mengancam terhadap kekuasaan pemegang otoritas, maka semakin masif upaya-upaya resistensi dapat dilakukan.



Gambar: Meme UU ITE yang membentengi pemerintah dari kritik netizen di media sosial

Sumber Foto: <https://twitter.com/hiroeshy/status/1359683829007491072?lang=zh-Hant>

4. Kekerasan Fisik (*Physical Violence*)

Merupakan bentuk resistensi yang menggunakan pendekatan kekerasan fisik sebagai tindakan ekstrim yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang menentang adanya sebuah gerakan sosial. Sebagai bentuk resistensi yang paling ekstrim, penggunaan kekerasan fisik dianggap sebagai cara yang sangat efektif dalam mengahalui aktivitas gerakan sosial, sebab kekerasan fisik bisa menyasar siapapun, tidak hanya para pemimpin gerakan, tetapi juga dapat mengarah kepada pengikut gerakan.



Gambar: Aksi Protes terhadap penggunaan kekerasan dalam menghadapi Gerakan Penolakan Tambang Batu Andesit di Desa Wadas.

Sumber Foto: <https://nasional.kompas.com/>

Penggunaan kekerasan fisik tidak hanya dapat memanfaatkan aparat militer seperti yang dilakukan oleh Rezim Orde Baru untuk menaklukan aktivis gerakan pro demokrasi, akan tetapi bisa juga menggunakan kelompok-kelompok preman. Bentuk

Perlawanan Warga Pesisir

kekerasan fisik yang paling ekstrim adalah penculikan para aktivis gerakan untuk membungkam mereka-mereka yang dianggap vokal mengkritik dan melawan kekuasaan rezim yang terjadi di era Orde Baru.



Gambar: Wiji Thukul, salah satu Aktivis Pergerakan yang dihilangkan secara paksa menjelang runtuhnya rezim Orde Baru.

Sumber Foto: <https://kabar24.bisnis.com/>

Selain empat bentuk resistensi yang disampaikan Locher (2002), di Indonesia saat ini juga terdapat variasi baru dalam bentuk kontrol sosial non-formal (*Non-Formal Social Control*) untuk membendung masifnya aksi gerakan masyarakat dalam mengkritik pemerintah di sosial media. Upaya tersebut yakni dengan menggunakan kekuatan *Buzzer*. Dalam lanskap politik Indonesia dalam kurun waktu satu dekade terakhir, *buzzer* politik mampu menjelma menjadi kekuatan propaganda di media sosial, bahkan fenomena ini juga terjadi di berbagai negara (Bradshaw & Howard, 2019). Namun dalam kasus di Indonesia, *buzzer* politik justru dituding sebagai *biang kerok* degradasi

demokrasi karena konten-konten yang mereka produksi dianggap telah memecah-belah kohesifitas bangsa. Hal ini dapat terjadi ketika buzzer cenderung memfasilitasi elit politik dalam melakukan kampanye politik negatif dengan mengimplikasi pesan-pesan politik secara masif, dimana mereka yang terkadang juga buzzer pro-pemerintah termasuk “*kebal hukum*” dalam melakukan *Black Campaign* kepada lawan politik ataupun terhadap oposan pemerintah (Mustika, 2017; Saraswati, 2018; Arigi, 2019).



Gambar: Buzzer Pendukung Pemerintah

Sumber: <https://rm.id/baca-berita/parpol/64404/pake-buzzer-bukti-parpol-gagal-tuh>

Hasil studi Bradshaw & Howard (2019), menunjukkan bahwa penggunaan buzzer dalam bidang politik dari subjek penelitiannya yang meng-cover 70 negara telah menyentuh angka 89%. Fenomena buzzer mulanya berasal dari bidang ekonomi, yakni aktifitas *marketing* untuk mendorong pemasaran baik dalam bentuk barang ataupun

jasa dengan teknik-teknik tertentu, seperti contohnya memperkuat arus informasi dari mulut ke mulut (Mustika, 2019). Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi dan aktifitas media sosial, jasa buzzer semakin dibutuhkan dalam bidang politik. Apalagi Indonesia merupakan salah satu dari negara-negara pengguna sosial media terbesar di dunia. Buzzer tidak hanya ditugaskan untuk mengunggah konten-konten untuk mempromosikan politisi saja, tetapi juga berfungsi untuk menghalau dan mengacaukan opini-opini yang bersifat kontra terhadap politisi tertentu, bahkan juga pemerintah. Kemampuan buzzer dapat diukur dari bagaimana kemampuan mereka dalam menjangkau dan mendistribusikan konten kepada netizen. Tidak dapat dielakkan, di Indonesia buzzer menempati fungsi primer sebagai opinion maker dalam topik-topik perbicangan di media sosial abad 21. Kasus di Indonesia bahkan mengungkap fakta yang cukup memprihatinkan, dimana kecenderungan buzzer politik memilih untuk menggunakan akun-akun palsu yang dikendalikan secara manual oleh manusia, ataupun secara otomatis oleh robot-robot untuk menciptakan konten-konten yang bersifat disinformasi maupun misinformasi, sehingga tidak jarang konten-konten yang diproduksi buzzer menempati posisi *trending topic* di sosial media (Sugiono, 2020).



Gambar: Infografis Perkembangan Buzzer Politik di Indonesia
Sumber: Tirto.id

Faktor Penentu Keberhasilan dan Kegagalan Gerakan Sosial

Dalam mempelajari pola gerakan sosial dan sejarah tradisi gerakan di Amerika, Locher (2002:17) menemukan faktor-faktor determinan yang mempengaruhi berhasil dan gagalnya suatu gerakan sosial, yakni:

1. Kepemimpinan Efektif (*Effective Leadership*)

Suatu gerakan sosial akan dapat menghindari kegagalan jika memiliki pemimpin-pemimpin yang efektif. Pemimpin efektif ini merupakan aktor-aktor yang memahami sistem sosial-politik & hukum, yang memungkinkan mereka untuk merancang dan menentukan langkah-langkah strategi meningkatkan peluang keberhasilan. Melalui pemahaman tersebut, para pemimpin gerakan mampu membentuk organisasi gerakan dan memainkan sumberdaya-sumberdaya gerakan secara optimal agar tujuan bersama dapat tercapai. Hanya pemimpin gerakan yang efektif yang mampu memberdayakan divisi-divisi dalam struktur organisasi secara proporsional. Selain itu, pemimpin efektif juga dapat dilihat dari bagaimana mereka membangkitkan semangat sekaligus inspirasi untuk bertindak kepada anggota gerakan. Semakin besar pengaruh yang diberikan seorang pemimpin kepada orang lain untuk bergabung melakukan aksi dan memperkuat gerakan, maka semakin efektif kepemimpinannya. Salah satu contoh dari pemimpin gerakan yang mampu menginspirasi banyak pengikut adalah Mahatma Gandhi. Anti-kekerasan adalah jalan yang dipilih Gandhi sebagai upayanya untuk mencapai tujuan-tujuan gerakan yang dibangunnya.

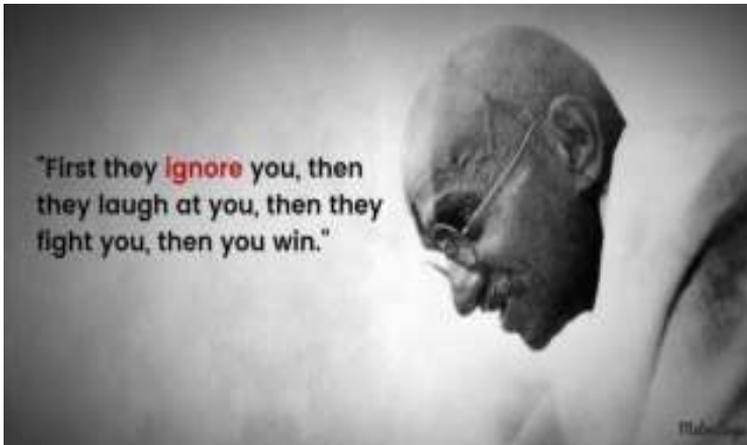
Mahatma Gandhi “...non-violence is the first article of my faith”

Mahatma Gandhi memiliki nama panjang Mohandas Karamchand Gandhi. Dalam kosakata Sansekerta, nama tersebut mengandung makna Jiwa yang Agung. Ia dilahirkan pada tanggal 2 oktober 1869 di India, tepatnya di negara bagian Gujarat.

Ayahnya bernama Karamchad Gandhi, yang dikenal sebagai Kepala Menteri di provinsi Porbandar, yakni ibukota kerajaan kecil yang terletak di wilayah India Barat. Sementara ibunya bernama Putlibai, seorang ibu rumah tangga dan penganut Hindu yang taat. Dari ibunya inilah Gandhi banyak belajar tentang gaya hidup vegetarianisme, toleransi beragama, kesederhanaan hidup hingga penolakan terhadap bentuk-bentuk kekerasan.

Gandhi sangat beruntung karena pernah mengenyam pendidikan tinggi yang berkualitas. Ia diterima sebagai mahasiswa Ilmu Hukum di University of London. Di sana ia belajar banyak tentang hukum dan yurisprudensi, karena bercita-cita untuk menjadi pengacara. Selepas menempuh pendidikan hukum, ia kemudian kembali ke negaranya dan menjadi pengacara. Karir Gandhi sebagai pengacara awalnya tidaklah berjalan mulus. Ketika menangani kasus pertamanya, Gandhi justru mengalami kekalahan hingga dirinya dibuang dari kantornya sendiri oleh seorang pejabat Inggris. Gandhi akhirnya memutuskan untuk pergi ke Afrika Selatan untuk membantu sepupunya yang bernama Abdullah yang terjerat kasus hukum. Setelah menghabiskan 21 tahun sebagai Lawyer terkenal di Afrika Selatan, Gandhi ternyata menemukan ketertarikan lain yakni tentang pemikiran dan etika politik.

Dala suatu perjalanan di Afrika Selatan, Gandhi pernah mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan dari petugas kereta api. Dirinya diusir dari gerbong kelas satu hanya karena warna kulitnya yang dianggap sebagai imigran India. Merasa mendapatkan perlakuan diskriminatif, Gandhi kemudian mendirikan Indian Congress di Natal, yang bertujuan untuk melawan segregasi dan mengembangkan pemikiran-pemikiran tentang ‘Pemurnian Diri’ dan ‘Satyagraha’, dengan menggencarkan aksi-aksi protes tanpa penggunaan kekerasan oleh warga sipil.



Gambar: salah satu kutipan Gandhi yang populer.

Sumber: metrosaga.com

Gandhi kemudian ditangkap dengan tuduhan telah mengorganisir pembangkangan sipil (*civil disobedience*) dengan mengajak orang-orang untuk melakukan mogok kerja dan mengadakan “*Long-March*” sebagai bentuk penentangan terhadap pengenaan pajak-pajak yang berlebihan kepada penduduk keturunan India. Gerakan ini ternyata menyulut perbincangan publik internasional, sehingga otoritas pemerintahan Inggris di Afrika Selatan terpaksa membebaskan Gandhi dan mencabut kebijakan pajak-pajak tersebut. Dari gerakan inilah Gandhi akhirnya mulai dikenal sebagai tokoh politik.

Perjalanan aktivitas politik Gandhi ternyata tidak berhenti sampai si situ saja. Ia pulang kampung ke India dan mulai melakukan gerakan untuk memperjuangkan kemerdekaan India paska tragedi pembantaian di Kota Suci Sikh, Amritsar. Pihak Inggris saat itu melakukan penembakan terhadap demonstran yang melakukan unjuk rasa, hingga sedikitnya 400 orang tewas dan 1300 orang lainnya mengalami cedera. Ia mengkampanyekan

agar penduduk India memutuskan segala bentuk kerjasama dengan penguasa Inggris, salah satunya yakni dengan melakukan pemboikotan produk-produk dari Inggris. Strategi ini ternyata menuai banyak simpati dari penduduk India dari semua agama dan golongan. Merasa terancam eksistensinya, Inggris kemudian memenjarakan Gandhi selama dua tahun dengan tuduhan melakukan penghasutan kepada rakyat. Sejak tahun 1870 di India, Inggris memberlakukan hukum terhadap segala bentuk aktivitas penghasutan sebagai upaya preventif menghadapi gerakan anti-kolonialisme dan anti-imperialisme. Namun Gandhi justru menuding undang-undang itu sengaja didesain untuk memberangus kebebasan warga negara, terlebih dari kalangan mahasiswa, intelektual, jurnalis dan aktivis sosial-politik. Selama dipenjara, Gandhi juag terus melakukan perlawanan dengan menuliskan pemikiran-pemikirannya seraya menjalankan puasa sebagai bentuk protes terhadap penguasa.



Gambar: Gandhi sedang menulis & melakukan puasa sebagai bentuk protes kepada Inggris.

Sumber: bbc.com

Dalam gerakannya, Gandhi menekankan pada bentuk aksi protes nir-kekerasan. Aksi-aksi nir-kekerasan sebagai strategi gerakan inilah yang disebutnya dengan Ahimsa. Secara harfiah, Ahimsa berarti tidak menyakiti, melukai, menyiksa ataupun membunuh semua makhluk ciptaan Tuhan. Bahkan, Gandhi tidak hanya mempraktikkan Ahimsa melalui tindakannya, tetapi juga ia tanamkan sejak dalam pikiran hingga perkataan. Ahimsa dipercaya sebagai anti-tesis dari konflik berbasis kekerasan. Tujuan Ahimsa tidaklah sekadar memenangkan persetujuan, tetapi juga berupaya mengubah orang-orang ataupun penguasa yang berperilaku jahat menjadi berperilaku baik.

Selain itu, Gandhi juga semakin gencar mempopulerkan “Satyagraha”. Istilah ini merupakan wujud gerakan perlawanan masyarakat sipil yang dikomandoi langsung oleh Gandhi. Dalam pemahaman lain, Satyagraha juga bisa dikatakan sebagai “Jalan Kebenaran”. Gerakan ini terbentuk mulanya sebagai upaya untuk menunjukkan protes terhadap monopoli yang dilakukan oleh pemerintah India. Menurut Gandhi, garam merupakan kebutuhan utama rumah tangga rakyat India, sehingga tidak seharusnya penguasa memonopoli urusan garam bagi warganya.

Gandhi menjadi sosok yang inspiratif karena keyakinan kuat dan konsistensinya terhadap gerakan anti-kekerasan yang diembannya, serta menggerakkan rakyat India untuk melakukan penangkangan sipil (*civil disobedience*). Baginya, perlawanan terhadap kekuasaan negara kolonial (pendudukan Inggris) tidak akan bisa dimenangkan dengan aksi kekerasan dalam bentuk apapun. Metode inilah yang disebutnya sebagai “*Purely Spiritual Weapon*/Senjata Agama Murni”. Gandhi meyakini bahwa cinta-kasih merupakan satu-satunya prinsip sejati dalam hubungan

antar manusia. Mencintai dan mengasihi berarti memberikan penghormatan dan kepedulian tanpa pamrih terhadap orang lain. Konsep inilah yang dipopulerkan Gandhi sebagai “Menyeka setiap tetesan tangis dari setiap mata/*Wiping away every tear from every eye*”.



Gambar: Alur pemikiran ajaran Gandhi.

Sumber: 2013. The Politics Book. Dorling Kindersley, London

Kemampuan Gandhi dalam menghimpun dukungan publik melalui jalan damai telah memberikan tekanan kuat kepada pihak Inggris untuk perlahan-lahan membuka diri guna melakukan perundingan demi perundingan. Akhirnya di tahun 1947, Gandhi menjadi saksi bagaimana negara yang sangat dicintainya memperoleh kemerdekaan. Terdapat satu cita-cita Gandhi yang belum sempat terwujudkan, yakni menyaksikan umat Hindu dan Muslim benar-benar hidup bersama dan penuh kedamaian dalam satu negara India. Ia ingin agar India menjadi negara yang tidak terpecah-belah oleh agama, kelas dan kasta. Namun cita-cita tersebut pupus tatkala negaranya dipecah menjadi Negara India dan Negara Pakistan. Pemisahan dua negara tersebut ternyata tetap menimbulkan kekerasan antar umat Muslim dan Hindu. Gandhi kemudian mulai melakukan puasa untuk melindungi hak-hak kaum muslim yang memilih untuk tetap menjadi warga negara India. Namun sayang, belum genap setahun kemerdekaan India, Gandhi menjadi korban penembakan oleh seorang laki-laki penganut Hindu radikal dalam suatu perjalanannya menghadiri acara doa bersama. Penembak tersebut merasa kecewa karena sikap Gandhi yang bersahabat dengan umat muslim dan negara Pakistan.

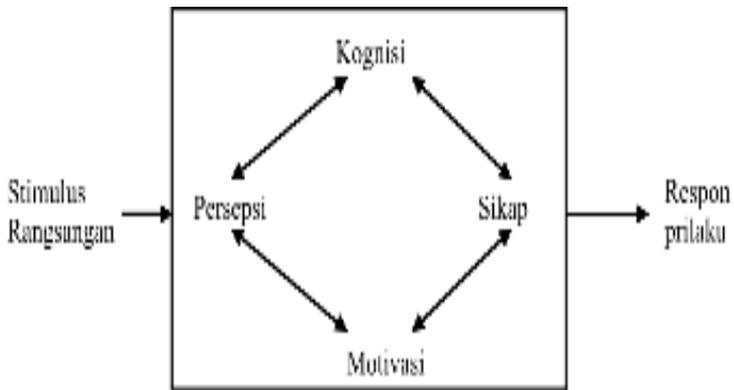
2. Image: Positive Image of Social Movement (Citra Positif Gerakan Sosial)

Aspek berikutnya yang mempengaruhi keberhasilan sebuah gerakan terdapat pada citra yang dibentuk oleh gerakan tersebut. Secara sederhana, citra adalah persepsi akan sesuatu yang ada dibenak seseorang kendatipun tidak sepenuhnya sesuai dengan realitas yang terjadi (Lippman, 1997). Bagi Kotler (1994), citra merupakan sejumlah kesan-kesan, gambaran-gambaran serta

keyakinan-keyakinan yang dimiliki oleh seseorang terhadap suatu objek, dimana objek tersebut dapat berupa individu, kelompok ataupun organisasi tertentu. Citra dalam konteks kajian pada buku ini dapat dipahami sebagai impresi (kesan), perasaan dan gambaran yang ditangkap oleh publik sebagai upaya yang dengan sadar dibentuk oleh sebuah gerakan (Soemirat & Elvinaro, 2005). Selanjutnya, Soemirat & Elvinaro, (2005) menguraikan beberapa faktor yang saling berkaitan satu sama lain dalam proses pencitraan, yakni:

- a. Kognisi, merupakan sebuah keyakinan dari individu terhadap adanya stimulus (rangsangan), yang dapat muncul ketika individu mampu memahami informasi-informasi yang memadai terhadap suatu objek.
- b. Persepsi, yakni hasil pengamatan individu terhadap suatu objek yang berada dalam wilayah cakupan perhatiannya, sehingga akan membentuk sebuah proses pemaknaan terhadap objek tersebut.
- c. Motif, adalah kondisi/keadaan yang mendorong individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu demi tercapainya sebuah tujuan.
- d. Sikap, yaitu kecenderungan dari individu untuk berpikir, berpersepsi, bertindak serta mampu merasa sebagai respon dari suatu objek, situasi ataupun nilai tertentu. Singkatnya, sikap tidak sama dengan perilaku, melainkan berupa kecenderungan-kecenderungan untuk berperilaku menggunakan cara-cara tertentu.

Dalam proses pembentukan citra (pencitraan), menurut John S. Nimpoeno (dalam Soemirat & Elvinaro, 2005) keempat faktor tadi saling berkelindan erat yang menghubungkan antara input dan output.



Gambar: Model Pembentukan Citra menurut John S. Nimpoeno

Sumber: Soemirat & Elvinaro (2005)

Mengutip dari Anwar Arifin (Arifin, 2003), pencitraan dapat dibagi ke dalam 4 (empat) tahapan :

1. Fase Representasi, yaitu dimana citra adalah cerminan dari sebuah realitas
2. Fase Ideologi , yaitu citra mampu memberikan suatu gambaran ataupun mampu menyembunyikan sesuatu yang berbeda dari realitas
3. Fase Penyembunyian (*Concealment*), yaitu ketika citra benar-benar dapat menyembunyikan sebuah realitas dengan menampilkan gambaran yang sama-sekali berbeda dengan realitas.
4. Fase Independensi, yakni suatu citra yang tidak memiliki relasi apapun terhadap sebuah realitas.

Dalam praktik pencitraan, para aktor-aktor gerakan seharusnya tidak hanya mampu memahami faktor-faktor pembentuknya. Akan tetapi mereka juga perlu mengetahui bahwa

citra yang terdapat dalam setiap gerakan memiliki jenis-jenis tersendiri, yang bisa jadi berbeda dengan jenis citra yang dimiliki oleh gerakan-gerakan sosial lainnya. Terkait dari diferensiasi jenis-jenis citra, kita dapat meminjam eksplanasi yang diuraikan oleh Frank Jefekins (1998), yakni:

- a. *Mirror Image (Citra Bayangan)*, merupakan citra yang terdapat pada anggota-anggota organisasi (dalam konteks ini adalah gerakan). Dalam kata lain, citra bayangan ini disebut juga sebagai citra internal yang dimiliki oleh individu-individu yang terdapat dalam suatu gerakan terkait persepsi/pandangan pihak luar terhadap gerakan mereka. Melalui citra inilah, pihak-pihak luar (*the outsiders*) akan merespon dengan memberikan penilaian terhadap gerakan yang dilakukan. Dalam banyak kasus citra bayangan ini juga banyak disebut sebagai ilusi, yang disebabkan karena kekeliruan dalam melakukan proses penilaian akibat minimnya informasi, pemahaman ataupun pengetahuan yang dikuasai oleh individu-individu dalam gerakan tentang pandangan/persepsi sebenarnya dari pihak luar.
- b. *Current Image (Citra yang sedang terjadi/berlaku)*, disebut juga sebagai citra kekinian yang merupakan bentuk pandangan yang melekat pada *the outsiders* tentang sebuah gerakan. Menariknya, seperti halnya dengan jenis citra bayangan, citra yang sedang berlaku ini memiliki sifat tentatif. Artinya citra jenis ini tidak berlaku untuk selamanya, karena sangat bergantung dari besar kecilnya arus informasi yang dimiliki oleh orang-orang yang mempercayainya.
- c. *Wish Image (Citra yang Diharapkan)*, atau yang lebih sederhana disebut sebagai citra harapan merupakan sebuah citra yang diharapkan oleh pihak-pihak yang melakukan pencitraan. Sudah menjadi sifatnya, citra jenis ini juga bukan

berarti memiliki kesamaan dengan citra yang sebenarnya. Dalam suatu gerakan, aktor-aktor gerakan sebagai pihak-pihak yang melakukan pencitraan tentu mengharapkan terbentuknya citra yang lebih baik atau lebih positif daripada citra yang sebenarnya terjadi. Namun yang perlu diperhatikan oleh pemimpin gerakan adalah citra yang terlalu positif/sempurna atau istilahnya disebut “*to good to be true*” juga sebenarnya perlu dihindari karena justru akan membentuk kecurigaan terhadap adanya manipulasi yang berlebihan terhadap citra yang diinginkan, hingga akhirnya sebuah gerakan tersebut malah memiliki citra yang negatif.

- d. *Institutional Image* (Citra Kelembagaan), merupakan citra yang dimiliki secara komprehensif oleh suatu organisasi, yang tidak hanya terbatas pada citra terhadap produk, layanan atau aksi-aksi dari suatu organisasi saja. Dalam gerakan, para aktor perlu melakukan tindakan-tindakan untuk menunjukkan bahwa gerakan yang dibawanya memiliki reputasi, komitmen, serta pencapaian-pencapaian yang telah didapatkan yang memiliki nilai positif sejak proses embrio pembentukannya. Jangan sampai dalam proses pembentukan gerakan, para aktor melakukan tindakan-tindakan yang berpotensi akan merugikan perkembangan gerakan yang telah dibangun.
- e. *Multiple Image* (Citra Majemuk), merupakan citra yang bersifat makro (umum) yang terbentuk sebagai akumulasi dari citra-citra mikro dari individu-individu di dalamnya. Sebuah gerakan seringkali memiliki aktor-aktor yang memiliki perilaku yang dan latar belakang berbeda-beda, yang dengan sendirinya akan membentuk citra dari masing-masing aktor. Citra dari masing-masing aktor inilah yang secara disengaja ataupun tidak yang kemudian akan membentuk citra holistik gerakan.

Dari pemaparan tentang urgensi citra dalam gerakan, dapat disimpulkan bahwa apabila para aktor-aktor/pemimpin gerakan mampu membangun citra yang baik melalui aksi-aksi yang dilakukannya dalam gerakan, maka gerakan tersebut akan mendapatkan respek (penghormatan dan penghargaan) dari kelompok massa ataupun kelompok elit. Citra yang positif dari gerakan dapat memberikan peluang yang besar dalam mendapatkan kepercayaan (*trust*) dan dukungan publik. Oleh sebab itu, citra yang positif yang dimiliki oleh suatu gerakan akan mempermudah gerakan tersebut untuk mencapai tujuan-tujuannya.

3. ***Socially Accepted Tactics* (Taktik yang diterima dalam suatu masyarakat)**

Saat memperjuangkan tujuan-tujuan gerakan, para pemimpin gerakan tentunya telah menyiapkan sejumlah taktik-taktik dan kemudian akan mereka pilih. Bentuk taktik ini beragam, tergantung dari kreatifitas para pemimpin gerakan dan kondisi/ lingkungan sosial-politik yang melatarinya. Taktik yang dipilih haruslah efektif dalam memperjuangkan tujuan dari gerakan. Menariknya, kita bisa mengamati variasi perbedaan taktik yang dipilih oleh pemimpin gerakan berdasarkan waktu dan lingkungan sosial politik yang melatarinya. Artinya pemilihan taktik yang digunakan oleh suatu gerakan dalam waktu, tempat dan kondisi tertentu belum tentu efektif untuk digunakan dalam *setting* yang berbeda. Para pemimpin gerakan perlu menyadari bahwa tidak ada taktik universal yang dapat efektif dilakukan oleh setiap gerakan. Sebagai contoh, taktik gerakan nir-kekerasan dan kedamaian yang dilakukan oleh Gandhi di India abad ke-20 belum tentu berhasil jika dilakukan di Inggris di abad ke-19. Uniknya, taktik yang efektif kala itu di Inggris justru dilakukan dengan taktik berbasis aksi-aksi radikal, sebagaimana

yang dilakukan oleh Emmiline Pankhurst dalam memimpin gerakan pengakuan hak politik perempuan di daratan Inggris. Walaupun berbasis pada penggunaan aksi-aksi kekerasan seperti memecahkan kaca jendela ataupun melakukan pengrusakan properti lawan-lawan politiknya, namun di masa itu taktik yang dijalankan oleh Emmeline dan para pengikutnya dapat diterima oleh publik di Inggris. Publik menganggap apa yang dilakukan Emmeline memang perlu untuk dilakukan karena resistensi dari kelompok penguasa untuk membuka diri terhadap penindasan terhadap kaum perempuan.

Emmeline Pankhurst “...either women are to be killed, or women are to have the vote”.

Emmeline Pankhurst merupakan aktivis politik dan pemimpin gerakan hak pilih kaum perempuan di Inggris Raya. Pankhurst menjadi populer karena taktik-taktik radikal & militan yang dilakukannya demi mendapatkan pengakuan atas hak pilih dan kesetaraan perempuan di daratan Inggris.



Gambar: Emmiline Pankhurst

Sumber: kumpan.com

Sebagai perempuan yang berlatar belakang dari keluarga kelas menengah, Emmiline Pankhurst memiliki pendidikan yang baik. Sebelum melanjutkan studinya di Paris pada Ecole Normale Superiure, Emmeline terlebih dahulu menyelesaikan pendidikannya di Manchester pada usia 15 tahun. Ayahnya dikenal sebagai pengusaha yang berhaluan politik radikal dengan menentang perbudakan dan *Corn Laws*. Ibunya, merupakan seorang feminis yang aktif memperjuangkan hak-hak politik perempuan.

Ketertarikannya dalam perihal aktivisme perempuan semakin menguat ketika menikah dengan Richard M. Pankhurst yang merupakan pengacara yang terlibat dalam rancangan amandemen dengan tajuk *Municipal Franchise Act 1869*. Amandemen ini memberikan ruang kepada perempuan yang menjadi kepala rumah tangga karena tidak menikah untuk idapat memberikan hak pilih dalam pemilu lokal di Inggris. Selain itu, Richard M. Pankhurst diketahui juga menulis undang-undang *Married Women's Property Act* di tahun 1870 hingga 1882.

Emmiline Pankhurst mampu menjadi tokoh penting dalam pergerakan emansipasi perempuan karena kemampuannya memainkan aksi-aksi protes dari yang bersifat konvensional hingga radikal, seperti demonstrasi publik, mogok makan, hingga tindak kekerasan di penjara untuk mendorong rekognisi hak politik bagi kaum perempuan. Emmiline Pankhurst kerap mendekam di “Hotel Prodeo” karena tindakannya yang vokal. Di dalam penjara, bersama rekan-rekan perempuan seperjuangannya Emmiline melakukan aksi mogok makan, walaupun secara paksa disuapi oleh petugas penjara. Para aktivis tersebut menyebut praktik pemaksaan makan ini sebagai penyiksaan. Beberapa orang yang ikut aksi mogok makan mengalami nasib tragis hingga tewas.

Di tahun 1859, Emmeline terlibat dalam aktivitas pekerja sosial *Poor Law*, dimana salah satu tugasnya yakni mengunjungi ke penjara-penjara. Keberpihakannya kepada nasib perempuan semakin tergugah manakala ia menyaksikan kondisi para tahanan perempuan yang cukup memprihatinkan. Ia semakin meyakini, untuk mengatasi persoalan tersebut termasuk masalah-masalah sosial lainnya yang melibatkan perempuan, pemberian hak politik kepada kaum perempuan adalah harga mati. Di periode awal pergerakannya, Emmiline memilih melakukan aksi damai dengan menginfiltrasi arena-arena pertemuan politik. Aksi ini mendapat simpati dari para perempuan bangsawan dan perempuan terpelajar. Gerakan ini semakin menguat saat kedua anggota gerakan yakni Christabel Pankhurst dan Annie Kenney mendapatkan aksi pengusiran dari sebuah acara kampanye pemilu oleh aparat keamanan setelah mereka menuntut hak untuk memilih. Tidak hanya itu, keduanya juga diseret ke rumah tahanan karena menolak membayar denda akibat tuduhan penyerangan dengan cara meludahi seorang polisi dalam kampanye tersebut. Kasus tersebut ternyata menyedot perhatian publik, sehingga secara perlahan tapi pasti gerakan tersebut mulai menggema di Inggris.

Di tahun 1903, Emmiline mendirikan Persatuan Sosial dan Politik Perempuan/*Women Social and Political Union* (WSPU). Moto gerakan WSPU adalah “Perbuatan bukan kata-kata”. Slogan tersebut diambil dari kata-kata yang diucapkannya pada sebuah pidato yang secara tajam mengupas urgensi hak pilih perempuan dalam bidang politik. Mulanya aksi ini menggunakan pendekatan nir-kekerasan, optimalisasi pidato-pidato politik, penggalangan tanda-tangan, menerbitkan buletin “*Votes for Women*”, hingga pengorganisasian unjuk rasa. Emmiline juga membentuk kekuatan ekstra-parlementer yang diberi nama “Parlemen Wanita” yang bertujuan menjadi kekuatan oposan-informal dan

pembandingan dari setiap agenda-agenda sidang parlemen Inggris. Untuk pertama kalinya, Emmiline ditangkap oleh kepolisian di tahun 1908 setelah berupaya memasuki parlemen untuk menyampaikan kritik dan protes terhadap perdana menteri. Emmiline dipenjara selama lebih kurang 6 minggu. Di sanalah ia banyak memahami tentang kondisi para tahanan wanita yang sangat menyedihkan. Akhirnya ia memutuskan untuk menjadikan penjara sebagai sarana untuk melancarkan aksi-aksi protesnya. Walaupun terlihat sekilas seperti aksi bunuh-diri, namun Emmiline secara sadar berupaya merancang berbagai tindakan politik dengan tujuan agar dirinya kembali dipenjara berulang-ulang. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan kepada masyarakat dunia bahwa ia ditangkap bukan karena melakukan tindakan kejahatan, melainkan berupaya menjadi legislator untuk memperjuangkan hak pilih perempuan.



Gambar: Emmiline yang diamankan oleh petugas kepolisian Inggris.

Sumber: wearethecity.com

Dalam memperjuangkan hak politik perempuan, Emmiline tercatat tiga kali dijebloskan ke penjara pada periode 1908-1909. Setahun setelahnya ia dan tiga ratus anggota WSPU merangsek masuk ke parlemen untuk bertemu dengan Perdana Menteri Herbert Asquith untuk memprotes atas penghentian Rancangan Undang-Undang Konsiliasi yang mengakomodir hak pilih perempuan. Meskipun dijaga oleh polisi, mereka memaksa menerobos masuk ke gedung parlemen. Akibat hal tersebut, lebih dari 100 perempuan yang menjadi peserta aksi turut ditahan dengan tuduhan melakukan penyerangan serta mengganggu ketertiban umum. Gerakan perempuan ini tidak hanya diam, mereka membalas tuduhan tersebut dengan menyatakan bahwa polisi telah bertindak brutal dalam menghadapi para protes. Peristiwa ini telah tercatat dalam sejarah gerakan-gerakan di dunia dengan julukan *Black Friday*.

Paska aksi bersejarah tersebut, mulai tahun 1912 Emmiline beserta pengikut gerakan semakin bergairah menggunakan aksi kekerasan dalam kampanye-kampanye yang mereka lakukan. Memecahkan kaca jendela, mengikat diri ke pagar hingga melakukan penyerangan kepada politisi telah mereka lakukan dengan keyakinan untuk memberikan tekanan dan teror kepada politisi untuk segera mengakomodir tuntutan-tuntutan gerakan perempuan. Bagi mereka, pelanggaran terhadap hukum sebagai taktik untuk menarik perhatian adalah cara yang efektif dan rasional untuk dilakukan oleh perempuan disaat kondisi seks perempuan sangat direndahkan. Di tahun 1912 inilah, Emmiline tercatat tidak kurang dari 12 kali masuk penjara. Di dalam sel, ia terus melakukan mogok makan untuk mendapatkan hak memulihkan diri di luar penjara. Sebab berdasarkan Undang-Undang Narapidana di Inggris yang berlaku pada saat itu membolehkan tahanan untuk dibebaskan agar

dapat memulihkan diri dan kemudian kembali dimasukkan ke dalam sel hingga hukumannya berakhir. Inilah yang populer kala itu disebut sebagai “Undang-Undang Kucing dan Tikus”. Pada tahun 1913, gerakan Emmiline bersama WSPU semakin radikal. Mereka semakin nekat melakukan aksi-aksi kekerasan seperti merusak tempat-tempat penting seperti Katedral Westminster Abbey serta rumah dan properti lawan-lawan politik.



Gambar: Film Suffragette yang mengisahkan perjuangan Emmiline

Sumber: IMDb.com

Saat meletusnya Perang Dunia I, Emmeline dan pengikutnya mulai merubah taktik kampanye mereka. WSPU mereformasi organisasi mereka dan kemudian mengganti namanya dengan Partai Perempuan di tahun 1917. Saat para laki-laki bertugas di medan perang, Emmiline memobilisasi kaum perempuan untuk berperan besar menjadi tenaga kerja yang dapat diandalkan seperti di pabrik-pabrik serta di sektor publik lainnya. Hal ini semakin membuka mata para pemegang otoritas untuk memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan, khususnya di bidang politik. Akhirnya, perjuangan Emmiline membuahkan hasil saat perempuan di atas umur 21 tahun diberikan hak oleh undang-undang untuk memberikan suara pada pemilu di Inggris sejak 2 Juli 1928.

4. *Socially Acceptable Goals* (Tujuan yang dapat diterima publik)

Mayoritas keberhasilan gerakan-gerakan sosial dapat berhasil mencapai tujuannya sepanjang *the outsiders* (pihak luar) dapat menerima bahwa motif gerakan benar-benar dalam koridor memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan semata dijadikan panggung untuk mendapatkan kepentingan para pemimpin gerakan saja. Tujuan gerakan juga diukur dari sejauh mana pemikiran, narasi dan argumentasi yang diajukan oleh gerakan dapat diterima oleh publik. Bahkan gagasan yang dibangun oleh gerakan tersebut haruslah mampu melewati tahap uji dari para pakar dan pengamat gerakan (*bystanders*), bahwa masyarakat luas akan diuntungkan jika tujuan gerakan tersebut dapat tercapai. Gerakan yang dilakukan oleh Gandhi dan Emmiline seperti yang telah diuraikan di atas, mampu menunjukkan eksistensinya di tengah publik bahwa apa yang mereka lakukan bukan sekadar bisa mengucapkan “membuat kehidupan masyarakat lebih baik” atau sekadar mengatakan “meningkatkan kehidupan masyarakat” saja.

Dari contoh gerakan yang digagas Gandhi dan Emmiline dukungan publik secara luas tidak akan dapat dibentuk hanya dengan mengandalkan rasionalitas semata. Mereka juga menyelipkan urgensi dan kegelisahan yang bisa dirasakan oleh publik, bahwa apa yang terjadi saat itu bukanlah kondisi ideal yang bisa dibiarkan berlarut-larut. Oleh sebab itu mereka bersikukuh untuk melakukan upaya perubahan dengan menggalang kekuatan sosial, yang kemudian dikonversikan menjadi kekuatan politik. Gandhi dan Emmiline juga memberikan pembelajaran kepada para pemimpin gerakan setelahnya bahwa dalam setiap gerakan perlu diselipkan ideologi yang akan menjadi ruh dari sebuah gerakan. Secara terminologis, Ideologi terdiri dari kata “ideo” dan “logi”, dimana kata “ideo” berakar dari bahasa Yunani yakni “eidos”, yang dalam bahasa latin disebut dengan “idea” yang bermakna “ide, gagasan” atau “pemikiran”. Sementara itu, kata “logi” juga berasal dari bahasa Yunani yakni “logos” yang berarti “pengetahuan” atau “ilmu”. Sehingga ideologi dapat dipahami sebagai ilmu pengetahuan tentang ide-ide manusia. Tanpa adanya ideologi yang diemban, akan sangat sulit bagi gerakan untuk mendapatkan dukungan publik secara massif. Dalam menjalankan gerakannya Gandhi secara konsisten menunjukkan jalur ideologinya yakni “Ahimsa” yang selaras dengan Humanisme. Begitu pula dengan Emmeline, yang secara gigih mendorong ideologi Feminisme sebagai basis gerakan mereka untuk menentang dominasi kultur patriarki dalam persoalan politik. Oleh sebab itu, para pemimpin gerakan sosial juga sebaiknya mampu mengembangkan ideologi yang digunakan untuk membentuk kerangka “*Framing*” agar pemaknaan terhadap gerakan dapat lebih mudah dan jelas dipahami oleh publik.

5. *Financial and Political Support (Dukungan Politik dan Finansial)*

Salah satu faktor dari kemampuan gerakan sosial yang mampu mencapai keberhasilan terletak dari bagaimana mereka mampu mendapatkan dukungan keuangan dari berbagai pihak. Tidak bisa dinafikan, sumberdaya keuangan merupakan unsur krusial yang mempengaruhi daya tahan sebuah gerakan. Dengan memiliki sumberdaya finansial yang kuat, sebuah gerakan dapat memenuhi berbagai kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan, seperti logistik gerakan hingga perangkat-perangkat yang dibutuhkan untuk menjalankan aksi-aksi gerakan. Sumberdaya finansial dapat diperoleh melalui berbagai jaringan kelompok, organisasi dan institusi yang menjadi pendukung gerakan tersebut. Demikian juga halnya dukungan politik terhadap gerakan. Keberhasilan gerakan-gerakan sosial akan sangat dipengaruhi oleh dukungan para pemegang kekuasaan, baik yang bersifat individu ataupun kelompok dan organisasi. Dukungan politik ini akan bertransformasi menjadi kekuatan aliansi yang potensial bagi gerakan untuk memperjuangkan tujuan-tujuannya. Oleh sebab itu, sangat diperlukan para aktor gerakan yang piawai untuk mengidentifikasi siapa saja yang menjadi lawan gerakan serta pihak-pihak mana saja yang menjadi pendukung politik dan finansial bagi keberlangsungan aktifitas gerakan. Para aktor gerakan perlu untuk memposisikan gerakan mereka agar pihak-pihak yang potensial untuk dijadikan aliansi dapat memahami arah langkah perjuangan sebuah gerakan. Sehingga akan lebih mudah bagi gerakan untuk mendapatkan dukungan finansial maupun dukungan politik yang sangat berguna untuk memperkuat peluang keberhasilan sebuah gerakan.

BAB IV

FASE-FASE GERAKAN SOSIAL

*Pertama, mereka mengabaikan Anda. Kemudian, mereka menertawakan Anda.
Berikutnya, mereka melawan Anda. Lalu, Anda menang...*
(Mahatma Gandhi)

Mengacu pada pandangan yang disampaikan Macionis (1999:623), terhadap studi-studi yang dilakukannya dalam menelaah konsep-konsep yang dikemukakan oleh beberapa pakar gerakan sosial (Blumer, 1969; Mauss, 1975; dan Tilly, 1978), yang membagi fase proses gerakan sosial ke dalam 4 (empat) tahapan, yaitu:

1. Fase Kemunculan (*Emergence*)

Pada fase ini, ditandai oleh beberapa gejala. Pertama yakni adanya kesadaran kolektif maupun adanya opini publik yang menganggap kondisi saat ini “sedang tidak baik-baik saja”. Mereka menilai bahwa telah terjadi persoalan bersama terkait isu-isu tertentu yang harus segera diselesaikan, oleh sebab itu perlu segera dilakukan tindakan-tindakan yang masif melalui pembentukan suatu gerakan. Selain opini publik terhadap adanya kondisi krisis, gejala lain yang bisa dirasakan di dalam fase ini yakni adanya sekelompok individu yang diperlakukan

tidak adil oleh kekuasaan, baik yang bersifat formal maupun informal. Individu-individu ini kemudian menyamakan persepsi kemudian bersepakat untuk membentuk gerakan untuk memperjuangkan kepentingan mereka. Gejala yang ketiga, yaitu munculnya perasaan tidak puas terhadap kondisi saat ini yang menyebar diantara individu-individu, sehingga mereka menyiapkan tindakan kolektif yang terorganisir dengan memunculkan gerakan sosial. Pada fase ini pulalah, ide-ide tentang apa yang akan diperjuangkan oleh gerakan mulai dikongkritkan oleh pemimpin gerakan dan aktor-aktor gerakan. Sehingga ide-ide tersebut telah matang untuk disebarkan kepada seluruh pengikut gerakan.

2. Fase Penggabungan (*Coalescence*)

Setelah fase kemunculan gerakan sosial berlangsung, maka pada fase selanjutnya ialah individu-individu yang tergabung di dalamnya dapat melakukan pendefinisian terhadap kelompok mereka sendiri. Hal ini perlu dilakukan sebagai upaya untuk melihat siapa-siapa saja yang dikategorikan sebagai pihak luar (*the outsiders*). Ketika pendefinisian pihak luar sudah terlihat jelas, maka gerakan perlu untuk menentukan kelompok mana saja diantara *the outsiders* yang menjadi lawan dan kelompok mana saja yang berpotensi menjadi aliansi gerakan. Pemimpin gerakan kemudian akan memutuskan taktik dan strategi untuk memperkuat sumberdaya-sumberdaya gerakan, dengan menggandeng aliansi-aliansi serta melakukan rekrutmen keanggotaan baru. Oleh karenanya tidak jarang kita menemukan pada tahap ini gerakan mulai “*Go Public*” dengan melakukan *collective action* (tindakan kolektif), misalnya menggelar demonstrasi, aksi *Long-March* ataupun aksi-kasi teatrical lainnya agar mampu menarik perhatian media massa dan perhatian publik secara luas.

3. Fase Birokratisasi (*Bureaucratization*)

Dalam fase ini, gerakan sosial memerlukan kemampuan menjalankan aktifitas-aktifitas birokrasi (*bureaucratization activity*) agar dapat mengurangi ketergantungan terhadap pemimpin, karena berbagai tugas-tugas/pekerjaan dalam gerakan dapat dilakukan oleh staf-staf yang menjalankan fungsinya dengan mumpuni (*capable staff*). Di tahap ini, pemimpin harus mampu untuk membuat struktur organisasi gerakan yang efisien, termasuk pembagian peran yang efektif dari para aktor gerakan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing divisi. Saat struktur organisasi terbentuk, maka secara otomatis suatu gerakan akan menjalankan fungsi birokratisasinya dengan semaksimal mungkin, sesuai dengan sumberdaya yang mereka miliki. Kemampuan menjalankan aktifitas birokratisasi akan menentukan tingkat kemapanan sebuah gerakan sosial. Melalui fase birokratisasi ini pulalah, gerakan sosial mampu menghindari resiko kehilangan aktifitas yang akan berujung pada kehilangan eksistensinya.

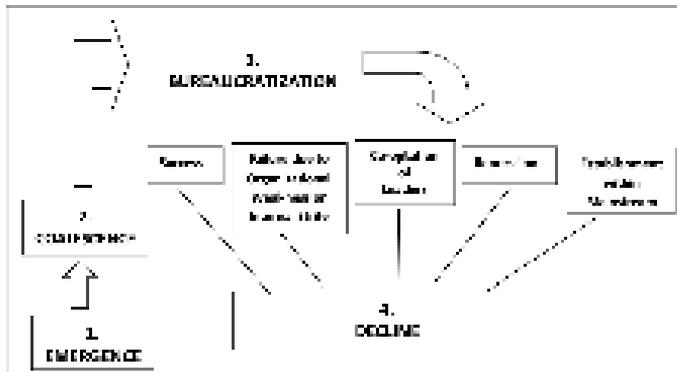
4. Fase Kemunduran (*Decline*)

Tahap ini merupakan fase terakhir dari perjalanan suatu gerakan sosial. Terdapat lima varian yang menjadi penyebab mengapa suatu gerakan mengalami kemunduran, yaitu:

- a. Gerakan sosial yang telah berhasil mencapai tujuan akan dengan sendirinya secara alamiah menuju proses penurunan aktivitas, sehingga dapat dikategorikan masuk sebagai tahap kemunduran.
- b. Gerakan sosial menghadapi kegagalan, yang disebabkan adanya ketidakmampuan pemimpin gerakan dalam mengorganisir sumberdaya-sumberdaya gerakan. Hal lain yang juga berpengaruh yakni munculnya konflik internal dalam organisasi yang membuat gerakan kehilangan fokus perjuangan atau bahkan mengalami stagnasi.

Perlawanan Warga Pesisir

- c. Gerakan sosial tidak mampu bertahan ketika menghadapi kooptasi terhadap para pemimpin gerakan, yang menyebabkan gerakan kehilangan kharisma, sosok simbolik dan arah perjuangannya.
- d. Gerakan sosial akan mengalami kemunduran saat menghadapi perlawanan (resistensi) maupun tekanan (represi) dari pihak-pihak eksternal yang tidak menginginkan berhasilnya gerakan tersebut.
- e. Gerakan sosial akan mengalami kemunduran manakala isu-isu yang diperjuangkan oleh gerakan tersebut mengalami tumpang-tindih dengan arus-utama yang telah diterima ke dalam bagian dari suatu sistem, yang membuat gerakan tersebut kehilangan peluang dalam membangun tantangan-tantangan terhadap posisi *status quo*.



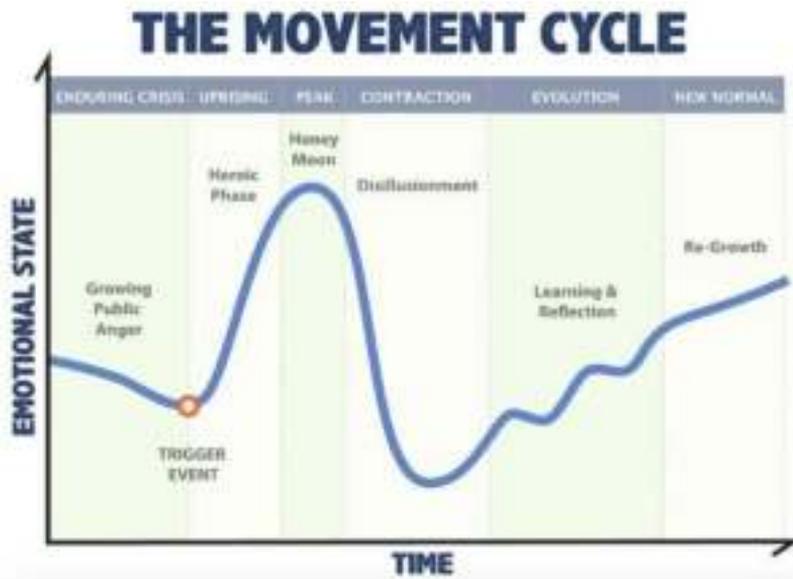
Gambar: Fase Kehidupan Gerakan Sosial

Sumber: Macionis, (1996: 623)

Pada prinsipnya, fase tumbuh-kembang antara satu gerakan sosial dengan gerakan sosial yang lain tidaklah berlaku universal. Dalam beberapa studi kontemporer terkait perkembangan gerakan sosial,

ditemukan model-model yang cukup variatif. Movement Netlab (2020), mengembangkan analisis pertumbuhan suatu gerakan sosial justru berbentuk siklus, dimana terdiri dari beberapa fase, yakni:

- a. Kemunculan kemarahan (*Rising Anger*)
- b. Hadirnya momentum pemicu (*a trigger moment*)
- c. Tahap heroik (*a heroic phase*)
- d. Tahap bulan-madu gerakan (*honeymoon*)
- e. Tahap kekecewaan (*disillusionment*)
- f. Tahap pembelajaran dan refleksi/evaluasi (*learning and reflection*)
- g. Tahap pertumbuhan kembali (*re-growth*)
- h. Tahap pengulangan (*repeat*)



Gambar: Siklus Gerakan Sosial versi Movement Netlab

Sumber: Movement Netlab (2020) (<https://www.wnycstudios.org/podcasts/otm/segments/understanding-social-movement-cycle-on-the-media>)

Kita juga dapat merujuk dari apa yang dikemukakan Dawson dan Getty (1951) terkait fase-fase gerakan sosial yang meliputi:

- a. Fase Awak Kerusuhan (*Preliminary Stage of Social Unrest*)
- b. Fase Populer dari Semangat Kolektif (*Popular Stage of Collective Excitement*)
- c. Fase Pengorganisasian Formal (*Stage of Formal Organization*)
- d. Fase Institusionalisasi (*Stage of Institutionalization*)

Sementara itu, berbeda dengan apa yang ditegaskan oleh Dawson dan Getty (1951), King's (dalam Sukmana, 2016) melihat fase gerakan-gerakan sosial secara lebih sederhana, yang meliputi:

- a. Tahap Awal (*Incipient*)
- b. Tahap Pengorganisasian (*Organizational*)
- c. Tahap Stabil (*Stable*)

Selanjutnya, senada dengan apa yang disampaikan King's (1956), tahap-tahap gerakan sosial yang sedikit lebih sederhana juga diajukan Smelser (1963), yang menyebutkan tiga tahap gerakan sosial yakni:

- a. Tahap Awal (*Incipient*)
- b. Tahap Mobilisasi antusias (*Enthusiastic Mobilization*)
- c. Tahap Institusionalisasi dan Organisasi (*Institutionalization and Organization*)

BAB V

Faktor Penentu Keberhasilan dan Kegagalan Gerakan Sosial

*Suara-suara itu tak bisa dipenjarakan, disana bersemayam kemerdekaan.
Jika kau menghamba kepada ketakutan kita akan
memperpanjang barisan perbudakan
(Widji Thukul)*

S etelah mengulas gerakan sosial sebagai manifestasi perlawanan, konseptualisasi gerakan sosial serta tahap-tahap gerakan sosial, kini sampailah kita pada pokok bahasan terkait faktor-faktor penentu keberhasilan dan kegagalan gerakan sosial. Dalam mempelajari pola gerakan sosial dan sejarah tradisi gerakan di Amerika, Locher (2002:17) menemukan faktor-faktor determinan yang mempengaruhi berhasil dan gagalnya suatu gerakan sosial, yakni:

1. Kepemimpinan Efektif (*Effective Leadership*)

Suatu gerakan sosial akan dapat menghindari kegagalan jika memiliki pemimpin-pemimpin yang efektif. Pemimpin efektif ini merupakan aktor-aktor yang memahami sistem sosial-politik & hukum, yang memungkinkan mereka untuk merancang dan menentukan langkah-langkah strategi meningkatkan peluang keberhasilan. Melalui pemahaman tersebut, para pemimpin gerakan mampu membentuk organisasi gerakan dan memainkan

sumberdaya-sumberdaya gerakan secara optimal agar tujuan bersama dapat tercapai. Hanya pemimpin gerakan yang efektif yang mampu memberdayakan divisi-divisi dalam struktur organisasi secara proporsional. Selain itu, pemimpin efektif juga dapat dilihat dari bagaimana mereka membangkitkan semangat sekaligus inspirasi untuk bertindak kepada anggota gerakan. Semakin besar pengaruh yang diberikan seorang pemimpin kepada orang lain untuk bergabung melakukan aksi dan memperkuat gerakan, maka semakin efektif kepemimpinannya. Salah satu contoh dari pemimpin gerakan yang mampu menginspirasi banyak pengikut adalah Mahatma Gandhi. Anti-kekerasan adalah jalan yang dipilih Gandhi sebagai upayanya untuk mencapai tujuan-tujuan gerakan yang dibangunnya.

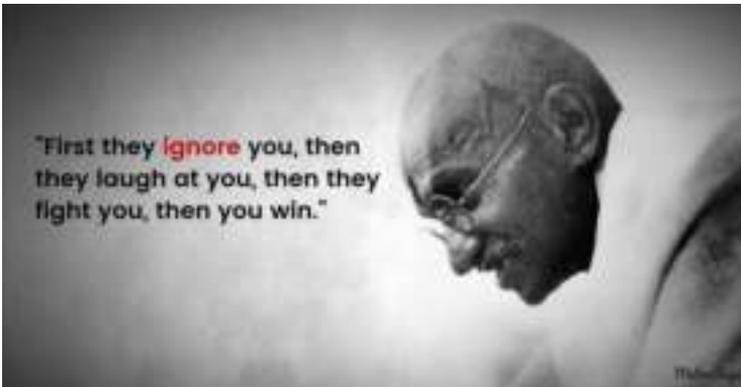
Mahatma Gandhi “...non-violence is the first article of my faith”

Mahatma Gandhi memiliki nama panjang Mohandas Karamchand Gandhi. Dalam kosakata Sansekerta, nama tersebut mengandung makna Jiwa yang Agung. Ia dilahirkan pada tanggal 2 oktober 1869 di India, tepatnya di negara bagian Gujarat. Ayahnya bernama Karamchad Gandhi, yang dikenal sebagai Kepala Menteri di provinsi Porbandar, yakni ibukota kerajaan kecil yang terletak di wilayah India Barat. Sementara Ibunya bernama Putlibai, seorang ibu rumah tangga dan penganut Hindu yang taat. Dari ibunya inilah Gandhi banyak belajar tentang gaya hidup vegetarianisme, toleransi beragama, kesederhanaan hidup hingga penolakan terhadap bentuk-bentuk kekerasan.

Gandhi sangat beruntung karena pernah mengenyam pendidikan tinggi yang berkualitas. Ia diterima sebagai mahasiswa Ilmu Hukum di University of London. Di sana ia belajar banyak tentang hukum dan yurisprudensi, karena bercita-cita untuk menjadi

pengacara. Selepas menempuh pendidikan hukum, ia kemudian kembali ke negaranya dan menjadi pengacara. Karir Gandhi sebagai pengacara awalnya tidaklah berjalan mulus. Ketika menangani kasus pertamanya, Gandhi justru mengalami kekalahan hingga dirinya dibuang dari kantornya sendiri oleh seorang pejabat Inggris. Gandhi akhirnya memutuskan untuk pergi ke Afrika Selatan untuk membantu sepupunya yang bernama Abdullah yang terjerat kasus hukum. Setelah menghabiskan 21 tahun sebagai Lawyer terkenal di Afrika Selatan, Gandhi ternyata menemukan ketertarikan lain yakni tentang pemikiran dan etika politik.

Dala suatu perjalanan di Afrika Selatan, Gandhi pernah mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan dari petugas kereta api. Dirinya diusir dari gerbong kelas satu hanya karena warna kulitnya yang dianggap sebagai imigran India. Merasa mendapatkan perlakuan diskriminatif, Gandhi kemudian mendirikan Indian Congress di Natal, yang. Bertujuan untuk melawan segregasi dan mengembangkan pemikiran-pemikiran tentang ‘Pemurnian Diri’ dan “Satyagraha”, dengan mengencarkan aksi-aksi protes tanpa penggunaan kekerasan oleh warga sipil.



Gambar: salah satu kutipan Gandhi yang populer.

Sumber: metrosaga.com

Gandhi kemudian ditangkap dengan tuduhan telah mengorganisir pembangkangan sipil (*civil disobedience*) dengan mengajak orang-orang untuk melakukan mogok kerja dan mengadakan “*Long-March*” sebagai bentuk penentangan terhadap pengenaan pajak-pajak yang berlebihan kepada penduduk keturunan India. Gerakan ini ternyata menyulut perbincangan publik internasional, sehingga otoritas pemerintahan Inggris di Afrika Selatan terpaksa membebaskan Gandhi dan mencabut kebijakan pajak-pajak tersebut. Dari gerakan inilah Gandhi akhirnya mulai dikenal sebagai tokoh politik.

Perjalanan aktivitas politik Gandhi ternyata tidak berhenti sampai situ saja. Ia pulang kampung ke India dan mulai melakukan gerakan untuk memperjuangkan kemerdekaan India paska tragedi pembantaian di Kota Suci Sikh, Amritsar. Pihak Inggris saat itu melakukan penembakan terhadap demonstran yang melakukan unjuk rasa, hingga sedikitnya 400 orang tewas dan 1300 orang lainnya mengalami cedera. Ia mengkampanyekan agar penduduk India memutuskan segala bentuk kerjasama dengan penguasa Inggris, salah satunya yakni dengan melakukan pemboikotan produk-produk dari Inggris. Strategi ini ternyata menuai banyak simpati dari penduduk India dari semua agama dan golongan. Merasa terancam eksistensinya, Inggris kemudian memenjarakan Gandhi selama dua tahun dengan tuduhan melakukan penghasutan kepada rakyat. Sejak tahun 1870 di India, Inggris memberlakukan hukum terhadap segala bentuk aktivitas penghasutan sebagai upaya preventif menghadapi gerakan anti-kolonialisme dan anti-imperialisme. Namun Gandhi justru menuding undang-undang itu sengaja didesain untuk memberangus kebebasan warga negara, terlebih dari kalangan mahasiswa, intelektual, jurnalis dan aktivis sosial-politik. Selama dipenjara, Gandhi juag terus melakukan perlawanan dengan

menuliskan pemikiran-pemikirannya seraya menjalankan puasa sebagai bentuk protes terhadap penguasa.



Gambar: Gandhi sedang menulis & melakukan puasa sebagai bentuk protes kepada Inggris.

Sumber: bbc.com

Dalam gerakannya, Gandhi menekankan pada bentuk aksi protes nir-kekerasan. Aksi-aksi nir-kekerasan sebagai strategi gerakan inilah yang disebutnya dengan Ahimsa. Secara harfiah, Ahimsa berarti tidak menyakiti, melukai, menyiksa ataupun membunuh semua makhluk ciptaan Tuhan. Bahkan, Gandhi

tidak hanya mempraktikkan Ahimsa melalui tindakannya, tetapi juga ia tanamkan sejak dalam pikiran hingga perkataan. Ahimsa dipercaya sebagai anti-tesis dari konflik berbasis kekerasan. Tujuan Ahimsa tidaklah sekadar memenangkan perseteruan, tetapi juga berupaya mengubah orang-orang ataupun penguasa yang berperilaku jahat menjadi berperilaku baik.

Selain itu, Gandhi juga semakin gencar mempopulerkan “Satyagraha”. Istilah ini merupakan wujud gerakan perlawanan masyarakat sipil yang dikomandoi langsung oleh Gandhi. Dalam pemahaman lain, Satyagraha juga bisa dikatakan sebagai “Jalan Kebenaran”. Gerakan ini terbentuk mulanya sebagai upaya untuk menunjukkan protes terhadap monopoli yang dilakukan oleh pemerintah India. Menurut Gandhi, garam merupakan kebutuhan utama rumah tangga rakyat India, sehingga tidak seharusnya penguasa memonopoli urusan garam bagi warganya.

Gandhi menjadi sosok yang inspiratif karena keyakinan kuat dan konsistensinya terhadap gerakan anti-kekerasan yang diembannya, serta menggerakkan rakyat India untuk melakukan penangkangan sipil (*civil disobedience*). Baginya, perlawanan terhadap kekuasaan negara kolonial (pendudukan Inggris) tidak akan bisa dimenangkan dengan aksi kekerasan dalam bentuk apapun. Metode inilah yang disebutnya sebagai “*Purely Spiritual Weapon*/Senjata Agama Murni”. Gandhi meyakini bahwa cinta-kasih merupakan satu-satunya prinsip sejati dalam hubungan antar manusia. Mencintai dan mengasih berarti memberikan penghormatan dan kepedulian tanpa pamrih terhadap orang lain. Konsep inilah yang dipopulerkan Gandhi sebagai “Menyeka setiap tetesan tangis dari setiap mata/*Wiping away every tear from every eye*”.



Gambar: Alur pemikiran ajaran Gandhi.

Sumber: 2013. The Politics Book. Dorling Kindersley, London

Kemampuan Gandhi dalam menghimpun dukungan publik melalui jalan damai telah memberikan tekanan kuat kepada pihak Inggris untuk perlahan-lahan membuka diri guna melakukan perundingan demi perundingan. Akhirnya di tahun 1947, Gandhi menjadi saksi bagaimana negara yang sangat dicintainya memperoleh kemerdekaan. Terdapat satu cita-cita Gandhi yang belum sempat terwujudkan, yakni menyaksikan umat Hindu dan Muslim benar-

benar hidup bersama dan penuh kedamaian dalam satu negara India. Ia ingin agar India menjadi negara yang tidak terpecah-belah oleh agama, kelas dan kasta. Namun cita-cita tersebut pupus tatkala negaranya dipecah menjadi Negara India dan Negara Pakistan. Pemisahan dua negara tersebut ternyata tetap menimbulkan kekerasan antar umat Muslim dan Hindu. Gandhi kemudian mulai melakukan puasa untuk melindungi hak-hak kaum muslim yang memilih untuk tetap menjadi warga negara India. Namun sayang, belum genap setahun kemerdekaan India, Gandhi menjadi korban penembakan oleh seorang laki-laki penganut Hindu radikal dalam suatu perjalanannya menghadiri acara doa bersama. Penembak tersebut merasa kecewa karena sikap Gandhi yang bersahabat dengan umat muslim dan negara Pakistan.

2. **Image: Positive Image of Social Movement (Citra Positif Gerakan Sosial)**

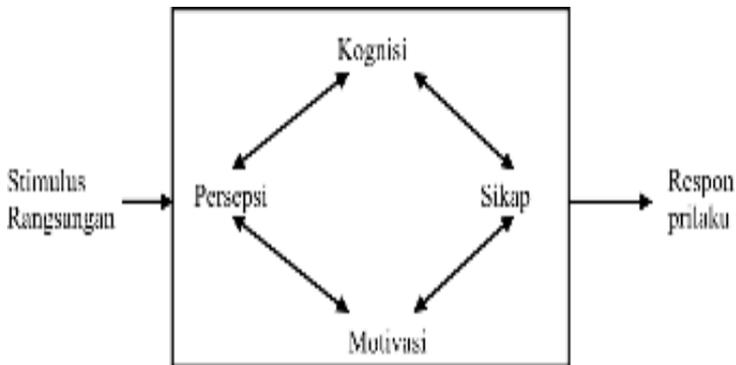
Aspek berikutnya yang mempengaruhi keberhasilan sebuah gerakan terdapat pada citra yang dibentuk oleh gerakan tersebut. Secara sederhana, citra adalah persepsi akan sesuatu yang ada dibenak seseorang kendatipun tidak sepenuhnya sesuai dengan realitas yang terjadi (Lippman, 1997). Bagi Kotler (1994), citra merupakan sejumlah kesan-kesan, gambaran-gambaran serta keyakinan-keyakinan yang dimiliki oleh seseorang terhadap suatu objek, dimana objek tersebut dapat berupa individu, kelompok ataupun organisasi tertentu. Citra dalam konteks kajian pada buku ini dapat dipahami sebagai impresi (kesan), perasaan dan gambaran yang ditangkap oleh publik sebagai upaya yang dengan sadar dibentuk oleh sebuah gerakan. Selanjutnya, (Soemirat & Elvinaro, 2005) menguraikan beberapa faktor yang saling berkaitan satu sama lain dalam proses pencitraan, yakni:

- a. Kognisi, merupakan sebuah keyakinan dari individu terhadap adanya stimulus (rangsangan), yang dapat muncul

ketika individu mampu memahami informasi-informasi yang memadai terhadap suatu objek.

- b. Persepsi, yakni hasil pengamatan individu terhadap suatu objek yang berada dalam wilayah cakupan perhatiannya, sehingga akan membentuk sebuah proses pemaknaan terhadap objek tersebut.
- c. Motif, adalah kondisi/keadaan yang mendorong individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu demi tercapainya sebuah tujuan.
- d. Sikap, yaitu kecenderungan dari individu untuk berpikir, berpersepsi, bertindak serta mampu merasa sebagai respon dari suatu objek, situasi ataupun nilai tertentu. Singkatnya, sikap tidak sama dengan perilaku, melainkan berupa kecenderungan-kecenderungan untuk berperilaku menggunakan cara-cara tertentu.

Dalam proses pembentukan citra (pencitraan), menurut John S. Nimpoeno (dalam Soemirat & Elvinaro, 2005) keempat faktor tadi saling berkelindan erat yang menghubungkan antara input dan output.



Gambar: Model Pembentukan Citra menurut John S. Nimpoeno

Sumber: (Soemirat & Elvinaro, 2005)

Perlawanan Warga Pesisir

Mengutip dari Anwar Arifin (2003), pencitraan dapat dibagi ke dalam 4 (empat) tahapan :

1. Fase Representasi, yaitu dimana citra adalah cerminan dari sebuah realitas
2. Fase Ideologi , yaitu citra mampu memberikan suatu gambaran ataupun mampu menyembunyikan sesuatu yang berbeda dari realitas
3. Fase Penyembunyian (*Concealment*), yaitu ketika citra benar-benar dapat menyembunyikan sebuah realitas dengan menampilkan gambaran yang sama-sekali berbeda dengan realitas.
4. Fase Independensi, yakni suatu citra yang tidak memiliki relasi apapun terhadap sebuah realitas.

Dalam praktik pencitraan, para aktor-aktor gerakan seharusnya tidak hanya mampu memahami faktor-faktor pembentuknya. Akan tetapi mereka juga perlu mengetahui bahwa citra yang terdapat dalam setiap gerakan memiliki jenis-jenis tersendiri, yang bisa jadi berbeda dengan jenis citra yang dimiliki oleh gerakan-gerakan sosial lainnya. Terkait dari diferensiasi jenis-jenis citra, kita dapat meminjam eksplanasi yang diuraikan oleh Frank Jefekins (1998), yakni:

- a. *Mirror Image (Citra Bayangan)*, merupakan citra yang terdapat pada anggota-anggota organisasi (dalam konteks ini adalah gerakan). Dalam kata lain, citra bayangan ini disebut juga sebagai citra internal yang dimiliki oleh individu-individu yang terdapat dalam suatu gerakan terkait persepsi/pandangan pihak luar terhadap gerakan mereka. Melalui citra inilah, pihak-pihak luar (*the outsiders*) akan merespon dengan memberikan penilaian terhadap gerakan yang dilakukan. Dalam banyak kasus citra bayangan ini juga

banyak disebut sebagai ilusi, yang disebabkan karena kekeliruan dalam melakukan proses penilaian akibat minimnya informasi, pemahaman ataupun pengetahuan yang dikuasai oleh individu-individu dalam gerakan tentang pandangan/persepsi sebenarnya dari pihak luar.

- b. *Current Image* (Citra yang sedang terjadi/berlaku), disebut juga sebagai citra kekinian yang merupakan bentuk pandangan yang melekat pada *the outsiders* tentang sebuah gerakan. Menariknya, seperti halnya dengan jenis citra bayangan, citra yang sedang berlaku ini memiliki sifat tentatif. Artinya citra jenis ini tidak berlaku untuk selamanya, karena sangat bergantung dari besar kecilnya arus informasi yang dimiliki oleh orang-orang yang mempercayainya.
- c. *Wish Image* (Citra yang Diharapkan), atau yang lebih sederhana disebut sebagai citra harapan merupakan sebuah citra yang diharapkan oleh pihak-pihak yang melakukan pencitraan. Sudah menjadi sifatnya, citra jenis ini juga bukan berarti memiliki kesamaan dengan citra yang sebenarnya. Dalam suatu gerakan, aktor-aktor gerakan sebagai pihak-pihak yang melakukan pencitraan tentu mengharapkan terbentuknya citra yang lebih baik atau lebih positif daripada citra yang sebenarnya terjadi. Namun yang perlu diperhatikan oleh pemimpin gerakan adalah citra yang terlalu positif/sempurna atau istilahnya disebut “*to good to be true*” juga sebenarnya perlu dihindari karena justru akan membentuk kecurigaan terhadap adanya manipulasi yang berlebihan terhadap citra yang diinginkan, hingga akhirnya sebuah gerakan tersebut malah memiliki citra yang negatif.
- d. *Institutional Image* (Citra Kelembagaan), merupakan citra yang dimiliki secara komprehensif oleh suatu organisasi, yang tidak hanya terbatas pada citra terhadap produk, layanan

atau aksi-aksi dari suatu organisasi saja. Dalam gerakan, para aktor perlu melakukan tindakan-tindakan untuk menunjukkan bahwa gerakan yang dibawanya memiliki reputasi, komitmen, serta pencapaian-pencapaian yang telah didapatkan yang memiliki nilai positif sejak proses embrio pembentuknya. Jangan sampai dalam proses pembentukan gerakan, para aktor melakukan tindakan-tindakan yang berpotensi akan merugikan perkembangan gerakan yang telah dibangun.

- e. *Multiple Image* (Citra Majemuk), merupakan citra yang bersifat makro (umum) yang terbentuk sebagai akumulasi dari citra-citra mikro dari individu-individu di dalamnya. Sebuah gerakan seringkali memiliki aktor-aktor yang memiliki perilaku yang dan latar belakang berbeda-beda, yang dengan sendirinya akan membentuk citra dari masing-masing aktor. Citra dari masing-masing aktor inilah yang secara disengaja ataupun tidak yang kemudian akan membentuk citra holistik gerakan.

Dari pemaparan tentang urgensi citra dalam gerakan, dapat disimpulkan bahwa apabila para aktor-aktor/pemimpin gerakan mampu membangun citra yang baik melalui aksi-aksi yang dilakukannya dalam gerakan, maka gerakan tersebut akan mendapatkan respek (penghormatan dan penghargaan) dari kelompok massa ataupun kelompok elit. Citra yang positif dari gerakan dapat memberikan peluang yang besar dalam mendapatkan kepercayaan (*trust*) dan dukungan publik. Oleh sebab itu, citra yang positif yang dimiliki oleh suatu gerakan akan mempermudah gerakan tersebut untuk mencapai tujuannya.

3. *Socially Accepted Tactics* (Taktik yang diterima dalam suatu masyarakat)

Saat memperjuangkan tujuan-tujuan gerakan, para pemimpin gerakan tentunya telah menyiapkan sejumlah taktik-taktik dan kemudian akan mereka pilih. Bentuk taktik ini beragam, tergantung dari kreatifitas para pemimpin gerakan dan kondisi/ lingkungan sosial-politik yang melatarinya. Taktik yang dipilih haruslah efektif dalam memperjuangkan tujuan dari gerakan. Menariknya, kita bisa mengamati variasi perbedaan taktik yang dipilih oleh pemimpin gerakan berdasarkan waktu dan lingkungan sosial politik yang melatarinya. Artinya pemilihan taktik yang digunakan oleh suatu gerakan dalam waktu, tempat dan kondisi tertentu belum tentu efektif untuk digunakan dalam *setting* yang berbeda. Para pemimpin gerakan perlu menyadari bahwa tidak ada taktik universal yang dapat efektif dilakukan oleh setiap gerakan. Sebagai contoh, taktik gerakan nir-kekerasan dan kedamaian yang dilakukan oleh Gandhi di India abad ke-20 belum tentu berhasil jika dilakukan di Inggris di abadke-19. Uniknya, taktik yang efektif kala itu di Inggris justru dilakukan dengan taktik berbasis aksi-aksi radikal, sebagaimana yang dilakukan oleh Emmiline Pankhrust dalam memimpin gerakan pengakuan hak politik perempuan di daratan Inggris. Walaupun berbasis pada penggunaan aksi-aksi kekerasan seperti memecahkan kaca jendela ataupun melakukan pengrusakan properti lawan-lawan politiknya, namun di masa itu taktik yang dijalankan oleh Emmeline dan para pengikutnya dapat diterima oleh publik di Inggris. Publik menganggap apa yang dilakukan Emmeline memang perlu untuk dilakukan karena resistensi dari kelompok penguasa untuk membuka diri terhadap penindasan terhadap kaum perempuan.

Emmeline Pankhurst “...either women are to be killed, or women are to have the vote”.

Emmeline Pankhurst merupakan aktivis politik dan pemimpin gerakan hak pilih kaum perempuan di Inggris Raya. Pankhurst menjadi populer karena taktik-taktik radikal & militan yang dilakukannya demi mendapatkan pengakuan atas hak pilih dan kesetaraan perempuan di daratan Inggris.



Gambar: Emmiline Pankhurst

Sumber: kumparan.com

Sebagai perempuan yang berlatar belakang dari keluarga kelas menengah, Emmiline Pankhurst memiliki pendidikan yang baik. Sebelum melanjutkan studinya di Paris pada Ecole Normale Superiure, Emmeline terlebih dahulu menyelesaikan pendidikannya di Manchester pada usia 15 tahun. Ayahnya dikenal sebagai pengusaha yang berhaluan politik radikal dengan menentang perbudakan dan *Corn Laws*. Ibunya, merupakan

seorang feminis yang aktif memperjuangkan hak-hak politik perempuan.

Ketertarikannya dalam perihal aktivisme perempuan semakin menguat ketika menikah dengan Richard M. Pankhurst yang merupakan pengacara yang terlibat dalam rancangan amandemen dengan tajuk *Municipal Franchise Act 1869*. Amandemen ini memberikan ruang kepada perempuan yang menjadi kepala rumah tangga karena tidak menikah untuk idapat memberikan hak pilih dalam pemilu lokal di Inggris. Selain itu, Richard M. Pankhurst diketahui juga menulis undang-undang *Married Women's Property Act* di tahun 1870 hingga 1882.

Emmiline Pankhurst mampu menjadi tokoh penting dalam pergerakan emansipasi perempuan karena kemampuannya memainkan aksi-aksi protes dari yang bersifat konvensional hingga radikal, seperti demonstrasi publik, mogok makan, hingga tindak kekerasan di penjara untuk mendorong rekognisi hak politik bagi kaum perempuan. Emmiline Pankhurst kerap mendekam di “Hotel Prodeo” karena tindakannya yang vokal. Di dalam penjara, bersama rekan-rekan perempuan seperjuangannya Emmiline melakukan aksi mogok makan, walaupun secara paksa disuapi oleh petugas penjara. Para aktivis tersebut menyebut praktik pemaksaan makan ini sebagai penyiksaan. Beberapa orang yang ikut aksi mogok makan mengalami nasib tragis hingga tewas.

Di tahun 1859, Emmeline terlibat dalam aktivitas pekerja sosial *Poor Law*, dimana salah satu tugasnya yakni mengunjungi ke penjara-penjara. Keberpihakannya kepada nasib perempuan semakin tergugah manakala ia menyaksikan kondisi para tahanan perempuan yang cukup memprihatinkan. Ia semakin meyakini, untuk mengatasi persoalan tersebut termasuk masalah-

masalah sosial lainnya yang melibatkan perempuan, pemberian hak politik kepada kaum perempuan adalah harga mati. Di periode awal pergerakannya, Emmiline memilih melakukan aksi damai dengan menginfiltrasi arena-arena pertemuan politik. Aksi ini mendapat simpati dari para perempuan bangsawan dan perempuan terpelajar. Gerakan ini semakin menguat saat kedua anggota gerakan yakni Christabel Pankhurst dan Annie Kenney mendapatkan aksi pengusiran dari sebuah acara kampanye pemilu oleh aparat keamanan setelah mereka menuntut hak untuk memilih. Tidak hanya itu, keduanya juga diseret ke rumah tahanan karena menolak membayar denda akibat tuduhan penyerangan dengan cara meludahi seorang polisi dalam kampanye tersebut. Kasus tersebut ternyata menyedot perhatian publik, sehingga secara perlahan tapi pasti gerakan tersebut mulai menggetas di Inggris.

Di tahun 1903, Emmiline mendirikan Persatuan Sosial dan Politik Perempuan/*Women Social and Political Union* (WSPU). Moto gerakan WSPU adalah “Perbuatan bukan kata-kata”. Slogan tersebut diambil dari kata-kata yang diucapkannya pada sebuah pidato yang secara tajam mengupas urgensi hak pilih perempuan dalam bidang politik. Mulanya aksi ini menggunakan pendekatan nir-kekerasan, optimalisasi pidato-pidato politik, penggalangan tanda-tangan, menerbitkan buletin “*Votes for Women*”, hingga pengorganisasian unjuk rasa. Emmiline juga membentuk kekuatan ekstra-parlementer yang diberi nama “Parlemen Wanita” yang bertujuan menjadi kekuatan oposan-informal dan pembanding dari setiap agenda-agenda sidang parlemen Inggris. Untuk pertama kalinya, Emmiline ditangkap oleh kepolisian di tahun 1908 setelah berupaya memasuki parlemen untuk menyampaikan kritik dan protes terhadap perdana menteri. Emmiline dipenjara selama lebih kurang 6 minggu. Di sanalah

ia banyak memahami tentang kondisi para tahanan wanita yang sangat menyedihkan. Akhirnya ia memutuskan untuk menjadikan penjara sebagai sarana untuk melancarkan aksi-aksi protesnya. Walaupun terlihat sekilas seperti aksi bunuh-diri, namun Emmiline secara sadar berupaya merancang berbagai tindakan politik dengan tujuan agar dirinya kembali dipenjara berulang-ulang. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan kepada masyarakat dunia bahwa ia ditangkap bukan karena melakukan tindakan kejahatan, melainkan berupaya menjadi legislator untuk memperjuangkan hak pilih perempuan.



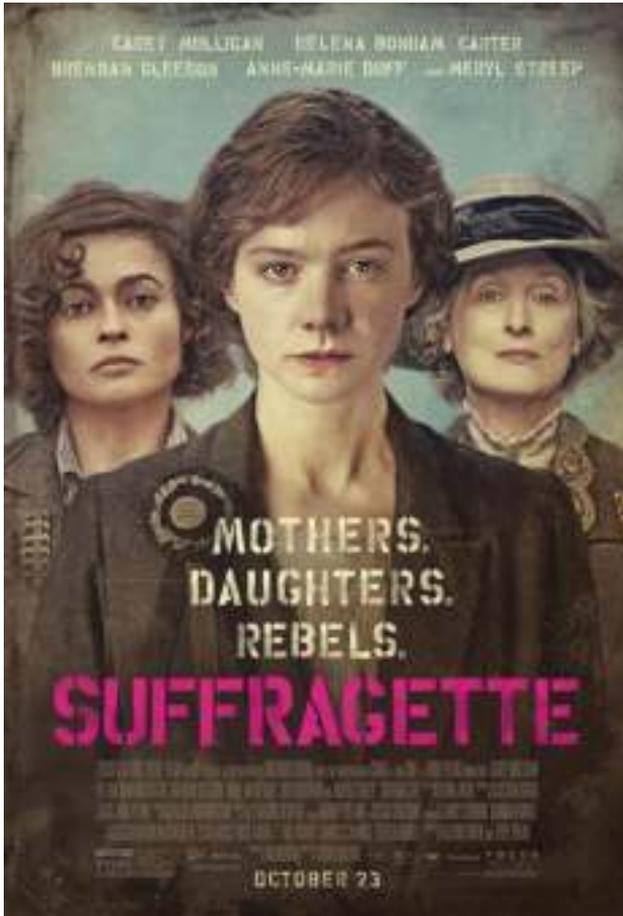
Gambar: Emmiline yang diamankan oleh petugas kepolisian Inggris.
Sumber: wearethecity.com

Dalam memperjuangkan hak politik perempuan, Emmiline tercatat tiga kali dijebloskan ke penjara pada periode 1908-1909. Setahun setelahnya ia dan tiga ratus anggota WSPU merangsek masuk ke parlemen untuk bertemu dengan Perdana Menteri

Herbert Asquith untuk memprotes atas penghentian Rancangan Undang-Undang Konsiliasi yang mengakomodir hak pilih perempuan. Meskipun dijaga oleh polisi, mereka memaksa menerobos masuk ke gedung parlemen. Akibat hal tersebut, lebih dari 100 perempuan yang menjadi peserta aksi turut ditahan dengan tuduhan melakukan penyerangan serta mengganggu ketertiban umum. Gerakan perempuan ini tidak hanya diam, mereka membalas tuduhan tersebut dengan menyatakan bahwa polisi telah bertindak brutal dalam menghadapi para protes. Peristiwa ini telah tercatat dalam sejarah gerakan-gerakan di dunia dengan julukan *Black Friday*.

Paska aksi bersejarah tersebut, mulai tahun 1912 Emmiline beserta pengikut gerakan semakin bergairah menggunakan aksi kekerasan dalam kampanye-kampanye yang mereka lakukan. Memecahkan kaca jendela, mengikat diri ke pagar hingga melakukan penyerangan kepada politisi telah mereka lakukan dengan keyakinan untuk memberikan tekanan dan teror kepada politisi untuk segera mengakomodir tuntutan-tuntutan gerakan perempuan. Bagi mereka, pelanggaran terhadap hukum sebagai taktik untuk menarik perhatian adalah cara yang efektif dan rasional untuk dilakukan oleh perempuan disaat kondisi seks perempuan sangat direndahkan. Di tahun 1912 inilah, Emmiline tercatat tidak kurang dari 12 kali masuk penjara. Di dalam sel, ia terus melakukan mogok makan untuk mendapatkan hak memulihkan diri di luar penjara. Sebab berdasarkan Undang-Undang Narapidana di Inggris yang berlaku pada saat itu membolehkan tahanan untuk dibebaskan agar dapat memulihkan diri dan kemudian kembali dimasukkan ke dalam sel hingga hukumannya berakhir. Inilah yang populer kala itu disebut sebagai “Undang-Undang Kucing dan Tikus”. Pada

tahun 1913, gerakan Emmiline bersama WSPU semakin radikal. Mereka semakin nekat melakukan aksi-aksi kekerasan seperti merusak tempat-tempat penting seperti Katedral Westminster Abbey serta rumah dan properti lawan-lawan politik.



Gambar: Film Suffragette yang mengisahkan perjuangan Emmiline

Sumber: IMDb.com

Saat meletusnya Perang Dunia I, Emmeline dan pengikutnya mulai merubah taktik kampanye mereka. WSPU mereformasi organisasi mereka dan kemudian mengganti namanya dengan Partai Perempuan di tahun 1917. Saat para laki-laki bertugas di medan perang, Emmiline memobilisasi kaum perempuan untuk berperan besar menjadi tenaga kerja yang dapat diandalkan seperti di pabrik-pabrik serta di sektor publik lainnya. Hal ini semakin membuka mata para pemegang otoritas untuk memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan, khususnya di bidang politik. Akhirnya, perjuangan Emmiline membuahkan hasil saat perempuan di atas umur 21 tahun diberikan hak oleh undang-undang untuk memberikan suara pada pemilu di Inggris sejak 2 Juli 1928.

4. *Socially Acceptable Goals* (Tujuan yang dapat diterima publik)

Mayoritas keberhasilan gerakan-gerakan sosial dapat berhasil mencapai tujuannya sepanjang *the outsiders* (pihak luar) dapat menerima bahwa motif gerakan benar-benar dalam koridor memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan semata dijadikan panggung untuk mendapatkan kepentingan para pemimpin gerakan saja. Tujuan gerakan juga diukur dari sejauh mana pemikiran, narasi dan argumentasi yang diajukan oleh gerakan dapat diterima oleh publik. Bahkan gagasan yang dibangun oleh gerakan tersebut haruslah mampu melewati tahap uji dari para pakar dan pengamat gerakan (*bystanders*), bahwa masyarakat luas akan diuntungkan jika tujuan gerakan tersebut dapat tercapai. Gerakan yang dilakukan oleh Gandhi dan Emmiline seperti yang telah diuraikan di atas, mampu menunjukkan eksistensinya di tengah publik bahwa apa yang mereka lakukan bukan sekadar bisa mengucapkan “membuat kehidupan masyarakat lebih baik” atau sekadar mengatakan

“meningkatkan kehidupan masyarakat” saja.

Dari contoh gerakan yang digagas Gandhi dan Emmiline dukungan publik secara luas tidak akan dapat dibentuk hanya dengan mengandalkan rasionalitas semata. Mereka juga menyelipkan urgensi dan kegelisahan yang bisa dirasakan oleh publik, bahwa apa yang terjadi saat itu bukanlah kondisi ideal yang bisa dibiarkan berlarut-larut. Oleh sebab itu mereka bersikukuh untuk melakukan upaya perubahan dengan menggalang kekuatan sosial, yang kemudian dikonversikan menjadi kekuatan politik. Gandhi dan Emmiline juga memberikan pembelajaran kepada para pemimpin gerakan setelahnya bahwa dalam setiap gerakan perlu diselipkan ideologi yang akan menjadi ruh dari sebuah gerakan. Secara terminologis, Ideologi terdiri dari kata “ideo” dan “logi”, dimana kata “ideo” berakar dari bahasa Yunani yakni “eidos”, yang dalam bahasa latin disebut dengan “idea” yang bermakna “ide, gagasan” atau “pemikiran”. Sementara itu, kata “logi” juga berasal dari bahasa Yunani yakni “logos” yang berarti “pengetahuan” atau “ilmu”. Sehingga ideologi dapat dipahami sebagai ilmu pengetahuan tentang ide-ide manusia. Tanpa adanya ideologi yang diemban, akan sangat sulit bagi gerakan untuk mendapatkan dukungan publik secara massif. Dalam menjalankan gerakannya Gandhi secara konsisten menunjukkan jalur ideologinya yakni “Ahimsa” yang selaras dengan Humanisme. Begitu pula dengan Emmeline, yang secara gigih mendorong ideologi Feminisme sebagai basis gerakan mereka untuk menentang dominasi kultur patriarki dalam persoalan politik. Oleh sebab itu, para pemimpin gerakan sosial juga sebaiknya mampu mengembangkan ideologi yang digunakan untuk membentuk kerangka “*Framing*” agar pemaknaan terhadap gerakan dapat lebih mudah dan jelas dipahami oleh publik.

5. *Financial and Political Support (Dukungan Politik dan Finansial)*

Salah satu faktor dari kemampuan gerakan sosial yang mampu mencapai keberhasilan terletak dari bagaimana mereka mampu mendapatkan dukungan keuangan dari berbagai pihak. Tidak bisa dinafikan, sumberdaya keuangan merupakan unsur krusial yang mempengaruhi daya tahan sebuah gerakan. Dengan memiliki sumberdaya finansial yang kuat, sebuah gerakan dapat memenuhi berbagai kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan, seperti logistik gerakan hingga perangkat-perangkat yang dibutuhkan untuk menjalankan aksi-aksi gerakan. Sumberdaya finansial dapat diperoleh melalui berbagai jaringan kelompok, organisasi dan institusi yang menjadi pendukung gerakan tersebut. Demikian juga halnya dukungan politik terhadap gerakan. Keberhasilan gerakan-gerakan sosial akan sangat dipengaruhi oleh dukungan para pemegang kekuasaan, baik yang bersifat individu ataupun kelompok dan organisasi. Dukungan politik ini akan bertransformasi menjadi kekuatan aliansi yang potensial bagi gerakan untuk memperjuangkan tujuan-tujuannya. Oleh sebab itu, sangat diperlukan para aktor gerakan yang piawai untuk mengidentifikasi siapa saja yang menjadi lawan gerakan serta pihak-pihak mana saja yang menjadi pendukung politik dan finansial bagi keberlangsungan aktifitas gerakan. Para aktor gerakan perlu untuk memposisikan gerakan mereka agar pihak-pihak yang potensial untuk dijadikan aliansi dapat memahami arah langkah perjuangan sebuah gerakan. Sehingga akan lebih mudah bagi gerakan untuk mendapatkan dukungan finansial maupun dukungan politik yang sangat berguna untuk memperkuat peluang keberhasilan sebuah gerakan.

BAB VI

SETTING SEJARAH, SOSIAL, POLITIK & EKONOMI TABANIO

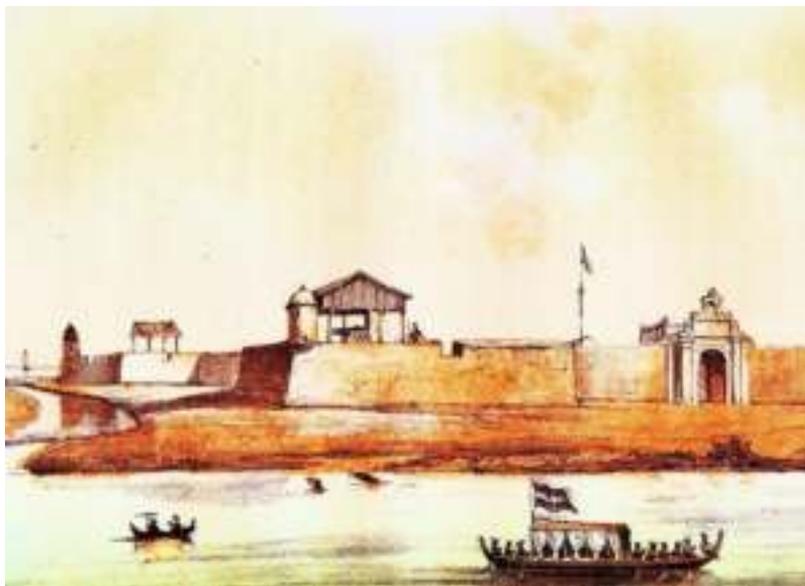
*Jika Anda bergetar dengan geram setiap melihat ketidakadilan,
maka Anda adalah kawan saya. Maju terus menuju kemenangan!
(Che Guevara)*

Sejarah mencatat bahwa kampung Tabanio sudah eksis sejak abad ke-17, sebagai wilayah strategis dan menguntungkan bagi aktifitas perdagangan karena berada di tepi Laut Jawa dan Selat Makassar yang menjadi bagian jalur perdagangan rempah nusantara (Wicaksono, 2010). Berbagai sumber catatan Hindia Belanda menyebutkan, terdapat beberapa ejaan penulisan nama wilayah Tabanio, seperti Tabenieuw, Taboenieuw, Tabanieuw maupun Tomborneo (Mansyur, 2021).

Tabanio sejak lama menjadi tempat persinggahan kapal-kapal dagang dari luar pulau Kalimantan. Dari beberapa wilayah Kesultanan Banjar yang berhasil menjadi area berpotensi ekonomi tinggi, Tabanio termasuk menjadi primadona karena dikenal sebagai daerah penghasil lada dan komoditas perikanan yang melimpah (Saleh, 1970). Pada tahun 1664, East India Company (EIC)-Inggris berusaha mengadakan hubungan dagang dengan Sultan Banjar keempat, Sultan Mustainbillah (1650-1678) dan mendapat izin untuk berdagang di area Tabanio

Perlawanan Warga Pesisir

(Sulandjari, 1991). Wilayah Tabanio, yang terletak di tepi pantai berfungsi sebagai pintu gerbang pedagang luar yang ingin berdagang ke Banjarmasin. Keberadaan Tabanio pada kurun waktu tersebut, sebagai wilayah terbuka yang mudah diakses menjadikan area ini markas bajak laut (Wicaksono, 2010). Dengan masuknya orang Bugis, bajak laut pun meningkat di Tabanio. Selain kepentingan perdagangan lada, keberadaan kelompok bajak laut di Tabanio juga karena kepentingan kelompok yang terkait dengan konflik di Kesultanan Banjar. Wilayah Tabanio juga menjadi wilayah pelarian sekaligus basis penyerangan serta pertahanan dalam pertikaian pewaris tahta di Kesultanan Banjar pada Abad-18 (Fong, 2013). Pada periode berikutnya, tanggal 6 Juli 1779 VOC membuat perjanjian dengan Sultan Banjar mengenai monopoli perdagangan. Dimana pada perjanjian tersebut juga mengatur tentang pembangunan Benteng Pertahanan VOC di Tabanio (ANRI, 1965).



Gambar: Lukisan Benteng Tabanio

Sumber: Kompasiana.com

Pada masa perang Banjar tahun 1859, sekelompok pejuang di bawah Kiai Demang Lehman, Kiai Langlang (Kiai Langlang) dan Hadji Boeijasin (Haji Buyasin) menduduki benteng di Tabanio dan menghabisi pemegang pos di benteng tersebut, dimana pasukan yang menyerbu benteng Tabanio ini menewaskan pejabat Gezaghebber Maurits dengan anak buahnya (Mansyur, 2012). Pada era Revolusi Fisik 1945-1949 keberadaan kampung Tabanio berperan penting mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, dimana kepala kampung Tabanio memberikan bantuan yang diperlukan pejuang ekspedisi Tentara ALRI Divisi IV A Pertahanan Kalimantan (Mansyur, 2012). Bahkan pasca kemerdekaan Indonesia, wilayah utara Tabanio (yang sekarang menjadi wilayah Hilir Kampung Tabanio) merupakan basis gerombolan pemberontak DI-TII di bawah komando Ibnu Hajar (Mansyur, 2012).

Rekam jejak sejarah masa lalu kampung Tabanio sebagai arena perlawanan dan pergolakan kekuasaan ini tidak hanya membuat konstelasi politik desa yang selalu dinamis, namun juga ditengarai turut membentuk habituasi masyarakat Tabanio yang berkarakter keras dan tidak kenal takut. Sehingga aksi-aksi mengamuk merupakan bentuk ekspresi yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan mereka hingga saat ini. Hal ini cukup beralasan, mengingat Desa Tabanio memiliki catatan panjang dalam melakukan aksi amuk, setidaknya dalam dua dekade terakhir. Misalnya aksi amuk warga melakukan pengrusakan kantor Dinas Perikanan Kabupaten Tanah Laut dan Stadion 17 Mei di Banjarmasin, tempat mereka melakukan aksi demonstrasi dalam kasus penolakan penggunaan pukat harimau oleh kapal-kapal nelayan PT. Sumatera Timur Indonesia (STI).

Aksi amuk warga berikutnya terjadi pada 2010, saat kasus pengambil-alihan lahan pertanian warga di wilayah Desa Tabanio oleh PT. Kintap Jaya Watindo (KJW), yang menyebabkan pengrusakan

Perlawanan Warga Pesisir

rumah kepala desa & sekretaris desa (beberapa motor rental milik sekretaris desa turut diseret massa ke laut kemudian dibakar), termasuk beberapa rumah warga lainnya yang dianggap terlibat dalam penjualan lahan sepihak kepada PT. KJW, hingga penggulingan dan pengrusakan 4 mobil kepolisian yang mencoba menghalau aksi tersebut.

Kasus berikutnya yakni pembakaran dan penenggelaman satu buah kapal nelayan dari pulau Jawa yang pengoperasiannya menggunakan cantrang di wilayah pantai Batakan, Tanah Laut. Mulanya para nelayan Tabanio resah karena selama 2 bulan mereka tidak mendapatkan hasil melaut. Nelayan Tabanio menganggap hal ini dikarenakan kapal nelayan dari Jawa yang memasuki wilayah pesisir Tanah Laut menggunakan cantrang dan menangkap cumi dengan menggunakan lampu senter, telah mempengaruhi pergerakan ikan tangkapan mereka. Walaupun penggunaan cantrang sudah dilarang pemerintah, Nelayan Jawa merasa berani untuk beroperasi karena telah di *back up* oleh para preman di wilayah Pantai Batakan. Kondisi ini membuat para nelayan Tabanio menjadi kesal dan marah, mereka lalu mendatangi kapal nelayan Jawa untuk meminta mereka menghentikan aktifitasnya karena telah merugikan mereka. Namun ternyata justru para preman Pantai Batakan yang menemui nelayan Tabanio dan mengatakan untuk tidak usah ikut campur dalam aktivitas para nelayan Jawa. Tindakan dari preman Batakan ini membuat para nelayan Tabanio marah, hingga mereka melakukan serangan yang menyebabkan terbakarnya 1 buah kapal nelayan Jawa di perairan Batakan.

Selanjutnya, aksi amuk warga juga terjadi saat menghancurkan gapura batas desa antara Tabanio dengan Desa Pagatan Besar, yang mereka anggap lokasi tersebut masih menjadi wilayah desa Tabanio. Akibatnya gapura batas desa yang dibangun oleh pihak desa Pagatan

Besar tersebut rubuh walaupun tidak sampai berumur 1 hari. Berikutnya yakni kebijakan pengelolaan pantai Tabanio yang tidak jelas dari pemerintah desa, membuat warga berbondong-bondong mendatangi kantor desa, namun potensi aksi anarkis ini berhasil dicegah oleh tokoh masyarakat.

Secara geografis, Desa Tabanio memiliki luas wilayah 2.545 hektar, dimana areal persawahan mencapai 815 hektar. Desa Tabanio berbatasan dengan Desa Sungai Bakau dan Desa Raden (Kecamatan Kurau) di sebelah utara, Desa Pagatan Besar (Kecamatan Takisung) di sebelah selatan, Desa Ujung Batu/Panjaratan (Kecamatan Pelaihari) di sebelah timur, serta Laut Jawa di sebelah barat. Jarak Desa Tabanio ke ibukota kecamatan Takisung (Desa Gunung Makmur) mencapai 17 kilometer, sementara jarak menuju ibukota kabupaten mencapai 40 kilometer dan jarak dari ibukota Provinsi Kalimantan Selatan mencapai 100 kilometer. Secara administratif Desa Tabanio memiliki 6 dusun yang tersebar di 22 RT, dengan jumlah penduduk mencapai 5.123 jiwa dengan 1361 kepala keluarga. Komposisi penduduknya mayoritas dari suku Banjar yang mencapai >85% dari total penduduk, sementara jumlah penduduk dari etnis Madura 14 orang (laki-laki) dan perempuan 13 orang, etnis Jawa 7 orang (laki-laki) dan perempuan 9 orang, serta dari etnis Bugis 76 orang (laki-laki) dan perempuan 86 orang.

Di Tabanio seluruh penduduknya beragama Islam, bahkan desa ini dikenal sebagai desa yang sangat religius. Saat ini di Desa Tabanio terdapat 8 surau (*langgar*) dan 1 mesjid, serta 1 bangunan bekas pesantren yang dijadikan Taman Pendidikan Al-Qur'an. Selain itu, masyarakat desa Tabanio sangat menghormati sosok Habaib (*habib*), dimana dalam berbagai kegiatan keagamaan seperti Tabligh Akbar, Haulan para alim-ulama, acara maulid dan peringatan Isra-Mi'raj, warga desa lebih senang mengundang habaib dari luar daerah untuk

memberikan ceramah/tausiah. Terlebih lagi, ada habaib yang telah lama tinggal di Desa Tabanio, bernama Habib Nunci. Habib Nunci yang telah berumur 73 tahun dikenal sebagai tokoh masyarakat yang memiliki jaringan luas kepada para ulama, pejabat pemerintah, pengusaha dan tokoh politik di Kalimantan Selatan. Selain itu, sebagai *Local Strongmen* Habib Nunci juga memiliki banyak anak-buah maupun loyalisnya yang juga sebagian berlatar belakang preman. Sehingga tidak heran jika Habib Nunci (baru saja meninggal, 100 hari) adalah tokoh yang paling berpengaruh dan disegani masyarakat Tabanio. Bahkan beberapa aksi gerakan perlawanan warga Desa Tabanio juga dikomandoi langsung oleh alm. Habib Nunci. Menariknya dari beberapa pengakuan warga yang ikut aksi, sesaat sebelum berangkat turun ke jalan Habib Nunci memberikan lada (*sahang*) kepada massa untuk dikonsumsi, dengan tujuan meningkatkan agresivitas masyarakat. Efek setelah mengkonsumsi lada ini membuat energi dan adrenalin massa memuncak karena suhu tubuh meningkat dan menjadi lebih panas. Selain itu, massa juga tersugesti bahwa lada yang diberikan oleh Habib Nunci membawa kekuatan spiritual dan daya magis yang membuat mereka tidak mengenal rasa takut serta sanggup melakukan hal-hal yang diluar kemampuan manusia normal.

Berdasarkan mata pencaharian penduduknya, Desa Tabanio merupakan basis nelayan dan petani. Dimana jumlah penduduk yang berprofesi petani mencapai 1513 orang dan nelayan mencapai 818 orang. Menariknya, di Desa Tabanio, sebagian besar keluarga nelayan juga sekaligus berprofesi petani. Walaupun di Desa Tabanio merupakan daerah pesisir dan menjadi basis ekonominya digerakkan oleh aktifitas nelayan, namun aktifitas bertani juga dianggap sebagai potensi ekonomi yang menjanjikan bagi warga desa. Sebagai nelayan yang sangat dipengaruhi oleh musim angin barat dan angin timur, membuat masyarakat mencari alternatif pendapatan di sektor pertanian. Oleh sebab itu, meskipun nelayan menjadi mata

pencarian utama masyarakat Tabanio, Sebagian besar nelayan juga memiliki sumber penghasilan lain dengan bekerja sebagai petani di waktu tidak melaut, ataupun membayar buruh tani untuk mengerjakan tanah-tanah pertanian mereka.

Para nelayan di desa ini tergolong nelayan skala besar yang disebut sebagai *Parenggean*, dengan tangkapan ikan-ikan besar seperti Tenggiri & Tongkol/Cakalang, yang telah diasinkan selama di laut. Sementara nelayan di Takisung disebut sebagai *Pengalongan* dengan tangkapan ikan-ikan kecil seperti peda, kakap, kepiting/rajungan dan cumi. Para nelayan Tabanio nelayan rata-rata membutuhkan waktu 14 hari dalam sekali melaut, sehingga mereka hanya berangkat melaut sekali dalam sebulan, dengan menggunakan perhitungan bulan arab (qamariyah). Berbeda dengan nelayan Desa Takisung yang setiap hari pergi melaut dengan kapal yang lebih kecil. Sehingga antara nelayan Batakan dan Takisung dapat dikatakan berada di klaster yang berbeda. Dimensi kapal nelayan Tabanio memiliki panjang 15 meter, dengan diameter lambung kapal mencapai 4 meter. Nilai harga 1 unit kapal beserta segala perlengkapan melautnya ini berkisar antara 800 juta sampai 1 miliar rupiah. Mesin kapal yang digunakan juga bervariasi, seperti mesin diesel 4 silinder dan 6 silinder, dengan kebutuhan sekali melaut mencapai 2.000 liter (2 drum) solar untuk mesin 4 silinder dan 3.000 liter (3 drum) solar untuk mesin berkapasitas 6 silinder. Sementara nelayan di Takisung memiliki kapasitas mesin diesel yang lebih kecil. Mengingat kebutuhan akan suplai solar yang tinggi serta perbekalan logistik selama melaut yang banyak, rata-rata dibutuhkan modal 12-15 juta rupiah per kapal dalam sekali keberangkatan, dimana modal tersebut disediakan oleh para pemilik kapal. Setiap kapal terdiri dari 5 orang anak buah kapal (*sawi*) yang mayoritasnya adalah penduduk desa Tabanio sendiri. Para nelayan di Tabanio juga memiliki jarak tempuh yang lebih jauh ketika mencari ikan, hingga mencapai Kepulauan Masalembu yang secara administratif termasuk

Perlawanan Warga Pesisir

dalam wilayah Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur.



Gambar: Kapal-kapal yang bersandar saat nelayan pulang melaut.

Para nelayan Tabanio mengenal dua musim laut, yang sangat menentukan hasil tangkapan mereka, yakni musim angin barat dan musim angin timur. Musim angin barat biasanya dimulai di bulan November hingga April. Sedangkan musim angin timur sejak Mei hingga Oktober. Untuk musim angin barat tangkapan nelayan biasanya lebih sedikit jika dibandingkan dengan musim angin timur. Sehingga musim angin timur bisa dikatakan musim panennya para nelayan Tenggiri di Tabanio. Jika beruntung, di musim angin timur, rata-rata sekali melaut mereka mampu membawa pulang hasil tangkapan mencapai 0,8-1,2 ton ikan Tenggiri dan Tongkol per kapal. Berdasarkan data yang diperoleh, dalam satu tahun nelayan Tabanio mampu menghasilkan tangkapan ikan Tongkol/Cakalang mencapai 1.530 ton/tahun, sedangkan ikan Tenggiri mencapai 1.033 ton/tahun, dimana harga 1 kilogram Ikan Tenggiri kering berkisar 85.000,- sampai 95.000,- rupiah.



Gambar: Hasil tangkapan ikan Tenggiri yang telah dijemur dan dikeringkan di atas kapal saat melaut, dan siap untuk ditimbang oleh bos -bos kapal.

Jumlah kapal penangkap ikannya pun sangat banyak, mencapai 170 buah kapal yang hampir semuanya dimiliki oleh warga Tabanio. Di Desa Tabanio juga terdapat beberapa bos kapal yang kepemilikannya bervariasi, antara 5 sampai 10 kapal, seperti Haji A'as, Haji Anang Maisuri, dan Haji Pulah. Dalam satu bulan, selama 2 minggu Desa akan menjadi lebih sepi karena para penduduk laki-lakinya yang berprofesi sebagai nelayan (*parenggean*) pergi melaut dengan jumlah hampir 900 orang.

Kebutuhan pasokan solar bersubsidi bagi nelayan Tabanio mencapai 110.000 liter per sekali periode keberangkatan, karena jumlah kapal yang ada di Tabanio mencapai 170 buah. Kebutuhan akan distribusi solar bersubsidi ini menjadi persoalan krusial yang

Perlawanan Warga Pesisir

sering dikeluhkan oleh para nelayan, keluarga nelayan dan para pemilik kapal. Sejak tahun 2015, hak distribusi solar bersubsidi khusus nelayan Tabanio dipegang oleh Ibu Nurul yang dikenal sebagai pengusaha sekaligus purnawirawan TNI. Ibu Nurul membangun pangkalan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) di Desa Tabanio. Walaupun harga resmi solar bersubsidi hanya 5.150 rupiah perliter, namun Ibu Nurul menjual kepada pemilik kapal & nelayan dengan harga 5.500 rupiah perliternya. Terdapat selisih harga 350 rupiah per liter yang *mark up* oleh Ibu Nurul. Para nelayan Tabanio sebenarnya masih bisa menerima harga sepihak yang telah ditetapkan oleh Ibu Nurul tersebut jika terdapat kesepakatan pembagian keuntungan kepada kas desa, kelompok keagamaan dan tempat ibadah secara jelas dan transparan. Namun Ibu Nurul menolak memenuhi aspirasi masyarakat desa, dan tetap menjalankan aturan yang dibuatnya sendiri secara sepihak. Selain itu keluhan lainnya yakni jumlah solar yang disuplai kepada pemilik kapal jumlahnya acap kali kurang dari jumlah nominal yang telah dibayarkan lebih dulu oleh pemilik kapal. Sehingga tuntutan akan normalisasi harga dan standarisasi takaran distribusi solar bersubsidi menjadi *concern* utama para nelayan untuk merapatkan barisan menentang kebijakan sepihak Ibu Nurul selaku pemilik SPBUN. Gerakan ini semakin menemukan momentumnya saat Habib Nunci meninggal dunia. Selama ini warga desa masih bertahan untuk tidak melakukan perlawanan karena Ibu Nurul mendapat perlindungan dari Habib Nunci untuk menjalankan bisnisnya tersebut di Tabanio. Bahkan alm. Habib Nunci disebut-sebut juga menerima *fee* dari keuntungan bisnis solar yang dijalankan Ibu Nurul, walaupun nominalnya belum diketahui sampai saat ini.

Perlawanan Warga Pesisir

Desa Takisung. Jika di Takisung lebih kondusif, konstelasi politik di Tabanio sangat dinamis dan bergairah. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. *Pertama*, Desa Tabanio memiliki afiliasi yang kuat kepada partai politik, yakni Partai Gerindra. Selama dua kali pemilu, Tabanio menjadi basis utama pemenangan Partai Gerindra di Kecamatan Takisung dan Kabupaten Tanah laut. Bahkan salah satu warga desa Tabanio yang bernama Khairil Anwar, selalu terpilih menjadi anggota DPRD Tanah Laut selama dua periode berturut-turut sejak tahun 2009 hingga sekarang.

Dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 lalu, pasangan Prabowo-Sandi yang diusung Gerindra juga berhasil memenangkan perolehan suara di Tabanio. Begitu pula dengan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, pasangan Denny Indrayana-Difriadi yang diusung oleh Gerindra juga berhasil meraih dukungan tertinggi di Desa Tabanio, walaupun akhirnya pasangan Sahbirin Noor-Muhidin terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan. Alasan lain yang membuat Tabanio memiliki afiliasi yang kuat kepada partai politik karena Ketua DPD Partai Gerindra Kalimantan Selatan, yakni Haji Abidin juga memiliki banyak anggota keluarga besarnya yang merupakan penduduk Tabanio. Haji Abidin juga menjadikan desa ini sebagai salah satu tentakel dari gurita bisnisnya dengan memiliki beberapa kapal nelayan yang diserahkan pengelolaannya kepada warga Tabanio. Sehingga kepentingan Haji Abidin di Desa Tabanio tidak hanya sebatas persoalan politik, tetapi juga ekonomi. Sebagai “*benteng pertahanan*” Gerindra di Tanah Laut, Desa Tabanio mendapatkan bantuan 1 unit mobil ambulance yang selalu di parkir di halaman kantor desa, sehingga total mobil ambulace yang dimiliki desa Tabanio berjumlah 3 buah.

Bantuan mobil ambulance Gerindra ini tidak hanya dilihat sebagai *reward* yang diberikan partai atas dukungan yang tinggi warga Tabanio terhadap partai Gerindra, disamping dijadikan simbol kekuatan partai di Desa Tabanio, termasuk tujuan lainnya yakni untuk menjaga loyalitas pemilih Tabanio agar terus menjadi daerah kantong pendukung Gerindra. Mobil ambulance bantuan Gerindra ini difungsikan khusus untuk mobil jenazah warga desa yang meninggal dunia.



Gambar: Mobil Ambulance bantuan Gerindra yang terparkir di halaman kantor desa.

Sumber: Dokumentasi Pribadi Peneliti

Faktor kedua, yang menjadikan dinamika politik Desa Tabanio semakin semarak adalah karena desa ini menjadi basis anggota dan simpatisan ormas Front Pembela Islam (FPI) dan juga Laskar Pembela Islam (LSI), yang juga dikenal sebagai *underbouw* ormas FPI. Panglima Komando FPI Provinsi Kalimantan Selatan, yang bernama Ustad Zainal Abidin merupakan warga Tabanio yang membuatnya

memiliki banyak pengikut, khususnya anak-anak muda di Tabanio. Walaupun ormas FPI saat ini sudah dibubarkan oleh pemerintah, pengaruh Ustad Zainal Abidin masih sangat kuat di mata masyarakat desa, karena saat ini juga mengembangkan komunitas kegiatan-kegiatan keislaman yang bernama “*Baratib-Ba’amal*” di Tabanio. Saat ini Ustad Zainal Abidin tengah membangun musholla di depan rumahnya sebagai salah satu pusat kegiatan keagamaan di Tabanio. Aktifitas lainnya yakni melatih pencak-silat bagi pemuda desa Tabanio dan daerah sekitarnya. Sejak Mei 2021, Ustad Zainal Abidin juga terpilih sebagai Ketua Karang Taruna Desa Tabanio, masa bakti 2021-2024. Sebagai Panglima FPI Kalimantan Selatan, Zainal Abidin tidak hanya memiliki kemampuan organisatoris dan ketangkasan membangun pergerakan, bagi warga Tabanio Zainal Abidin juga dianggap memiliki keberanian kuat serta kecerdasan dan pengetahuan luas, karena pernah menuntut ilmu di Hadramaut, Yaman. Zainal Abidin juga memiliki perpustakaan pribadi di rumahnya, dengan koleksi buku-buku agama, dan buku-buku politik. Sehingga Zainal Abidin dipandang sebagai salah satu tokoh pemuda yang mampu menggerakkan masyarakat desa Tabanio. Terkait dengan relevansinya terhadap politik desa, saat ini Zainal Abidin merasa tidak puas terhadap kepemimpinan Madiansyah sebagai kepala desa, sehingga kerap bersama-sama dengan anggota-anggota BPD mengkritisi dan memberikan tekanan kepada kebijakan-kebijakan desa.

Faktor ketiga, yakni fungsi *check and balances* yang dijalankan oleh BPD Tabanio sangat optimal dalam mengawasi kinerja pemerintah desa, khususnya kepala desa. BPD Tabanio secara terbuka telah memposisikan dirinya sebagai kekuatan oposan kepala desa, yang menurut mereka tidak aspiratif dan solutif terhadap keluhan-keluhan warga desa. Pemilihan anggota BPD Tabanio yang dilaksanakan pada 2020 yang lalu melahirkan anggota-anggota yang relatif sangat muda. Dari 9 anggota BPD yang terpilih, hanya 2 orang yang berusia di atas

40 tahun, bahkan sebagian besar dari anggotanya masih berusia di bawah 35 tahun. Masyarakat desa menganggap, orang-orang muda yang menjadi anggota BPD tidak hanya enerjik dalam menjalankan tugasnya, tetapi juga masih memiliki idealisme dan semangat untuk memajukan desa.

Mayoritas anggota juga BPD memiliki tingkat pendidikan yang baik, dimana 5 orang anggotanya berprofesi sebagai guru sekolah dan guru taman pendidikan Al-Qur'an. Mereka ini menduduki posisi inti dalam struktur organisasi BPD, seperti Ikbal sebagai Ketua, Syamsul sebagai Wakil Ketua, Agustinah sebagai Sekretaris, Asmuri sebagai Ketua Bidang Pemerintahan Desa, serta Gusti Muhammad Abdurrahman sebagai Ketua Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Latar pendidikan sarjana yang dimiliki anggota-anggota BPD ini turut membentuk pola pikir dan cara pandang mereka yang relatif lebih tajam untuk bersikap kritis terhadap kepala desa. Terlebih Madiansyah yang hanya menyelesaikan pendidikan formal di bangku sekolah menengah atas. Sehingga modal kultural yang dimiliki oleh BPD lebih unggul dari kepala desa.

Beberapa anggota BPD ini memiliki motif tersendiri dalam menjalankan fungsinya dalam menyerap dan memperjuangkan aspirasi warga, maupun mengawasi kinerja kepala desa. Posisi Ikbal sebagai Ketua BPD adalah posisi paling strategis yang memberikannya panggung politik untuk terus memperkuat simpati dan dukungan politik masyarakat terhadapnya. Ketua BPD menjadi ikon populer sebagai penyambung lidah warga Desa Tabanio. Ikbal sendiri memiliki ambisi untuk maju sebagai calon kepala desa di pilkades periode mendatang. Kepemimpinan kepala desa yang saat ini banyak mengecewakan masyarakat menjadi keuntungan tersendiri bagi Ikbal, sehingga Ikbal memilih memposisikan dirinya sebagai oposan dari kepala desa. Adapun Syamsul, memiliki latar belakang guru olahraga dan Kapten Timnas Tabanio FC, juga dinilai masyarakat paling kritis

terhadap kepala desa. Sikap Syamsul ini cukup beralasan karena Syamsul adalah adik kandung dari Sauliani, calon kepala desa yang diungguli oleh Madiansyah, dengan terpaut hanya 56 suara pada pilkades 2019 silam. Syamsul memiliki “dendam politik” tersendiri kepada Madiansyah. Dendam politik ataupun sakit hati yang sama juga dirasakan Asmuri, karena dirinya juga mencalonkan diri dalam pilkades 2019. Walaupun gagal memenangkan pilkades, namun Asmuri kembali mencalonkan diri dalam pemilihan anggota BPD Tabanio, dan berhasil mendapatkan mandat dari masyarakat sebagai anggota BPD. Sedikit berbeda dengan Rahmani, yang sebelumnya merupakan salah satu tim sukses pemenangan Madiansyah yang kemudian berbalik arah orientasi politiknya karena kecewa terhadap kepemimpinan Madiansyah selama menjabat kepala desa. Apalaga Rahmani juga memiliki beban moril tersendiri untuk menyuarakan aspirasi masyarakat di wilayahnya yang juga merasa tidak puas dengan kinerja kepala desa. Apalagi Rahmani adalah anggota BPD dengan perolehan suara tertinggi diantara anggota BPD lainnya.

Terkait relasi antara kepala desa dan aparatur pemerintahan desa, terdapat gap perbedaan usia yang cukup signifikan, dimana hanya ada satu orang aparatur desa yang berumur 37 tahun bernama Ahmadi, saat ini menjabat sebagai kepala dusun VI. Sementara itu usia aparatur perangkat desa lainnya masih di bawah 30 tahun, sedangkan kepala desa Madiansyah berumur 57 tahun. Pemilihan aparatur pemerintahan di desa Tabanio, mulai dari kepala dusun, kepala urusan keuangan, pemerintahan, hingga sekretaris desa dipilih melalui seleksi admistratif berjenjang. Seleksi ini dilakukan mulai di tingkat desa hingga ke tingkat kecamatan. Menariknya, kepala desa Tabanio ternyata tidak mampu mengintervensi nama-nama aparatur pemerintahan desa yang lulus seleksi. Berbeda dengan Desa Takisung yang komposisi aparatur pemerintahan desanya adalah anggota keluarga ataupun orang-orang dekat kepala desa.

Di Tabanio, orang-orang dekat kepala desa justru tersisih saat proses seleksi berlangsung. Sehingga para aparatur pemerintahan Desa Tabanio relatif independen dan lebih sulit dikontrol oleh kepala desa, karena merasa tidak memiliki hutang budi. Bahkan para aparatur pemerintahan Desa Tabanio sering terlibat adu mulut dengan kepala desa. Mereka lebih takut berhadapan dengan amukan masyarakat ketimbang berhadapan dengan kepala desa. Posisi aparatur pemerintahan desa lebih memilih cari aman untuk tidak berkonfrontasi dengan masyarakat desa, sehingga antara kepala desa dan aparatur pemerintahan desa seringkali tidak sejalan, bahkan cenderung berkonflik.

Terkait dengan sejarah kepemimpinan desa, di kantor Desa Tabanio hingga saat ini tidak ditemukan catatan, dokumen dan arsip resmi terkait sejarah pilkades di Desa Tabanio dari beberapa dekade terakhir. Berdasarkan penelusuran di lapangan, berikut beberapa nama-nama yang diketahui pernah menjadi kepala desa di Tabanio:

No	NAMA	MASA JABATAN	KETERANGAN
1.	O'OM	1961	Pj. Kades Pertama
2.	LAMRI	1966	Kades Kedua
3.	M. JAINI	1972	Kades Ketiga
4.	BAHTIAR	1978	Kades Keempat
5.	JANSAN	1984	Kades Kelima
6.	M. AINI	1989	Kades Keenam
7.	ASRUDIN	1994	Kades Ketujuh
8.	JAMHARI	2000	Kades Kedelapan
9.	BAHRANI	2006	Kades Kesembilan
10.	H. YUSDIANSYAH (H. IYUS)	2012-2018	Kades Kesepuluh

Perlawanan Warga Pesisir

11.	AHDA FU'ADI	2018-2019	Pj. Kades (Mengundurkan diri karena tekanan politik kelompok Hulu)
12.	SUBELI	2019	Pj. Kades (Sempat Mengalami Gangguan Jiwa selama menjabat PJ. Kades)
13.	H. NOOR ISRANSYAH	2019-2020 (Februari)	Pj. Kades
14.	MADIANSYAH	2020-2026	Kades Keempatbelas

Satu hal yang perlu digaris bawahi dalam sejarah Pilkades yang secara langsung dipilih oleh masyarakat di Tabanio, sampai pilkades 2019, belum ada kepala desa yang mampu untuk menyelesaikan jabatannya hingga dua periode. Masyarakat Tabanio sepertinya cepat merasa kecewa bila kinerja kepala desa terpilih tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Jika mereka kecewa terhadap kepemimpinan kepala desa, mereka dengan cepat akan mencari sosok baru untuk mereka dukung dalam pilkades berikutnya. Dalam konteks ini, peranan tokoh-tokoh masyarakat Hulu juga terasa cukup berpengaruh terhadap stabilitas posisi jabatan kepala desa. Saat Ahda Fua'adi menjadi Pjs. Kepala Desa Tabanio pada tahun 2018, para tokoh-tokoh masyarakat dari Hulu merasa tidak cocok dengan Ahda Fu'adi sebagai Pjs. kepala desa yang baru. Ahda Fu'adi adalah birokrat ASN yang bekerja di bagian Humas Pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Menurut pengkuan Isna (Kaur Perencanaan & Tata usaha) dan Ahmad Sahidan (Sekretaris Desa) Ahda Fu'adi sangat mengayomi dan memberikan banyak teladan bagi aparatur desa. Namun karena Ahda Fu'adi merupakan orang dekat dari Bupati, maka beberapa tokoh masyarakat Hulu sepertinya tidak mendukung Ahda Fu'adi menjadi Pjs. kepala desa Tabanio. Mereka lalu menemui Camat Takisung dan menuntut agar Ahda Fu'adi diganti sebagai kepala desa. Walaupun tuntutan mereka ini dimentahkan

oleh camat, namun mereka tetap bersikukuh dan mengancam untuk melakukan demonstrasi ke pemerintah kabupaten untuk menolak kepemimpinan Ahda Fu'adi. Mengetahui rencana masyarakat Tabanio yang akan melakukan demonstrasi, akhirnya Ahda Fu'adi mengambil inisiatif untuk mengundurkan diri sebagai Pjs. Kepala Desa Tabanio.

Selain itu, kepala desa yang selalu terpilih adalah orang-orang yang bermukim/berasal dari wilayah Hulu Tabanio. Berdasarkan keterangan dari berbagai informan, jumlah pemilih Hulu lebih besar dari jumlah pemilih di wilayah Hilir karena wilayah Hulu penduduknya lebih padat. Sehingga wilayah Hulu secara geo-politik memiliki potensi besar untuk selalu memenangkan pilkades. Walaupun sebaran tempat tinggal penduduk Tabanio juga ada di wilayah seberang sungai, namun dalam konteks politis, hanya ada dua pengelompokan sosial yang paling berpengaruh serta selalu menjadi pembicaraan masyarakat desa, yakni "*Buhan Hulu* (orang-orang/masyarakat Hulu) dan "*Buhan Hilir*" (orang-orang/masyarakat Hilir). Secara geografis, batas wilayah Hulu dan Hilir ditandai oleh Masjid besar yang juga merupakan satu-satunya masjid yang ada di desa Tabanio.



Gambar: Pembagian wilayah Hulu dan Hilir

Perlawanan Warga Pesisir

Buhan Hilir dikenal lebih keras dan agresif dibandingkan dengan *Buhan Hulu*. Untuk menggambarkan masyarakat Hilir, dapat dicermati dari kutipan wawancara berikut:

Masyarakat di Hilir itu terkenal masyarakat yang keras memang orang-orangnya, pokoknya jika urusan anarkis ya sudah mereka itu, mereka itu kompak masyarakat Hilir itu. Mereka itu juga vokalnya langsung dengan tindakan. (Wawancara dengan Zainal Abidin, 12/02/2022)

Berbeda dengan masyarakat Hilir yang lebih keras, masyarakat Hulu memiliki karakter sedikit lebih lembut namun sangat piawai dalam memainkan siasat dan strategi politiknya. Seperti yang diungkapkan dalam kutipan wawancara berikut:

“Kalau ingin tahu seperti apa masyarakat Hulu, liat Salas (Mahludin). Mana ada kekerasan dimainkan, pasti cara berbicaranya politik-politik saja. Mereka tidak mau menggunakan sistem kekerasan/bentrokan. Kalau masalah perang, masyarakat hilir saja yang dipanggil, mereka siap” (Wawancara dengan Muahmmad Lili, 22/02/2022).

Kembali ke pembahasan pilkades, pemilih di wilayah Hulu juga lebih solid untuk mendukung calon kepala desa yang berasal dari Hulu. Masyarakat di Hulu merasa jika kepala desa berasal dari Hulu, maka program pembangunan akan lebih mudah diarahkan ke wilayah mereka. Selain itu masyarakat di wilayah Hulu juga merasa lebih mudah jika mereka harus mengurus berbagai kepentingan mereka seperti administrasi kependudukan ataupun urusan lainnya jika kepala desanya adalah orang yang sama wilayahnya dengan mereka. Berikut kutipan wawancara terkait hal tersebut:

“Yang sulitnya, bila sudah waktunya pilkades ini, ini yang biasanya dikatakan oleh masyarakat Hulu, lebih baik jika kita menjadikan orang Hulu sebagai kepala desa, lebih mudah nanti di Hulu jika ada urusan atau keperluan, itu di desa ini yang tidak bisa dibuang” (Wawancara dengan Rahmani, 05/02/2022).

Analisa singkat pilkades terakhir.

Pemilihan Pilkades di Tabanio dilaksanakan pada bulan Desember 2019. Pilkades kali ini diikuti oleh 5 orang kandidat, yakni:

No Urut 1. Asmuri, memperoleh 317 suara

No Urut 2. Sauliani, memperoleh 610 suara

No Urut 3. Hairudin, memperoleh 271 suara

No Urut 4. Madiansyah, memperoleh 666 suara

No Urut 5. Zulkifli, memperoleh 154 suara.

Terkait dengan latar belakang kandidat, Asmuri adalah Guru honorer SDN 2 Tabanio, pemilik bengkel las, serta petugas Pamsimas Desa Tabanio, yang bermukim di wilayah Hulu seberang. Sementara Sauliani juga dikenal sebagai guru honorer SMK 1 Takisung, yang bermukim wilayah tengah kampung. Selajutnya yakni Hairudin, yang sebelumnya menjabat sebagai Kaur Pemerintahan yang bertempat tinggal di wilayah hulu seberang.

Kepala desa yang terpilih, Madiansyah, memiliki pengalaman panjang sebagai karyawan perusahaan di berbagai daerah, baik di wilayah Kalimantan Selatan ataupun di wilayah Jawa Barat. Madiansyah diketahui hampir 30 tahun merantau meninggalkan kampung halamannya di Tabanio. Atas permintaan para tokoh-tokoh masyarakat dan para Tetua Kampung Tabanio di wilayah Hulu, untuk diusung oleh masyarakat Hulu sebagai calon kepala desa. Madiansyah kemudian kembali ke Tabanio, 3 bulan sebelum pilkades dilaksanakan. Madiansyah memang berasal dari wilayah Hulu, sehingga memiliki kans untuk memenangkan pilkades. Ditambah lagi ayahnya yang bernama Jansan merupakan mantan Kepala Desa Tabanio yang menjabat pada tahun 1979 sampai dengan tahun 1983. Jansan tidak menyelesaikan masa jabatannya sebagai kepala desa karena pada tahun 1983 meninggal dunia.

Perlawanan Warga Pesisir

Selanjutnya, calon kepala desa Zulkifli, memiliki latar belakang sebagai guru honorer SMP 2 Takisung, yang bermukim di wilayah seberang kampung. Saat ini di era kepemimpinan Madiansyah, Zulkifli menjadi ketua BUMDes Tabanio.

Pilkades pada 2019 tersebut berjalan kompetitif dan terbuka karena diikuti oleh 5 orang kandidat, dimana batas kuota peserta calon kepala desa digunakan secara maksimal oleh warga desa Tabanio. Yang membuat perhelatan pilkades 2019 semakin terbuka, karena mantan kepala desa sebelumnya yakni (H. Yuspiansyah/Iyus) tidak mencalonkan diri kembali pada pilkades 2019. Berdasarkan keterangan dari beberapa informan, dukungan masyarakat terhadap H. Iyus melemah, sehingga dirinya lebih memilih untuk tidak berpartisipasi dalam pilkades 2019. Begitu juga nama-nama lainnya yang pernah menjabat sebagai kepala desa Tabanio, yang memutuskan untuk tidak mencalonkan diri kembali pada pilkades 2019. Selain itu, raihan suara para kandidat juga ketat, khususnya antara Madiansyah dan Sauli. Selisih perolehan suara kepala desa terpilih (Madiansyah) dengan Sauli sebagai peraih suara tertinggi kedua, hanya terpaut 60 suara. Sehingga pada dasarnya kekuatan pendukung Madiansyah dan Sauli hampir setara di Tabanio. Inilah yang membuat legitimasi politik Madiansyah sebagai kepala desa masih lemah, karena basis konstituen Sauli juga hampir berimbang dengan Madiansyah. Namun menariknya dominasi kekuatan politik kelompok masyarakat di wilayah Hulu masih eksis, karena calon kepala desa yang terpilih (Madiansyah) juga berasal dari wilayah Hulu.

Sampai saat ini, terdapat satu kepercayaan dari warga desa bahwa puluhan tahun yang lalu ada seorang pengembara yang datang ke Desa Tabanio. Ketika berada di daerah Hulu, pengembara itu begitu dihormati dan disambut baik oleh warga, sementara itu ketika berada di wilayah hilir pengembara tadi merasa diabaikan oleh warga. Karena

kecewa, maka pengembara tadi mengucapkan sumpah, bahwa tidak ada satupun penduduk dari wilayah Hilir yang akan bisa menjadi Pamabakal (kepala desa).

“Dulu ada seorang pengembara, beliau membahasakan dua, Takisung dengan Tabuniau (Tabanio). Takisung ini beliau datang ke rumah warga ingin minta makan tidak dijamu sama sekali, lalu dibahasakan beliau masyarakat Takisung asli tidak ada yang akan bisa naik haji, Takisung asli maksudnya. Setelah itu, singgah ke Tabuniau, di wilayah hulu beliau dihormati, di hilir tidak dihormati. Dibahasakan beliau masyarakat Hilir tidak ada yang bisa menjadi kepala desa. Itu sudah lebih seratus tahun yang lalu ceritanya”. (Wawancara dengan Muhammad Lili, 22/02/2022)

Adanya mitos sumpah pengembara ini memberikan keuntungan tersendiri bagi orang-orang wilayah Hulu yang akan menjadi kepala desa. Bahkan kepercayaan ini menjadi komoditas politik yang terus digaungkan sebagai propaganda oleh para tim sukses calon kepala desa dari wilayah Hulu menjelang diadakannya pilkades, karena selama ini mitos tersebut belum pernah terpecahkan, hingga menjadi sistem kepercayaan yang kuat di masyarakat.

Menariknya, pilkades yang dilaksanakan pada Desember 2019 yang lalu tidak ditemukan praktik *vote buying*. Hal ini justru sangat berbeda jika dibandingkan dengan pemilu legislatif, pilgub, pilbup ataupun pilpres, dimana masyarakat Tabanio mengaku menerima “uang saku” rata-rata Rp 100.000,- per orang oleh tim sukses dari berbagai kandidat untuk memberikan suaranya kepada para calon. Bahkan pemilihan anggota BPD Tabanio juga masih terdapat adanya praktik politik uang. Salah satu modusnya yakni memberikan sumbangan berupa air mineral beberapa dus kepada warga saat mengadakan acara selamatan ataupun kegiatan keagamaan lainnya di rumah mereka.

Perlawanan Warga Pesisir

Berdasarkan observasi yang dilakukan, peneliti meyakini bahwa mengapa dalam pilkades justru tidak ditemukan adanya praktik *vote buying* karena ketatnya pengawasan yang dilakukan masyarakat desa. Peneliti meyakini hal ini dipengaruhi dominasi masyarakat di wilayah Hulu yang selalu berhasil menjadikan calon yang diusungnya terpilih sebagai kepala desa, serta memastikan pengawasan yang ketat agar praktik *vote buying* yang dapat merubah preferensi pemilih tidak terjadi. Sebab dalam situasi yang kondusif tanpa pengaruh *money politics*, para tokoh masyarakat Hulu meyakini bahwa pilkades akan terus dimenangkan oleh kandidat yang berasal dari kelompok mereka. Hanya kekuatan politik uang-lah yang kemungkinan dapat memecah dukungan masyarakat dari wilayah Hulu.

Faktor eksternal (Bupati, anggota DPRD, ketua partai, dlsb) juga tidak berupaya mengintervensi untuk menentukan preferensi masyarakat dalam memilih calon kepala desa. Walaupun ada anggota DPRD Kabupaten yang merupakan warga desa Tabanio (Khairil), namun Khairil sepertinya memilih bermain aman dengan bersikap netral untuk tidak mendukung salah satu kandidat kepala desa. Khairil sepertinya sadar jika kandidat yang didukungnya gagal terpilih sebagai kepala desa, tentu akan menimbulkan kerenggangan hubungan dengan kepala desa terpilih.

BAB VII

STRUKTUR PELUANG POLITIK GERAKAN PERLAWANAN NELAYAN TABANIO

Revolusi terjadi bukan karena masyarakat dalam kondisi tertekan, tetapi sistem politik dan ekonomi yang sebelumnya tertutup mengalami keterbukaan...
(Alexis de Tocqueville)

Pendekatan *Political Opportunity Structure* (POS) dalam menjelaskan kemunculan gerakan perlawanan Nelayan Tabanio

Pengejawantahan sistem demokrasi modern secara tidak langsung telah memberikan ruang kepada gerakan sosial untuk menjadi kekuatan potensial dalam membentuk proses perumusan kebijakan publik (Blumer, 1969; Bassis, et.al., 1980; Nugroho, 2020). Walaupun diposisikan sebagai tindakan kontras serta tentatif dari suatu interaksi antar individu sehari-hari, gerakan sosial mampu menjelma sebagai fenomena universal yang turut membentuk lanskap politik, dari yang berskala global hingga politik lokal (Marx and Goodman, 1980). Gerakan-gerakan sosial yang berskala lokal misalnya yang kerap dijumpai di dalam masyarakat desa di Indonesia juga terus menunjukkan eksistensinya (Nasrullah, 2021). Salah satu contoh yang dapat diajukan yakni gerakan yang dilakukan oleh masyarakat nelayan Desa Tabanio, Kabupaten Tanah laut Kalimantan Selatan.

Terbentuknya gerakan ini sebagai upaya dalam memperjuangkan hak-hak nelayan (termasuk pemilik kapal nelayan) guna memperoleh Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar bersubsidi yang disalurkan PT. Pertamina kepada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Khusus Nelayan (SPBN) Tabanio yang ditengarai telah melakukan kecurangan dan tindakan manipulatif yang berdampak terhadap masyarakat nelayan Desa Tabanio.

Pada umumnya, dalam studi gerakan sosial para sarjana telah membagi dikotomi teori besar yang saling bertentangan satu sama lain (Sztompka, 2004). Pertentangan itu terdiri dari teori mobilisasi aktor yang bersifat *bottom-up*, dengan menegaskan bahwa terjadinya gerakan sosial disebabkan saat keluhan, ketidakpuasan maupun kekecewaan masyarakat sipil telah melampaui batas-batas tertentu, sehingga menimbulkan respon spontanitas berupa aksi kolektif, yang diikuti dengan upaya pengerucutan pemimpin, pengorganisasian hingga perumusan ideologi gerakan. Dengan kata lain, faktor utama yang mempengaruhi lahirnya gerakan sosial disebabkan oleh tindakan yang dibentuk secara sadar oleh para aktor. Namun ternyata pandangan tersebut ditentang oleh kelompok sarjana yang meyakini fenomena gerakan sosial lebih cenderung bersifat *top-down*, dimana gerakan sosial akan terbentuk dan mencapai keberhasilannya justru disebabkan oleh kondisi struktural yang memberikannya kesempatan/ peluang politik.

Analisis gerakan sosial dalam studi ini meminjam pendekatan *Political Opportunity Structure* (POS) untuk menjelaskan bagaimana terbentuknya gerakan masyarakat nelayan Desa Tabanio sebagai aksi perlawanan kepada pengelola SPBN Tabanio yang dituding telah berlaku curang dalam mendistribusikan BBM Solar bersubsidi sehingga para nelayan merasa sangat dirugikan. Daya tarik dari studi ini terdapat pada analisisnya yang memakai pendekatan POS, dimana mayoritas

pendekatan tersebut digunakan untuk mencermati aktivitas-aktivitas partai politik dan peran politisi, kelompok-kelompok kepentingan dan kelompok penekan, organisasi-organisasi/asosiasi-asosiasi internal, hingga sifat pembuatan keputusan politik (Abercrombie, Hill & Turner, 2010). Secara teoritik, eksplanasi fenomena gerakan perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat pedesaan masih terbatas, khususnya pada analisis untuk menjelaskan mengapa sebuah gerakan mampu mencapai keberhasilan ataupun justru mengalami kegagalan. Hal ini juga berimplikasi pada masih lemahnya studi-studi dalam mengeksplorasi seperti apa struktur peluang politik yang melatarinya, sehingga memungkinkan perlawanan masyarakat desa itu dapat muncul menjadi aksi kolektif dalam bentuk gerakan sosial. Beberapa studi terkait perihal struktur peluang politik yang menjadi latar sebuah gerakan justru banyak diulas dalam ruang lingkup makro, di level politik negara ataupun multinasional. Sampai sejauh ini, kajian-kajian gerakan sosial lebih berupaya untuk fokus dalam menjelaskan motif, strategi, maupun faktor penghambat dan pendorong terjadinya gerakan sosial (Situmorang, 2007; Kamajaya, 2010). Jikapun ada, studi-studi tersebut juga masih didominasi tentang gerakan-gerakan yang dilakukan kaum tani di pedesaan (Landsberger, 1981; Scott, 2000; Mustain, 2007; Safitri, 2010). Sementara itu, studi-studi yang mengulik fenomena gerakan sosial pada level mikro maupun pada kasus-kasus spesifik seperti gerakan yang dilakukan oleh masyarakat desa, khususnya yang ada di Indonesia dengan menggunakan analisis POS masih sangat minim. Sehingga memunculkan anggapan bahwa pendekatan POS kurang populer dalam menjelaskan fenomena gerakan sosial yang dilakukan oleh masyarakat desa.

Terkait fungsinya, analisis POS tidak hanya memiliki fleksibilitas dalam memberikan spesifikasi terhadap variabel-variabel peluang, namun juga memiliki kelenturan dalam menganalisis beragam kasus gerakan sosial maupun politik perseteruan (Meyer,

2004). Sehingga pada proses pengembangan literatur, pendekatan POS dapat diimplementasikan di dalam spektrum lebih luas yang memungkinkan temuan-temuan yang bervariasi/beragam yang melatari dari kasus-kasus spesifik (Meyer, 2004; Sukmana, 2016). Inilah yang memungkinkan analisis POS diyakini lebih elastis untuk digunakan guna menganalisis gerakan dengan karakteristik, lokasi dan variasi waktu yang berbeda. Oleh karena itu, kajian yang berupaya untuk menjelaskan gerakan masyarakat nelayan Desa Tabanio dengan menggunakan analisis POS menjadi penting untuk dilakukan.

Dinamika Studi Gerakan Sosial

Eskalasi kajian-kajian gerakan sosial dapat ditelusuri ke dalam beberapa periodisasi. Konseptualisasi awal bermula pasca perang dunia II, yakni sejak tahun 1940-1960-an, yang memiliki ciri khas pada penekanan aspek irasional individu-individu yang terlibat dalam suatu gerakan. Selanjutnya, periode kedua berlangsung pada dekade 1960-1970-an, yang mana studi-studi gerakan sosial cenderung diwarnai perspektif aktor rasional di dalam struktur sosial. Periode ketiga dimulai dari tahun 1970-an dengan memfokuskan pada analisis dekonstruksi gerakan sosial (Mirsal, 2004). Pada fase awal studi gerakan sosial, terdapat dua kelompok akademisi yang memberikan pengaruh besar dalam perkembangan studi-studi gerakan sosial setelahnya, yakni akademisi Amerika Utara dan akademisi negara-negara Eropa. Di Indonesia sendiri pasca reformasi, studi-studi gerakan sosial juga mengalami perkembangannya sendiri (*self-improvement*) dengan memfokuskan kepada gerakan-gerakan di ranah lokal, khususnya yang dilakukan oleh masyarakat pedesaan.

Besarnya antusiasme para sarjana dalam melakukan studi-studi gerakan sosial telah menempatkannya bukan lagi sebagai ranah kajian sosiologi, namun telah berkembang menjadi kajian dalam ranah ilmu

politik, sejarah dan psikologi sosial. Oleh sebab itu, konsep-konsep yang ditawarkan dalam menjelaskan fenomena gerakan sosial juga tidak jarang perlu meminjam dan memodifikasi dari teori-teori lintas ilmu sosial. Sehingga dalam proses perkembangannya lebih lanjut, terdapat empat (4) pendekatan teoritik dalam melakukan analisis gerakan sosial, yakni perilaku kolektif; mobilisasi sumberdaya; proses politik; serta gerakan sosial baru (Eyerman dan Jamison, 1991; Jenkins dan Klandermans, 1995; Klandermans, 1997; Canel, 1997; Tarrow, 1998; della Porta dan Diani, 1999; Singh, 2001; Manalu, 2007). Dengan kata lain, keempat pendekatan itu disebut sebagai pendekatan ketidakpuasan, pendekatan sumberdaya, pendekatan peluang politik, dan pendekatan proses-proses konstruksi pemaknaan (Klandermans, 1997).

Pada perspektif perilaku kolektif, lebih menekankan analisis gerakan sosial pada munculnya reaksi ketidakpuasan masyarakat sebagai respon dari perubahan sosial, politik, ekonomi dan budaya yang menyebabkan ketidaksesuaian antara harapan dengan kondisi nyata yang dialami (Le Bon, 1960; Hoffer, 1951; Blumer, 1969; Kornhauser, 1959; Smelser, 1971; Toch, 1966; Gurr, 1970). Perspektif mobilisasi sumberdaya menjelaskan bagaimana terjadinya suatu gerakan sosial dan bagaimana gerakan dapat bertahan justru karena para aktor mampu membangun organisasi gerakan dan memobilisasi berbagai sumberdaya potensial (material dan non-material) yang tersedia (Mancul Olson, 1965; Zald and Ash, 1966; McCarthy and Zaid, 1977; Anthony Oberschall, 1973, 1978; Charles Tilly, 1978).

Selanjutnya Perspektif Proses Politik, menjelaskan bagaimana kemunculan dan keberhasilan suatu gerakan sosial justru sangat ditentukan dari terbukanya struktur peluang politik yang memberikan keuntungan terhadap gerakan tersebut (Michael Lipsky, 1970; Peter Eisinger, 1973; Jenkins and Perrow, 1977; McAdam, 1982; Tarrow, 1983, 1989, 1998; Kitschelt, 1986; Brockett, 1991; Kriesi, et. all.,

1992). Pendekatan Gerakan Sosial Baru mulai meninggalkan tradisi lama kajian gerakan sosial dalam melihat relasinya terhadap isu-isu politik dan ekonomi, dimana titik fokusnya terletak pada isu-isu lingkungan, budaya dan identitas (Alaian Touraine, 1977, 1981; Clauss Offe, 1985; Laclau and Mouffe, 1985; Alberto Melluci, 1982, 1989, 1996; Inglehart, 1990; Rajendra Singh, 2001).

Dalam studi ini, analisis gerakan sosial yang digunakan mengacu pada tawaran yang dikemukakan Tarrow (1998), dimana gerakan sosial dipandang sebagai tantangan kolektif yang dilakukan oleh individu-individu yang mempunyai solidaritas dan tujuan sama, yang membangun interaksi berkesinambungan dengan kelompok elite, penguasa dan pihak lawan. Penelitian ini meyakini bahwa konteks politik merupakan latar determinan yang mempengaruhi kemunculan maupun keberhasilan dari suatu gerakan. Hal ini secara tegas berimplikasi terhadap pendekatan yang digunakan, dengan menempatkan Teori Struktur Peluang Politik (POS) sebagai kerangka analisisnya.



Gambar: Kliping artikel berita Gerakan Nelayan Tabanio terkait persoalan distribusi BBM Solar Bersubsidi.

Sumber: E-Paper Banjarmasin Post, edisi Kamis, 04 Agustus 2022.

Struktur Peluang Politik Sebagai Pendorong Gerakan Sosial

Pada pertama kalinya, mekanisme struktur kesempatan politik yang mempengaruhi gerakan sosial diperkenalkan oleh Peter Eisinger dalam artikelnya yang berjudul *American Political Science Review* yang diterbitkan pada tahun 1960-an (dalam Situmorang, 2007). Pemikiran Peter Eisinger ternyata dipengaruhi oleh Tocqueville yang menegaskan bahwa revolusi akan muncul bukan karena kelompok masyarakat dalam kondisi tertekan, melainkan disebabkan oleh terbukanya sistem politik dan ekonomi yang sebelumnya bersifat tertutup. Selanjutnya, popularitas teori struktur peluang politik (*political opportunity structure*) atau Teori Proses Politik (*political process theory*) semakin menemukan momentumnya ketika Douglas McAdam pada tahun 1982 mempublikasikan bukunya “*Political Process and the Development of Black Insurgency 1930-1970*” (Locher, 2002).

Dalam melakukan studi-studi gerakan sosial, struktur peluang politik (*political opportunity structure*) merupakan faktor determinan dalam menganalisis kemunculan dan perkembangan gerakan sosial, selain faktor struktur mobilisasi (*mobilizing structures*) dan pembingkaihan kultural (*cultural framing*) (McAdam, McCarthy dan Zald, 2004; Locher 2002). Dibandingkan perspektif ekonomi dan perspektif personal/psikologis, perspektif *Political Opportunity Structure* (POS) lebih menitik-beratkan pada perspektif politik lokal sebagai basis eksplanasi mengapa warganegara berhasil melakukan gerakan sosial (Sukmana, 2016). Analisis POS telah terbukti mampu memberikan perhatian secara sistematis konteks politik yang melatari sebuah gerakan, termasuk institusi-institusi yang ada di dalam lingkungan politik tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa keberhasilan maupun kegagalan gerakan sangat ditentukan oleh struktur peluang politik. Dalam logika ini, dapat dipahami mengapa pendekatan peluang politik sangat relevan dalam membedah fenomena gerakan sosial. Konteks relasi kuasa antara elit dan massa serta konstelasi lingkungan

politik yang dinamis menjadikan perspektif politik sebagai pisau analisis yang diperlukan dalam menjelaskan gerakan sosial.

Kesimpulannya, analisis POS merupakan suatu ekspresi yang bertujuan melakukan analisa tentang keadaan politik yang memiliki pengaruh terhadap kemunculan, struktur, skope dan keberhasilan sebuah gerakan sosial. Para ilmuwan menggunakan konsep POS karena dapat diterapkan secara umum dalam menganalisis gerakan pada konteks global hingga lokal, dimana suatu struktur sangat spesifik serta setiap lokasi memiliki perbedaan dan variasi tersendiri dari waktu ke waktu (Tarrow, 1994).

1. Struktur Peluang Politik Gerakan Perlawanan Masyarakat Nelayan Tabanio

Kemunculan gerakan perlawanan masyarakat nelayan Desa Tabanio terhadap pengelola SPBN Tabanio sangat ditentukan dari kondisi variabel-variabel dari struktur peluang politik yang melatarinya. Variabel peluang politik tersebut yakni terbukanya akses lembaga-lembaga politik, tercerai-berainya keseimbangan politik dan belum terbentuknya keseimbangan politik yang baru, terjadinya konflik antar elit politik, serta adanya dukungan para elit terhadap gerakan untuk melakukan perubahan (McAdam and Tarrow, 2001).

Dari hasil studi yang telah dilakukan terhadap gerakan perlawanan nelayan Desa Tabanio menunjukkan bahwasanya pada proses perumusan maupun perubahan kebijakan publik ternyata tidak selalu berupa siklus kebijakan yang berjalan secara teknokratik, linier serta bersifat legal-formal seperti yang dikemukakan logika umum dalam teori-teori kebijakan publik klasik (Theodoulou, 1995; Dunn, 2000; Lester dan Steward, 2000; Nugroho, 2020). Dalam kondisi tertentu maupun pada kasus-kasus yang lebih spesifik, kehadiran gerakan sosial dapat mempengaruhi mekanisme perubahan kebijakan publik, sehingga prosesnya berjalan diluar dari tahapan logika

konvensional. Proses perubahan kebijakan pemerintah yang bersifat non-konvensional karena tuntutan suatu gerakan, secara tidak langsung turut dipengaruhi oleh terbukanya struktur peluang politik yang memberikan momentum terhadap gerakan untuk muncul ke permukaan.

Dalam studi ini, dapat ditemukan beberapa variabel yang menjadi penanda terbukanya struktur peluang politik hingga menjadi pemicu terbentuknya gerakan masyarakat nelayan Desa Tabanio. Menariknya, variabel-variabel tersebut ternyata tidak berada pada sistem politik tunggal, melainkan kombinasi sistem politik yang merepresentasikan lapisan konstelasi politik pada level desa dan lapisan konstelasi politik pada level supra-desa. Kendatipun struktur peluang politik di level supra-desa relatif terbuka, namun ketika struktur peluang politik pada level desa masih tertutup maka kemunculan gerakan masyarakat nelayan Tabanio tidak dapat terbentuk secara masif dan berjalan efektif, begitu juga sebaliknya. Oleh sebab itu, perlu kiranya diperhatikan kepada para aktor yang akan menggalang gerakan yang berbasis pada masyarakat pedesaan, agar mampu melakukan kalkulasi peluang politik secara cermat, apakah struktur peluang politik yang terdapat pada level desa dan level supra-desa benar-benar terbuka untuk memungkinkan mereka membangun sebuah gerakan yang efektif.

Studi ini juga menunjukkan bahwa pendekatan struktur peluang politik dalam menganalisis kemunculan dan keberhasilan suatu gerakan relatif bersifat elit-sentris. Variabel-variabel terbukanya struktur peluang politik ternyata lebih ditentukan oleh konfigurasi relasi antar kelompok elit serta bagaimana kelompok elit tersebut memainkan perannya. Studi ini semakin menegaskan kembali terhadap apa yang dikemukakan oleh teoritis pengusung pendekatan proses politik (Tarrow, 1998; McAdam, 2001; Meyer, 2004) bahwa

agar dapat mencapai keberhasilan dari suatu gerakan, maka para aktor yang berada dalam suatu lingkungan politik perlu untuk mencari momentum yang tepat sehingga mereka dapat berada pada situasi yang menguntungkan untuk membangun gerakan sosial.

a. Terbukanya Akses terhadap Lembaga-lembaga Politik

Pada variabel ini, akan dibelah ke dalam dua lapisan, yakni di level lapisan desa dan lapisan supra-desa. Dalam lapisan level desa, terbukanya akses kekuasaan ditandai dengan begitu responsifnya lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tabanio dalam menerima keluhan masyarakat nelayan. Ketua dan para anggota BPD Tabanio sangat kooperatif dalam menindaklanjuti keluhan dan aspirasi masyarakat nelayan. BPD Tabanio kemudian segera mengadakan rapat internal dengan agenda menentukan langkah yang akan diambil oleh BPD Tabanio terhadap persoalan distribusi BBM Solar Bersubsidi. Pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 2021, BPD Tabanio mengundang *stakeholder* terkait untuk mengadakan rapat bersama membahas permasalahan distribusi solar bersubsidi. Rapat tersebut bertempat di Balai Desa Tabanio dengan dihadiri oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa Tabanio, Ketua dan Anggota BPD Tabanio, pemilik kapal dan nelayan Desa Tabanio, Hajjah Nurul Tasiah selaku Pengelola SPBN Tabanio, BABINKAMTIBMAS Desa Tabanio dan Perwakilan Anggota TNI Angkatan Laut. Pada rapat tersebut BPD Tabanio rupanya tidak hanya mengkritisi kebijakan dari SPBN Tabanio, namun mereka juga meminta penjelasan dan meminta klarifikasi dari pihak pengelola SPBN Tabanio, dalam persoalan distribusi solar bersubsidi yang menjadi keluhan bagi nelayan Tabanio.

Dari keterangan dan penjelasan yang sudah disampaikan oleh pengelola SPBN Tabanio tersebut, rupanya tidak mampu

meyakinkan para pemilik kapal dan anak buah kapal, sehingga mereka merasa puas terhadap jawaban tersebut. Para nelayan Tabanio yang terlanjur dikecewakan oleh pengelola SPBN Tabanio, memilih untuk bersikap resisten dengan penjelasan Hajjah Nurul, sehingga dialog yang berlangsung selama lebih kurang dua (2) jam diwarnai nuansa ketegangan. Masyarakat nelayan dan Anggota BPD Tabanio menuntut kepada pengelola SPBN Tabanio untuk melakukan normalisasi harga dan standarisasi operasional SPBN Tabanio segera diimplementasikan oleh Hajjah Nurul. Namun saat itu pengelola SPBN Tabanio tetap bersikeras menerapkan aturan dan kebijakannya secara sepihak, sehingga dialog mengalami *dead-lock* (kebuntuan). Para pemilik kapal yang merasa muak dan kecewa terhadap kebijakan pengelola berangsur-angsur meninggalkan ruang rapat, meskipun kegiatan tersebut belum usai. Walaupun pertemuan yang difasilitasi oleh BPD Tabanio belum mampu menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat nelayan, namun Muhammad Ikbal selaku Ketua BPD Tabanio menyatakan BPD Tabanio berupaya memperjuangkan aspirasi dan tuntutan masyarakat nelayan untuk mendapatkan distribusi solar bersubsidi sesuai dengan standar/prosedur yang telah ditentukan PT. Pertamina.

Dalam permasalahan ini, BPD Tabanio mempunyai sikap yang berbeda dan relatif berseberangan dengan sikap Madiansyah, Kepala Desa Tabanio yang lebih memilih untuk bersikap tertutup serta berupaya meredam persoalan distribusi solar bersubsidi ini agar tidak muncul ke permukaan. Masyarakat nelayan kemudian menengarai Madiansyah sebagai sekutu Hajjah Nurul Tasiah, karena berupaya memberikan dukungannya kepada pengelola SPBN Tabanio. Terdapat beberapa alasan yang menjelaskan mengapa BPD Tabanio lebih bersikap terbuka terhadap aspirasi masyarakat desa. *Pertama*, fungsi *check and balances*

yang dilakukan BPD Tabanio sangat optimal dalam mengawasi kinerja pemerintah desa, khususnya kepada kepala desa. Secara terbuka BPD Tabanio telah menegaskan untuk memposisikan dirinya sebagai kekuatan oposan dari kepala desa, ykarena menurut mereka kepala desa cenderung tidak aspiratif dan solutif terhadap permasalahan maupun keluhan-keluhan yang disampaikan warga desa.

Pemilihan anggota BPD Tabanio yang dilaksanakan pada 2020 silam telah melahirkan anggota-anggota terpilih yang berumur relatif sangat muda. Dari 9 anggota BPD yang terpilih, hanya 2 orang yang berusia di atas 40 tahun, bahkan sebagian besar dari anggotanya masih berusia di bawah 40 tahun. Anggota BPD Tabanio saat ini merupakan pengalaman pertama, dan merasa memiliki karir yang panjang jika masyarakat puas terhadap mereka. Sehingga mereka bersungguh-sungguh dalam menjalankan amanah dan kepercayaan konstituen mereka. Masyarakat desa menganggap, orang-orang muda yang menjadi anggota BPD tidak hanya enerjik dalam menjalankan tugasnya, tetapi juga relatif masih memiliki idealisme dan semangat untuk memajukan desa. Inilah yang menjadikan masyarakat Tabanio lebih memilih untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan kepada anggota BPD, daripada menyampaikannya melalui ketua-ketua RT dan kepala dusun yang berada di bawah struktur kekuasaan kepala desa, karena anggota BPD memiliki kekuasaan untuk mengawasi kepala desa dan menjalankan fungsi *check and balance*.

Kedua, mayoritas anggota BPD Tabanio memiliki tingkat pendidikan yang relatif baik, dimana 7 orang anggotanya berpendidikan sarjana. Selain itu 5 orang dari anggotanya juga berprofesi sebagai guru sekolah, seperti guru SD, guru SMP dan guru taman pendidikan Al-Qur'an. Mereka ini juga menduduki posisi inti dalam struktur organisasi BPD, seperti

Ikkal sebagai Ketua, Syamsul sebagai Wakil Ketua, Agustinah sebagai Sekretaris, Asmuri sebagai Ketua Bidang Pemerintahan Desa, serta Gusti Muhammad Abdurrahman sebagai Ketua Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Latar pendidikan sarjana yang dimiliki anggota-anggota BPD ini turut membentuk pola pikir, cara pandang serta pemahaman yang lebih baik terhadap tugas pokok dan fungsi mereka sebagai anggota BPD. *Ketiga*, permasalahan distribusi solar bersubsidi ini memberikan momentum kepada anggota-anggota BPD Tabanio untuk memperkuat kepercayaan (*trust*) dan dukungan masyarakat terhadap eksistensi BPD Tabanio sebagai lembaga agregasi dan artikulasi kepentingan warga desa. Hal ini menjadi ajang pembuktian bagi anggota BPD Tabanio bahwa mereka telah bersungguh-sungguh bekerja dan menjalankan amanah yang diberikan oleh para pemilih mereka.

Selanjutnya, terbukanya akses kekuasaan pada level Pemerintah Supra Desa ditandai dengan upaya Khairil Anwar sebagai anggota DPRD Tanah Laut Fraksi Partai Gerindra yang telah membuka ruang dialog dan menyerap aspirasi para nelayan ketika mengadakan reses di Desa Tabanio pada tanggal 4 November 2021. Saat ini Khairil Anwar tercatat sebagai penduduk Desa Tabanio yang berhasil terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut pada pemilu legislatif tahun 2014 dan pemilu legislatif 2019, dimana Desa Tabanio merupakan salah satu desa yang menjadi bagian dari daerah pemilihannya. Kegiatan reses Khairil Anwar ini diadakan di rumah Haji Ahmad Hormansyah, yang merupakan salah satu masyarakat Desa Tabanio. Dalam kegiatan tersebut, para nelayan dan pemilik kapal menyampaikan kepada Khairil Anwar terkait persoalan distribusi solar bersubsidi. Sejak tahun 2017 hingga saat ini, mereka merasa telah banyak dirugikan oleh pengelola Stasiun

Pengisian Bahan Bakar untuk Nelayan (SPBN) di Desa Tabanio yang dipimpin oleh Hajjah Nurul Tasiah. Para pemilik kapal nelayan menuding pangkalan SPBN Tabanio telah dioperasikan secara manipulatif, karena dinilai sarat akan ketidak-jujuran dan ketidak-profesionalan. Dalam kegiatan reses tersebut, masyarakat nelayan menyampaikan aspirasi mereka terkait beberapa hal:

1. Penyaluran solar bersubsidi di desa Tabanio belum diawasi dengan baik
2. Harga jual solar bersubsidi yang dipatok oleh SPBN Tabanio mencapai Rp 5.500,-/liter, dimana harga tersebut di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang sudah ditetapkan Pertamina, yakni Rp 5.150,-/liter.
3. Masyarakat nelayan menginginkan agar kuota pembelian solar bersubsidi tidak dibatasi secara sepihak oleh pihak pengelola. Selama ini mereka merasa kebutuhan bahan bakar untuk kapal-kapal nelayan di Tabanio terkadang tidak mencukupi, dan terpaksa sebagian para pemilik kapal harus membeli solar kepada para pengecer di luar Desa Tabanio, walaupun dengan harga mahal, di atas Rp 8.000,- per liternya. Hal ini terpaksa dilakukan untuk memastikan setiap kapal yang melaut mampu beroperasi hingga 2 minggu di laut.
4. Beberapa pemilik kapal juga mengeluhkan kuota distribusi solar bersubsidi yang tidak merata kepada sesama para pemilik kapal, sehingga berpotensi menimbulkan kecemburuan diantara mereka. Beberapa orang pemilik kapal justru diberikan suplai solar bersubsidi yang relatif melebihi keperluan mereka, hanya karena dianggap memiliki kedekatan secara personal dan mendukung secara penuh apapun yang menjadi kebijakan pengelola SPBN Tabanio.
5. Para pemilik kapal menyayangkan ketika pembelian solar bersubsidi di SPBN Tabanio, mereka harus menyerahkan

uang terlebih dahulu kepada pihak pengelola, baru kemudian beberapa hari kemudian kouta solar tersebut didistribusikan oleh pengelola.

Khairil Anwar berkomitmen untuk menyampaikan secara langsung persoalan ini kepada Ketua DPRD Tanah Laut, sesuai dirinya menyimak dan mencatat berbagai keluhan masyarakat nelayan terkait pengelolaan SPBN Tabanio. Khairil Anwar juga menyarankan kepada Pemerintah Desa Tabanio agar segera menindaklanjuti keluhan para nelayan tersebut. Sebagai warga Tabanio, Khairil Anwar juga memberikan dukungan kepada pemerintah desa untuk sesegeranya melaksanakan rapat dengan mengundang para anak buah kapal dan seluruh pemilik kapal guna menemukan solusi bersama terhadap permasalahan yang mereka hadapi. Sebagai anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut dan sekaligus warga Desa Tabanio, Khairil Anwar memang tidak bisa menutup mata atas persoalan yang dihadapi masyarakat nelayan Tabanio. Khairil Anwar memiliki banyak hubungan kekerabatan dengan masyarakat desa Tabanio. Selain itu, masyarakat Tabanio merupakan basis konstituennya, sekaligus lumbung simpatisan Partai Gerindra dalam mendulang suara pada pemilu legislatif 2014 dan 2019 yang lalu. Desa Tabanio adalah salah satu desa yang memiliki jumlah pemilih terbanyak di Kabupaten Tanah Laut, yang mencapai 3.064 pemilih. Sehingga secara tidak langsung Khairil Anwar memiliki kepentingan besar terhadap warga Desa Tabanio. Inilah yang membuat Khairil Anwar membuka diri dan turut memperjuangkan aspirasi masyarakat Desa Tabanio. Selain itu, Khairil Anwar juga diketahui memiliki 2 (dua) unit kapal nelayan yang aktif beroperasi, sehingga secara langsung dirinya juga berkepentingan terhadap distribusi BBM Solar bersubsidi yang disalurkan SPBN Tabanio.

Jalur lain terbukanya akses kekuasaan di institusi politik formal juga ditandai dari ketua-ketua partai politik yang memberikan perhatian terhadap persoalan masyarakat nelayan Tabanio. Hajjah Mariana, Ketua Partai Gerindra Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 07 April 2022 telah membuka ruang komunikasi dengan mempersilahkan perwakilan masyarakat nelayan Tabanio untuk bertemu dan menyampaikan secara langsung permasalahan yang mereka hadapi. Pertemuan tersebut berlangsung di Rumah Aspirasi Partai Gerindra Kabupaten Tanah Laut. Dalam kesempatan itu, Hajjah Mariana meminta kepada beberapa anggota DPRD Fraksi Partai Gerindra Kabupaten Tanah Laut yang juga berhadir di tempat tersebut seperti Haji Atmari yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Tanah Laut dan Khairil Anwar untuk membantu mengawal persoalan nelayan Tabanio melalui mekanisme Rapat Dengar Pendapat di DPRD Tanah Laut. Sejak pemilu 2014, Desa Tabanio menjadi lokasi strategis bagi kemenangan Partai Gerindra di Kabupaten Tanah Laut. Bahkan pada tahun 2019 yang lalu, Partai Gerindra Provinsi Kalimantan Selatan menghibahkan satu unit mobil ambulance kepada masyarakat Desa Tabanio sebagai apresiasi atas dukungan masyarakat Tabanio terhadap Partai Gerindra. Selain itu, elit Partai Gerindra Provinsi Kalimantan Selatan, seperti Haji Abidin dan Hajjah Mariana memiliki banyak jaringan kerabat di Desa Tabanio. Oleh sebab itu, Desa Tabanio menjadi desa yang mendapatkan perhatian tersendiri oleh elit Partai Gerindra.

Gerakan masyarakat nelayan Tabanio ini juga mendapat perhatian dari Haji Nurdin selaku Ketua PDIP DPC Tanah Laut. Terdapat 4 orang perwakilan masyarakat nelayan Tabanio yakni Haji Yuspiani, Muhammad Iqbal, Hamzah dan Masdiana pada tanggal 11 April 2022 berhasil menemui Haji Nurdin di kediaman pribadinya untuk menyampaikan persoalan distribusi solar bersubsidi di Tabanio. Selain itu, perwakilan masyarakat nelayan

juga meminta dukungan kepada Haji Nurdin agar permasalahan ini segera dapat diselesaikan. Kemampuan dari aktor-aktor gerakan masyarakat nelayan Tabanio untuk melakukan komunikasi dan meminta dukungan dari Ketua PDIP Tanah Laut ini tidak terlepas dari hubungan kekerabatan yang dimiliki Haji Nurdin dan dengan beberapa warga Desa Tabanio. Sehingga melalui jaringan informal, masyarakat nelayan Desa Tabanio, seperti Haji Yuspiani dapat melakukan lobi dan menyampaikan aspirasi mereka dengan lebih efektif. Disamping itu, Haji Nurdin juga memiliki kepentingan untuk mendapatkan kepercayaan dan simpati dari masyarakat nelayan Tabanio, karena dirinya akan berkompetisi sebagai calon kepala daerah dalam pilkada Tanah Laut pada tahun 2024 yang akan datang.

Terbukanya akses kekuasaan dan dukungan politik dari elit Partai Gerindra dan elit PDIP Tanah Laut memberikan sinyal kuat terhadap peluang bagi munculnya gerakan masyarakat nelayan Tabanio, serta memberikan kepercayaan diri bagi gerakan tersebut untuk membawa persoalan ini ke dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Tanah Laut. Partai Gerindra dan PDIP masing-masing memiliki 6 kursi di DPRD Tanah Laut. Hal ini menjadikannya sebagai partai pemenang pemilu legislatif 2019, sekaligus menempatkan kader PDIP yakni Muslimin di posisi Ketua DPRD dan kader Partai Gerindra, yakni haji Atmari sebagai Wakil Ketua I DPRD Tanah Laut. Terbukanya akses kekuasaan terhadap partai-partai yang memiliki kekuatan dominan di DPRD Tanah Laut, berimplikasi dalam mempermudah gerakan masyarakat Tabanio untuk membawa agenda-agenda mereka memasuki jalur kekuasaan lembaga legislatif. Sehingga pada tanggal 17 Mei 2022, sebanyak 50 orang dari perwakilan masyarakat nelayan Tabanio berhasil melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Tanah Laut.

Tabel 1. Komposisi Anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut Periode 2019-2024

NAMA PARTAI	PEROLEHAN JUMLAH KURSI
PDIP	6
Gerindra	6
Golkar	4
Nasdem	4
PKB	3
PKS	3
PAN	3
Hanura	2
Demokrat	2
PPP	2

Sumber: <https://dprd.tanahlautkab.go.id/>

b. Tercerai-berainya Keseimbangan Politik dan Belum Terbentuknya Keseimbangan Politik yang Baru

Seperti yang dikemukakan Mc Adams (2001), ketika tercerai-berainya stabilitas politik serta belum terbentuknya keseimbangan politik yang baru, maka akan memberikan keuntungan bagi berkembangnya suatu gerakan. Pada kasus munculnya gerakan perlawanan masyarakat nelayan Tabanio, kondisi instabilitas konstelasi politik yang melatarinya berlangsung dalam dua level. Dalam level desa, ditandai dari dekonsolidasi aliansi kelompok elit yang mendukung Hajjah Nurul Tasiah dalam menjalankan usahanya sebagai pengelola SPBN Tabanio. Faktor utama dari melemahnya kekuatan kelompok elit yang pro terhadap Hajjah Nurul Tasiah karena Habib Nunci Assegaf meninggal dunia pada

03 November 2021. Sejak Hajjah Nurul Tasiah mendapatkan kontrak dari PT. Pertamina untuk mendistribusikan BBM Solar bersubsidi di Tabanio pada tahun 2013, Habib Nunci menjadi patron Hajjah Nurul Tasiah yang melindungi bisnis distribusi solar yang dijalankan SPBN Tabanio. Walaupun distribusi solar bersubsidi yang dilakukan SPBN Tabanio merugikan masyarakat nelayan, namun karena Hajjah Nurul mendapat dukungan Habib Nunci Assegaf untuk menjalankan usahanya di Tabanio, masyarakat segan untuk melakukan perlawanan maupun melakukan protes terhadap pengelola SPBN Tabanio. Habib Nunci Assegaf merupakan aktor yang sangat berpengaruh sekaligus dihormati oleh warga Desa Tabanio.

Masyarakat Desa Tabanio seluruhnya beragama Islam, serta dikenal sangat religius. Warga desa Tabanio memberikan *privilege* kepada habaib (*habib*) karena dianggap sebagai sosok yang sakral dan dimuliakan, dimana terdapat kepercayaan bila memusuhi habaib akan menghilangkan keberkahan dari kehidupan mereka. Habib Nunci Assegaf berusia 73 tahun, merupakan aktor informal/*non-governing elite* yang memiliki jaringan luas kepada para ulama, pejabat pemerintah, pengusaha hingga tokoh politik di wilayah Kalimantan Selatan. Bahkan dalam beberapa aksi massa dan gerakan perlawanan yang dilakukan oleh warga desa, Habib Nunci Assegaf menjadi salah satu tokoh utamanya. Meninggalnya Habib Nunci Assegaf menjadikan dukungan dan kuasa yang dimiliki Hajjah Nurul Tasiah melemah secara signifikan. Relasi kuasa antara kelompok elit yang berpihak kepada Hajjah Nurul Tasiah dengan masyarakat nelayan yang tidak puas dengan SPBN Tabanio menjadi tidak seimbang. Sehingga memberikan kesempatan bagi masyarakat nelayan yang tidak puas terhadap pengelolaan SPBN Tabanio untuk mulai melakukan aksi protes dan membangun gerakan perlawanan.

Perlawanan Warga Pesisir

Pada level supra-desa, stabilitas konfigurasi kekuasaan juga belum terbentuk, karena disebabkan oleh masih labilnya soliditas kelompok elit politik di tingkat kabupaten. Relasi antara lembaga eksekutif dan legislatif di Kabupaten Tanah Laut berjalan disharmonis, yang berimplikasi terhadap terbelahnya pemerintahan (*divided government*). Terbukanya kans Partai Gerindra maupun PDIP Tanah Laut untuk mengusung masing-masing kadernya pada pilkada Tanah Laut 2024 akan memberikan ancaman tersendiri bagi Sukamta yang tengah menjabat Bupati Tanah Laut saat ini untuk mencalonkan diri kembali pada pilkada yang akan datang sebagai calon petahana. Sukamta memiliki latar belakang sebagai birokrat di Tanah Laut, sehingga dianggap bukan berasal dari kader partai politik manapun. Sementara itu, Partai Gerindra yang menjadi partai pengusung Sukamta pada pilkada 2018 yang lalu juga akan mendukung kader partai mereka sendiri untuk berkompetisi pada Pilkada Tanah Laut 2024. Persaingan antara kekuatan Partai Gerindra, PDIP dan Sukamta sebagai kepala daerah menyebabkan konsentrasi kekuasaan terpecah, dan dominasi kekuasaan tidak dimiliki oleh kelompok elit manapun.

Tabel 2. Hasil Perolehan Suara Pilkada Bupati Tanah Laut 2018

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	PARTAI PENDUKUNG
1	Drs. H. Sukamta Abdi Rahman, S.Pd	107.899 (62,33%)	PKS, PKPI, Gerindra
2	H. Bambang Alamsyah, S.T. Ir. H. Ahmad Nizar, S.Sos., M.Si	65.220 (37,67%)	Golkar, Nasdem, PKB, PPP, PAN, Demokrat, PDIP

Sumber: PUSKAPOL UI 2018

Kondisi ini ternyata telah memberikan keuntungan terhadap gerakan masyarakat nelayan Tabanio, karena tidak adanya kekuasaan determinan yang berpotensi kemunculan dan perkembangan menghambat gerakan mereka. Peluang munculnya resistensi dari dominasi kekuasaan di level Kabupaten Tanah Laut juga semakin dapat diminimalisir. Sebaliknya, tersebarinya kekuasaan di berbagai kelompok elit menjadikan gerakan masyarakat Tabanio memiliki banyak peluang untuk mendapatkan dukungan dari masing-masing kelompok elit yang terpecah.

c. Konflik Antar Elit Politik

Peluang politik lainnya yang juga menguntungkan bagi gerakan nelayan Tabanio yakni konflik diantara kelompok elit yang terdapat di level desa maupun konflik elit di level supra-desa. Di level desa, terjadi konflik elit antara Madiansyah selaku kepala Desa Tabanio dengan ketua serta para anggota BPD Tabanio. Konflik ini menciptakan polarisasi kekuatan antara eksekutif dan legislatif di Desa Tabanio. Terdapat dua faktor yang menjadi latar belakang konflik tersebut. Faktor pertama, konflik terbentuk dari adanya perbedaan sikap antara kepala desa dengan anggota-anggota BPD dalam menyikapi aspirasi masyarakat nelayan. Masyarakat memandang kepala desa bersikap pasif dan berupaya menunjukkan resistensinya saat didesak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dialami warga desa. Sebaliknya, anggota-anggota BPD justru menunjukkan sikap pro-aktif dalam menyikapi aspirasi maupun keluhan dari warga desa. Perbedaan sikap dalam merespon aspirasi masyarakat antara kepala desa dan BPD ini kerap menempatkan keduanya ke dalam posisi *vis a vis*, sehingga turut menyeret konflik yang tak terhindarkan antara kepala desa dan BPD.

Faktor kedua, penyebab yang melatari terjadinya konflik antara kepala desa dan anggota BPD yakni dinamika politik pilkades Tabanio. Selain menjalankan fungsi sebagai agregator dan artikulator kepentingan masyarakat desa, anggota-anggota BPD Tabanio juga tentunya memiliki motif politis masing-masing. Salah satu contohnya yakni posisi Ketua BPD yang dipegang oleh Muhammad Ikbal, adalah posisi paling strategis yang mampu memberikannya panggung politik untuk terus membangun kepercayaan (*trust*) dari warga desa serta simpati yang pada akhirnya akan memperkuat dukungan politik masyarakat terhadapnya. Sebagai Ketua BPD Tabanio, Muhammad Ikbal menjadi ikon populer sebagai penyambung lidah warga Desa Tabanio. Muhammad Ikbal mengakui bahwa dirinya juga mempunyai ambisi untuk maju sebagai calon kepala desa di pilkades periode mendatang jika masyarakat mendukungnya. Kepemimpinan kepala desa yang saat ini cukup mengecewakan masyarakat desa ternyata menjadi keuntungan tersendiri bagi Muhammad Ikbal, sehingga memilih untuk memposisikan dirinya sebagai oposan dari kepala desa.

Selain Ketua BPD, Wakil Ketua BPD yang bernama Syamsul juga dinilai masyarakat sangat kritis dan vokal terhadap Madiansyah selaku kepala desa. Syamsul merupakan adik kandung Sauliani, calon kepala desa yang hampir mengalahkan Madiansyah pada Pilkades Tabanio tahun 2019 yang lalu. Selisih suara antara Sauliani dan Madiansyah hanya terpaut 56 suara. Beberapa pihak menyebut bahwa sikap kritis dari Syamsul terhadap kepala desa ini tidak terlepas dari latar belakang pilkades tersebut. Begitu juga dengan anggota BPD lainnya yakni Asmuri, yang diketahui juga pernah mencalonkan diri dalam pilkades 2019 bersama dengan Madiansyah dan Sauiani. Walaupun gagal

memenangkan pilkades, namun Asmuri kembali mencalonkan diri dalam pemilihan anggota BPD Tabanio, dan berhasil menjadi anggota BPD. Sedikit berbeda dengan Rahmani, dimana dirinya merupakan salah satu anggota tim pemenangan Madiansyah pada pilkades, namun justru kemudian berbalik arah dukungan dan orientasi politiknya karena kecewa terhadap kepemimpinan Madiansyah setelah menjadi kepala desa.

Konflik yang membawa konfrontasi antara kepala desa dan anggota BPD di Desa Tabanio, telah memberikan keuntungan bagi aktor-aktor gerakan untuk mencari dukungan politik. Hal ini berimplikasi terhadap terbukanya kesempatan bagi gerakan masyarakat nelayan untuk mendapatkan dukungan dari elit, justru pada kondisi ketika para elit saling berkonflik (Tarrow, 1998; Tarrow, 2011). Elit yang berkonflik ternyata juga memerlukan dukungan massa dan aktor-aktor gerakan untuk memperkuat legitimasi politik dan posisi tawar (*bargaining position*) terhadap elit yang menjadi lawan-lawan mereka. Terdapat relasi simbiosis mutualisme melalui pertukaran dukungan antara kelompok elit dengan massa gerakan yang cukup menjanjikan untuk dibentuk oleh keduanya.

Pada level supra desa, disaat yang bersamaan elit politik di Kabupaten Tanah Laut juga tengah berada pada situasi konfliktual. Walaupun Pilkada Tanah Laut dilaksanakan pada tahun 2024, namun ternyata pada tahun 2022 suhu politik mulai memanas. Partai Gerindra dan PDIP masing-masing berambisi untuk mengusung kader mereka sebagai kandidat kepala daerah Tanah Laut. Sebagai partai yang sama-sama memiliki kekuatan dominan dan mengincar posisi kepala daerah, persaingan antara kedua partai tersebut turut menyeret para elit-elit partai di dalamnya untuk saling berkonflik. Konflik antar elit politik

ini semakin kompleks ketika Partai Gerindra secara implisit melepaskan dukungannya terhadap pemerintahan Sukamta sebagai Bupati Tanah Laut periode 2018-2023. Walaupun Partai Gerindra merupakan partai pendukung utama Sukamta pada Pilkada Tanah Laut 2018, Sukamta bukanlah kader Partai Gerindra karena berlatar belakang sebagai birokrat. Sebagai petahana Sukamta kembali akan mencalonkan diri pada Pilkada Tanah Laut 2024. Hal ini membuat Partai Gerindra melepaskan dukungannya terhadap eksekutif, sembari memfokuskan untuk mempersiapkan kader partainya menghadapi pilkada. Sementara itu, PDIP sebagai partai yang dikalahkan Sukamta dan Partai Gerindra pada pilkada 2018 yang lalu, memilih menjadi oposan di terhadap pemerintahan Sukamta dan mempersiapkan kadernya untuk memenangkan pilkada 2024. Karena sama-sama menginginkan posisi calon kepala daerah pada pilkada, maka persaingan dan konflik diantara kekuatan elit Partai Gerindra, elit PDIP, dan Sukamta menjadi tidak terhindarkan.

Dalam konteks ini, dapat semakin dipahami bahwa konflik diantara elit politik tidak selalu berdampak negatif bagi masyarakat (McAdam dan Tarrow, 2001). Konflik antar kelompok elit politik telah membuat kelompok-kelompok mereka saling bersaing dan memerlukan dukungan massa untuk memperkuat posisi serta pengaruhnya terhadap kelompok elit lawan. Secara tidak langsung, konflik antar kelompok elit membuat lingkaran elit menjadi terbuka untuk dilakukan penetrasi oleh gerakan (Meyer, 2004; Mirsel 2004). Selain itu, konflik yang terjadi juga berimplikasi dalam meningkatkan posisi tawar (*bargaining position*) dari gerakan nelayan Tabanio untuk menjadi aliansi dari salah satu dari kelompok elit yang berkonflik. Gerakan akan lebih mudah beraosiasi dengan kelompok-kelompok elit yang saling

bertikai untuk mencari perlindungan, sepanjang tidak terdapat perbedaan visi maupun nilai-nilai prinsipil yang saling bertolak-belakang. Sehingga diharapkan kelompok elit yang telah menjadi aliansi gerakan mampu mengakomodir dan membantu gerakan untuk memperjuangkan tuntutan-tuntutannya.

Oleh sebab itu, konflik yang berlangsung antar elit politik dan pemerintahan di Kabupaten Tanah Laut, telah memberikan peluang bagi gerakan Masyarakat Nelayan Tabanio guna melakukan penetrasi ke dalam lingkaran elit Partai Gerindra dan PDIP Kabupaten Tanah Laut, termasuk Bupati Sukamta untuk menjajaki aliansi dan mencari dukungan dari kelompok elit. Di satu sisi, elit Partai Gerindra, PDIP dan Bupati Sukamta juga memerlukan dukungan masyarakat Tabanio untuk memuluskan langkah mereka menghadapi Pilkada Tanah Laut 2024. Ketika terjadi perebutan pengaruh menjelang pilkada, masing-masing kelompok elit berkepentingan mencari aliansi-aliansi baru untuk memantapkan langkah politik mereka pada Pilkada 2024, termasuk menjadikan Gerakan Masyarakat Nelayan Tabanio sebagai mitra strategis mereka. Sehingga elit Partai Gerindra, elit PDIP dan Bupati Sukamta memberikan respon yang positif terhadap kemunculan Gerakan Masyarakat Nelayan Tabanio.

d. Dukungan Para Elit Terhadap Gerakan untuk Melakukan Perubahan

Terbukanya peluang politik Gerakan Masyarakat Nelayan Tabanio ditandai saat aktor-aktor gerakan mampu menggalang dukungan dari kelompok elit untuk menjalankan agenda perubahan (McAdam dan Tarrow, 2001). Di level mikro, aktor-aktor gerakan di Desa Tabanio, seperti Haji Yuspiani, Muhammad Fahmi dan Haji Runi mampu memperoleh dukungan dari

beberapa elit Desa Tabanio. Pertama, yakni Muhammad Ikbal yang menjabat sebagai Ketua BPD Tabanio. Di saat Kepala Desa Tabanio yakni Madiansyah berusaha meredam aksi protes para nelayan terhadap pengeleloa SPBN Tabanio, Muhammad Ikbal justru lebih memihak kepada masyarakat nelayan dengan bersikap berseberangan dengan kepala desa. Muhammad Ikbal memberikan dukungan penuh kepada masyarakat nelayan agar mereka yang merasa telah dirugikan oleh pengelola SPBN Tabanio dapat melakukan aksi protes.

Selain Muhammad Ikbal, elit desa lainnya yang memberikan dukungan kepada gerakan yakni Ahmad Sahidan. Ahmad Sahidan adalah Sekretaris Desa Tabanio yang mempunyai peran cukup strategis untuk memperkuat gerakan. Melalui dukungan Ahmad Sahidan, perlawanan nelayan Tabanio mampu mempersempit ruang gerak kepala desa untuk memperkuat pengaruh dan mencari dukungannya kepada aparat perangkat desa lainnya. Akibatnya, kepala desa menjadi sangat kesulitan untuk berupaya memanipulasi data ataupun menyalahgunakan informasi, karena kuatnya kontrol dan pengawasan dari sekretaris desa beserta aparat perangkat desa lainnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, sekretaris desa berkedudukan sebagai pimpinan sekretariat desa dan bertugas sebagai koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), sehingga sekretaris desa memiliki pengaruh besar terhadap aparat perangkat desa lainnya. Akibatnya mayoritas aparat perangkat desa memilih bersama-sama sekretaris desa untuk mendukung gerakan perlawanan nelayan. Dalam menjalankan aktifitas pemerintahan desa, sekretaris desa merupakan koordinator penyelenggaraan urusan pemerintahan desa, yang mampu memberikan suplai data, arsip dan dokumen,

maupun administrasi surat menyurat lainnya yang dibutuhkan oleh gerakan masyarakat nelayan Tabanio. Selain itu, sekretaris desa juga memiliki peran penting untuk membantu menyediakan prasarana desa seperti ruangan aula kantor desa untuk menggelar pertemuan masyarakat nelayan maupun rapat-rapat kecil lainnya guna menyiapkan serta menyusun rencana langkah gerakan yang akan dilakukan selanjutnya. Selain itu, dukungan lainnya yang dilakukan Ahmad Sahidan yakni bersama-sama dengan aparat perangkat desa lainnya membaur bersama masyarakat nelayan untuk ikut serta melakukan unjuk rasa di halaman kantor DPRD Tanah Laut. Sehingga secara simbolis, masyarakat nelayan merasa lebih percaya diri karena didukung penuh oleh representasi kekuatan eksekutif dan legislatif Desa Tabanio.

Pada level supra-desa, hadirnya dukungan dari elit-elit politik di Kabupaten Tanah Laut mampu memberikan kepercayaan diri serta stimulus bagi para aktor gerakan untuk menggalang partisipasi masyarakat nelayan Tabanio secara lebih masif. Terdapat beberapa elit politik yang telah berkontribusi dalam memberikan dukungannya terhadap keberhasilan gerakan. Pertama, yakni dukungan dari Khairil Anwar selaku anggota DPRD Tanah Laut Fraksi Partai Gerindra. Dalam upaya mempertemukan antara Hajjah Mariana selaku Ketua Partai Gerindra Provinsi Kalimantan Selatan dengan aktor-aktor gerakan, Khairil Anwar memiliki andil besar sebagai mediator dari kedua belah pihak. Selanjutnya, Khairil Anwar juga turut mendorong gerakan untuk mengawal tuntutan-tuntutan nelayan Tabanio agar segera dimasukkan ke dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Tanah Laut, sekaligus mendukung anggota DPRD untuk melakukan inspeksi langsung ke Desa Tabanio guna menelusuri permasalahan yang terjadi di

Perlawanan Warga Pesisir

lapangan. Terkait pada proses pembentukan gerakan, Khairil Anwar juga berkontribusi dalam memberikan masukan kepada para aktor gerakan agar mampu mengoptimalkan sumberdaya yang bisa diakses oleh gerakan. Bahkan dari pengakuan Muhammad Ikbal, beberapa kali rapat yang dilakukan oleh aktor-aktor gerakan dilakukan di rumah Khairil Anwar. Dukungan Khairil dalam konteks ini telah memberikan sinyal penting yang dapat diterjemahkan oleh aktor-aktor gerakan terkait keberpihakan Partai Gerindra Kabupaten Tanah Laut terhadap gerakan masyarakat nelayan Tabanio.



Gambar: Rapat Dengar Pendapat Nelayan Tabanio dengan Anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut.

Sumber: Arsip Pribadi Peneliti

Berikutnya, dukungan elit politik juga diperoleh gerakan dari Hajjah Mariani, Ketua Partai Gerindra Provinsi Kalimantan Selatan. Ketika melakukan pertemuan dengan aktor-aktor gerakan masyarakat nelayan, Hajjah Mariana memberikan garansi bahwa elit Partai Gerindra di Tanah Laut akan memberikan dukungan politis, serta mendorong para kadernya di DPRD Tanah Laut segera mengagendakan RDP dengan masyarakat nelayan Tabanio. Selain dukungan politis dari Partai Gerindra, Haji Nurdin selaku Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Tanah Laut juga memberikan dukungan yang berpengaruh besar dalam memperkuat gerakan. Selain menginstruksikan kepada kader-kader partainya yang duduk di DPRD Tanah Laut untuk memberikan dukungan kepada nelayan Tabanio dalam RDP yang akan diadakan, Haji Nurdin juga turun langsung bergabung dengan masyarakat nelayan yang berdemonstrasi menyampaikan aspirasi dan tuntutan mereka agar segera diakomodir oleh pemerintah daerah. Pada tanggal 14 April 2022, sebanyak 300 orang masyarakat nelayan Tabanio melakukan unjuk rasa dan melakukan orasi terbuka di halaman gedung DPDR Tanah Laut, dengan mengibarkan spanduk-spanduk yang bertuliskan beberapa tuntutan terkait persoalan pengelolaan distribusi Solar bersubsidi oleh SPBN Tabanio. Adapun tuntutan yang disampaikan masyarakat nelayan Tabanio yaitu sebagai berikut:

1. DPRD Kabupaten Tanah Laut harus bentuk Pansus (Panitia Khusus), usut dugaan manipulasi data untuk BBM Solar subsidi di Desa Tabanio
2. Usut tuntas mafia BBM Solar subsidi di Desa Tabanio
3. Jangan memainkan harga BBM Solar subsidi di Desa Tabanio.



Gambar: Aksi Demonstrasi yang dilakukan Nelayan Tabanio di Depan Kantor DPRD Kabupaten Tanah Laut.

Sumber: Arsip Pribadi Peneliti.

Kehadiran Haji Nurdin yang turut memberikan orasi pada demonstrasi tersebut, secara simbolis telah memberikan sinyal kuat bahwa gerakan ini mendapat dukungan dari PDIP sebagai kekuatan dominan di DPRD Tanah Laut. Ketika Partai Gerindra dan PDIP satu suara dalam memberikan dukungan dalam RDP terhadap gerakan masyarakat nelayan Tabanio, maka fraksi partai-partai lain yang jumlahnya relatif lebih sedikit tidak memiliki kuasa untuk menghalau tuntutan masyarakat nelayan. Dalam RDP tersebut akhirnya semua fraksi memberikan dukungan agar tuntutan gerakan segera diusut dan dielesaikan pemerintah, sehingga menjadi sebuah keputusan final yang diambil oleh DPRD Tanah Laut. Dukungan Partai Gerindra dan PDIP secara

politis terhadap gerakan masyarakat nelayan Tabanio telah menutup peluang Hajjah Nurul untuk mencari aliansi maupun perlindungan kepada elit-elit partai politik lainnya.

Kuatnya dukungan dari elit-elit politik membuat DPRD Tanah Laut memberikan perhatian lebih serius terhadap gerakan masyarakat nelayan Tabanio. Pada tanggal 17 Mei 2022, Rapat Dengar Pendapat II dilakukan oleh DPRD Tanah Laut dengan menghadirkan *stakeholder* terkait, seperti pihak Pengelola SPBN Tabanio, PT. Pertamina dari kantor perwakilan Banjarmasin, Dinas Perikanan dan Kelautan Tanah Laut, Kepala Desa dan BPD Tabanio serta beberapa orang perwakilan masyarakat nelayan Tabanio. Dalam RDP II tersebut, Hajjah Nurul Tasiah selaku pengelola SPBN Tabanio akhirnya mengakui bahwa kuota 110.000 liter BBM Solar bersubsidi yang diterima dari PT. Pertamina, tidak sepenuhnya disalurkan kepada nelayan. Pihak pengelola SPBN Tabanio juga mengakui bahwa walaupun kapal masyarakat nelayan Tabanio hanya berjumlah 160 buah, tetapi laporan yang disampaikan kepada PT. Pertamina tetap berjumlah 250 buah kapal. Oleh sebab itu, masyarakat nelayan Tabanio menyatakan mosi tidak percaya terhadap Hajjah Nurul Tasiah sebagai pengelola SPBN Tabanio, dan meminta kepada PT. Pertamina dan pemerintah daerah agar Hajjah Nurul Tasiah segera diganti dengan manajemen baru.

BAB VIII

HAPPY ENDING...

Pada hari Kamis, tanggal 02 Februari 2023, gerakan masyarakat nelayan Tabanio dalam memperjuangkan tuntutan mereka terhadap perbaikan tatakelola distribusi BBM Solar bersubsidi yang dilakukan oleh SPBN Tabanio di bawah naungan Pusat Koperasi Unit Desa Kalimantan Selatan (PUSKUD Kalsel), akhirnya benar-benar membuahkan hasil. Dikutip dari media *online* (nusakalimantannews, 2023) Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Kabupaten Tanah Laut, H. Ahmad Taufik membenarkan bahwa telah terjadi kesepakatan bersama yang ditanda-tangani oleh beberapa pihak, terkait penyelesaian konflik antara masyarakat nelayan dengan pengeloa SPBN Tabanio. Bertempat di Kantor Dinas DKPP Tanah Laut, penandatanganan kesepakatan tersebut secara absah mengakhiri konflik panjang yang melibatkan kedua belah pihak. Kepala Dinas DKPP tersebut menceritakan bahwa sebelumnya DKPP Tanah Laut bersama Anggota DPRD Tala, Yoga Finis Suhendra, Khairil Anwar,

Perlawanan Warga Pesisir

serta perwakilan masyarakat nelayan dan juga Kepala Desa Tabanio melakukan mediasi dengan pihak pengelola SPBN Tabanio yang di wakili oleh Bujino A. Sahlan sebagai kuasa hukum Hajjah Nurul Tasiah selaku pengelola SPBN Tabanio. Mediasi tersebut mencapai kesepakatan bersama bahwa persoalan distribusi BBM Solar bersubsidi kepada nelayan Tabanio dianggap telah selesai, dengan diakomodirnya seluruh tuntutan nelayan oleh pengelola SPBN.



Gambar: Penyerahan Dokumen Kesepakatan antara Pengelola SPBN Tabanio dengan Perwakilan Nelayan Tabanio, oleh Kepala DKPP Tanah Laut.

Sumber: <https://www.nusakalimantannews.com/2023/02/nelayan-desa-tabanio-takisung-bisa.html>

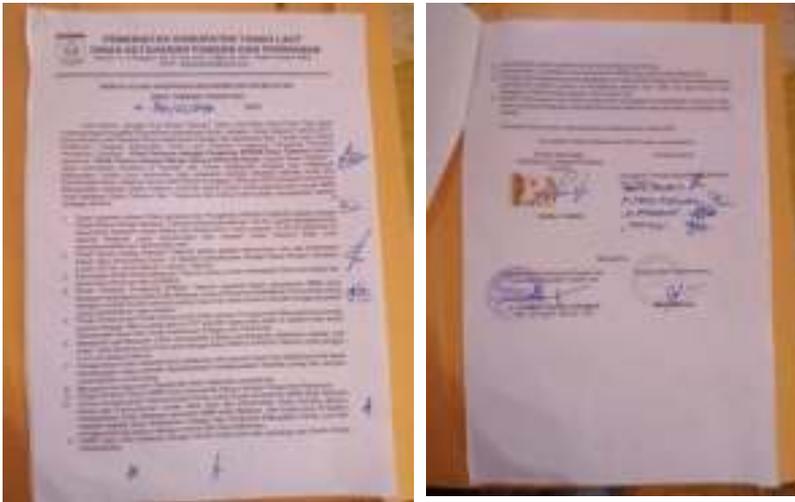
Adapun beberapa poin kesepakatan antara kedua belah pihak yang berkonflik tersebut yakni sebagai berikut:

1. Telah sepakat antara Pihak pertama dari Pengelola SPBUN PUSKUD Kalsel dengan Pihak Kedua Warga Nelayan Tabanio bahwa penyaluran 100 KL sudah mengakomodir kebutuhan Nelayan Kapal Besar dan Kapal Kecil, serta sisanya 10 KL di salurkan ke daerah Nelayan yang memerlukan dan nelayan Desa Tabanio tidak akan mempersoalkannya dikemudian hari.
2. Pihak Kedua warga Nelayan Tabanio setuju apabila dikemudian hari ada bertambah Kapal atau berkurang Kapal di lakukan penyesuaian dengan tetap dengan mengacu kuota 100 KL untuk daerah nelayan Tabanio
3. Kemudian Pihak Kedua Nelayan Tabanio setuju untuk melengkapi Dokumen Kapal dan Dokumen Perijinan dan KUSUKA
4. Pihak Pertama Pengelola SPBUN Tabanio sepakat dalam penyaluran BBM solar Nelayan berpegang pada Data Nelayan yang di keluarkan/ditetapkan Pemerintah Desa dengan Jumlah Kuota masing masing Kapal dan data tersebut menjadi tanggung jawab yang menerbitkan data nelayan.
5. Pihak Pertama dan Pihak Kedua untuk Data nelayan Penggunaan Nama penerima solar sesuai dengan Nama yang ada di KTP pemilik kapal yang telah di ketahui oleh pihak Pemerintah desa dan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.
6. Mengenai pembayaran Solar bersepakat bahwa pembayaran dilakukan setelah ada solar. (Ada Barang ada Duit) serta pengambilan BBM di SPBUN Tabanio mulai tanggal 5 s/d 30 setiap bulanya.
7. Pengambilan solar nelayan harus dilakukan oleh pemilik kapal dan apabila pemilik kapal berhalangan maka pemilik

Perlawanan Warga Pesisir

diperbolehkan menguasai kepada orang lain dengan melampirkan surat kuasa.

- 8 Mengenai penggunaan Despender akan dilakukan secepatnya.
9. Pihak Pertama Setuju BBM Solar bersubsidi Sesuai dengan Harga Het Pertamina.
10. Untuk mengeluarkan Rekomendasi Dinas untuk Kuota penyaluran BBM Solar Nelayan harus ada Permohonan usulan lebih dulu dari Pemerintah Desa tentang dengan melampirkan Data Nelayan penerima BBM solar Nelayan dan kuota solar di tujukan kepada Kepala dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut dan penggunaannya sesuai dengan kriteria dan peruntukannya.
11. Daftar hadir satu kesatuan dengan Berita Acara jadi satu kesatuan dari Berita Acara Kesepakatan
12. Kesepakatan wajib di patuhi dan pihak pertama dan Kedua
- 13 Kesepakatan ini berlaku mulai penyaluran BBM Solar pada bulan Maret 2023
14. Dengan ditandatanganinya kesepakatan ini maka kedua belah pihak bersepakat bahwa perselisihannya paham selama ini dinyatakan selesai, dan tidak ada lagi tuntutan atau gangguan dalam bentuk apapun dikemudian han
15. Apabila dikemudian hari kedua belah pihak mengingkan kesepakatan tersebut di atas maka yang bersangkutan siap dituntut sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.



Gambar: Dokumen Kesepakatan Bersama antara Pihak Pengelola SPBN Tabanio dan Perwakilan Nelayan Tabanio.

Sumber: Dokumentasi Pribadi

Nelayan Tabanio yang awalnya keberatan dengan sistem pengelolaan SPBN Tabanio di bawah kendali Hajjah Nurul Tasiah, melakukan aksi protes dengan membentuk gerakan perlawanan untuk menuntut hak-hak nelayan yang selama ini tidak diberikan oleh pengelola SPBN Tabanio. Perjalanan gerakan perlawanan sepanjang delapan bulan ini tidaklah dapat dikatakan mudah. Diperlukan banyak proses, energi, kesabaran dan sumberdaya dalam menggalang kekuatan nelayan Tabanio. Begitu juga terkait dengan penggunaan strategi dan taktik gerakan, tentu banyak mengurus pemikiran dan kreatifitas dari para aktor gerakan. Namun satu hal yang perlu digarisbawahi dalam studi kasus gerakan perlawanan Nelayan Tabanio ini, bahwa dibalik keberhasilan mereka dalam menggalang gerakan untuk menuntut hak-hak para nelayan untuk mendapatkan keadilan distribusi BBM Solar bersubsidi tidak bisa dilepaskan dari struktur peluang politik yang

melatarinya. Singkatnya, dalam buku ini penulis ingin memperkuat keyakinan bahwa kemunculan dan keberhasilan suatu gerakan sosial justru sangat ditentukan dari terbukanya struktur peluang politik yang telah memberikan keuntungan terhadap gerakan tersebut.



Gambar: Kliping Berita Harian Banjarmasin Post, edisi 4 Februari 2023.
Sumber: epaperbanjarmasinpost.com.

EPILOG

MELAWAN KETIDAKADILAN & KEDZALIMAN MERUPAKAN BENTUK LAIN DARI JIHAD

Ust. Zainal Abidin (Ketua Karang Taruna Tabanio)



Isu ketidakadilan dan kedzaliman adalah isu yang sangat sensitif di belahan dunia manapun. Tidak peduli apa agama atau latar belakang sosial seseorang. Ketika isu itu dilanggar dan mencuat maka akan membuat keresahan, kegaduhan, pembangkangan bahkan tidak mustahil bisa menjadi pemicu suatu kejadian yang bersifat fisik semisal tindakan anarkisme, kerusuhan atau pun pemberontakan.

Terlebih ketika orang atau lembaga yang dianggap melakukan ketidakadilan dan kedzaliman itu tidak mau berkompromi dan mau menang sendiri dengan kepentingannya.

Perlawanan Warga Pesisir

Mendapatkan rasa keadilan adalah hak mendasar dari sisi kemanusiaan baik itu keadilan dalam hukum, sosial, ekonomi, agama atau lainnya. Ketika rasa keadilan itu didapat maka kehidupan yang tenang dan damai akan tercipta sebaliknya ketika ada seseorang atau segolongan yang mau seenaknya sendiri maka kehidupan tak akan bisa berjalan dengan normal, damai dan aman, baik itu kehidupan dalam beragama, bernegara atau puN bermasyarakat.

Apa yang sekarang terjadi di desa Tabanio yaitu bergejolaknya masyarakat nelayan karena sulitnya mendapatkan Solar untuk bahan bahan kapal melaut, naiknya harga solar diatas ketentuan yang diberlakukan pemerintah, dan adanya indikasi penggelapan solar bersubsidi oleh penyalur. Hal ini tentunya mengusik rasa keadilan masyarakat dan rasa diperlakukan dzalim oleh penyalur Solar BBM yang berada di Tabanio. Ketidakadilan dan kedzaliman bagaimana pun harus dilawan apalagi menyangkut hak hidup orang banyak. Dalam bahasa agama melawan ketidakadilan dan kedzaliman adalah jihad tersendiri, amar ma'ruf nahyi munkar, menyeru kepada kebaikan mencegah kemunkaran dan sikap perlawanan ini adalah ibadah tersendiri karena agama sendiri tidak mengajarkan pemeluknya untuk berdiam diri ketika melihat suatu kemunkaran, kedzaliman dan kemunkaran. Hal ini jugalah yang menjadi alasan kita sebagai bangsa Indonesia rela dan berani mengorbankan jiwa dan harta untuk melawan para penjajajah yang datang ke negeri kita.

Adanya hukum dalam bentuk undang-undang, Keppres atau pun perda dalam sistem bernegara kita adalah untuk dilaksanakan dan ditaati bukan malah dilanggar, dipermainkan ataupun diperalat untuk kepentingannya. Namun suatu hukum tidak boleh terpisah dari adanya pengawasan, penindakan, dan sanksi yang tegas diberlakukan kepada siapapun yang melanggar. Tanpa hal itu semua hukum hanya akan menjadi tulisan disebuah buku atau pamflet saja, ibarat macan ompong yang tak punya wibawa.

Hak pengawasan bukan hanya berasal dari pihak yang terkait saja tapi juga masyarakat umum secara luas termasuk yang sekarang terjadi di desa Tabanio, masyarakat menemukan kejanggalkan-kejanggalkan dalam pendistribusian dan harganya yang naik dari ketentuan resmi pemerintah.

Permasalahan penyaluran solar di Tabanio saya yakin bisa berhasil ketika masing-masing pihak bisa berbenah diri. Pihak penyalur mendengarkan keluhan dan mengapresiasi kemauan masyarakat nelayan Tabanio. Kemampuan penyalur untuk melakukan intropseksi menyadari akan kesalahannya, memperbaiki prosedur penyaluran sesuatu dengan aturan undang-undang yang berlaku, tidak diakal-akali atau dimanipulasi, menjadi perihal krusial untuk dilakukan agar konflik dengan nelayan dapat diminimalisir. Pihak pemerintah desa dalam hal ini kepala desa misalnya bisa bersikap tegas ketika mendengar keluhan masyarakatnya tentang pendistribusian dan harga solar yang tidak beres maka langsung memanggil kemudian meminta konfirmasi atas keluhan masyarakatnya bahkan bisa kemudian mencabut atau tidak memberikan surat rekomendasi pengeluaran Solar subsidi dari penyalur yang di tujukan kepada Pertamina. Kemudian, pihak aparat hukum seharusnya bertindak sesuai tupoksi atau fungsi tugasnya ketika ada indikasi penggelapan atau menaikkan harga yang tidak sesuai dengan aturan pemerintah maka bisa langsung bergerak untuk mengali informasi, menyelidiki bahkan penindakan. Sedangkan para aktivis penggerak perlawanan sepantasnya mempunyai niat yang tulus, tidak ada motivasi apapun kecuali untuk memperjuangkan hak hidup orang banyak dan lillahi ta'ala. Agar nantinya tidak mudah goyah dan berubah pikiran ketika dihadapkan dengan ancaman, intimidasi bahkan godaan uang dan jabatan yang pastinya masyarakatlah yang akan dikorbankan. Wakil rakyat atau anggota DPR menyampaikan aspirasi masyarakat dan memberikan tekanan kepada pihak-pihak yang terkait untuk menjalankan tugas fungsinya masing-masing. Disinilah

Perlawanan Warga Pesisir

perlunya kerjasama antara semua pihak yang terkait baik masyarakat, aparat hukum, aparat pemerintah, para aktivitas dan wakil rakyat dan lainnya.

Ketika adanya pertentangan kepentingan antara pengusaha dan rakyat maka sudah sepantasnyalah pemerintah dalam hal ini pemerintah desa berpihak dan berjuang bersama masyarakat. Jangan sampai karena uang atau takut hilangnya jabatan rela membiarkan masyarakatnya berjuang sendirian atau malah menjadi bumber para pengusaha hitam atau oligarki yang menghalalkan segala cara dan tidak peduli dengan nasib masa depan orang banyak. BPD diharapkan ketika mendapat laporan dari masyarakat tentang penyelewengan wewenang dari kepala desa misalnya indikasi adanya “upeti” dari pengusaha maka harus bergerak aktif mengusut bahkan mungkin melaporkannya kepada pihak yang berwajib.

Permasalahan penyaluran solar subsidi ini tidak akan beres apabila hukum atau aturan yang berlaku tidak dilaksanakan di lapangan maka oleh dari itu sangat diharapkan adanya kepatuhan hukum kepada penyalur atau pengusaha, tindakan tegas dari aparat berwajib ketika mendapati pelanggaran, dan berpihaknya aparat desa dan tokoh-tokoh yang berpengaruh atas kepentingan hak masyarakat bukan malah menjadi tameng dan “anjing penjaga” para pengusaha hitam. Desa Tabanio adalah sebuah desa nelayan yang terletak persis keberadaannya di bibir pantai. Letak geografis ini mempengaruhi karakteristik masyarakatnya yang dikenal berwatak keras, “pangarasan, berpikir dan bersikap terbuka, hitam ya hitam putih ya putih tanpa adanya sesuatu yang disembunyikan. Desa Tabanio juga dalam sejarahnya pernah dibangun sebuah benteng Belanda dan pernah menjadi pusat atau pos berkumpulnya para bajak laut.

Hal inilah yang mungkin mendarah daging dalam diri masyarakat Tabanio sehingga ketika tidak tinggal diam, bersuara dan melawan

ketika sesuatu hal yang dirasa ada ketidakberesan, ketidakadilan dan kedzalman sehingga hal ini mengilhami perlawanan masyarakat kepada pengusaha penyalur solar yang dianggap mereka tidak sesuai dengan aturan yang berlaku secara resmi. Dari kegaduhan akibat penyaluran solar subsidi ini kita dapat mengambil hikmah ketika kita diatas misalnya jadi pengusaha untuk mempunyai sifat qonaah, memperbanyak rasa syukur dan jangan mau jadi “mesin atm” dari oknum aparat, oknum pemerintahan atau pun tokoh berpengaruh atau preman.

Jadilah pengusaha yang jujur dan mengedepankan kemaslahatan orang banyak.

Masyarakat jangan lelah berjuang mempertahankan hak dan kehormatan. Dan setiap perjuangan yang didasari niat tulus dan lillahi taala tidak yang sia-sia, berhasil ataupun tidak. Ringkasnya, oleh agama kita disuruh untuk bersikap adil dan tidak diajari diam ketika melihat suatu kemunkaran, kesewenangan dan kedzaliman sebagaimana disebutkan dalam ayat Alquran surah Almaidah ayat 8 :

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan Janganlah sekali- kali kebencianmu terhadap suatu kaum membuatmu berlaku tidak adil.

Dan Hadits Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dar Abu Sa’id Alkhudri ;

“Barangsiapa diantara kalian melihat suatu kemunkaran maka henfaklah ia mengubahnya dengan tangan, apabila tidak mampu maka ubahlah dengan lisannnya, apabila tidak mampu maka ubahlah dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman”.

Wallahu a 'lam bishawab

DAFTAR PUSTAKA

- Aberle, David F. 1966. *A Classification Of Sosial Movement*. Chicago: Aldine Publishing Aberle Co.
- ANRI. 1965. *Surat-surat Perjanjian Antara Kesultanan Banjarmasin Dengan Pemerintahan VOC, Bataafse Republik, Inggeris dan Hindia Belanda 1635-1860*. Jakarta: ANRI.
- Arifin, Anwar. 2003. *Komunikasi Politik: paradigma, Teori, Aplikasi, Strategi dan Komunikasi Politik Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka.
- Arigi, F. 2019. *Pengamat Ungkap Privilese Buzzer Istana, Salah Tak Kena UU ITE*
- Bassis, Michael S. Richard J. Gelles, Ann Levine.1980. *Sociology: An Introduction*. Random House. New York.
- Blumer, H.G., 1969. *Symbolic Intercation: Perspective and Method*. Prentice Hall, pp. 10-11
- Bradshaw, S., & Howard, P. N. (2019). *The Global Disinformation Order 2019 Global Inventory of Organised Social Media Manipulation*
- Crossley, Nick. 2002. *Making Sense of Social Movements*. Philadelphia: Open University Press.
- Davis, Gerald F. et-al (eds),. 2005. *Social Movement and Organizational Theory*. Cambridge University Press, Cambridge, New York.
- Dawson, C.A., and Getty, W.E., 1951. *An Introduction to Sociology*. Revised Edition.

Perlawanan Warga Pesisir

- Della Porta, Donatella and Mario Diani. 1999. *Social movements: An Introduction*. Oxford: Blackwell.
- Diani, Mario & Doug McAdam, 2003, *Social Movement and Network: Relational Approach to Collective Action*, Oxford University Press, UK.
- Dunn, William N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. (Penyunting Muhadjir Darwin). Yogyakarta: Gadjah Mada university Press.
- Fong, Goh Yoon. 2013. *Perdagangan dan Politik Banjarmasin 1700-1747*. Edisi Terjemahan. Yogyakarta: Lilin Persada Press.
- Foucault, Michel. 1982. *The Subject and Power*. In *The Essential Foucault*. New York: The New Press
- Foucault, Michel. 1990. *The History of Sexuality: An Introduction*. Vol. I. New York: Vintage Books hlm.94-95.
- Gary T. Marx & Norman Goodman.1980. *Sociology, Classic and Popular Approaches*. Random House. New York.
- Hollander, Jocelyn A., & Einwohner, Rachel L. 2004. *Conceptualizing Resistance*. Sociological Forum, Vol 19, No. 4 (Dec., 2004), pp. 533-554.
- Jaime S (2020) (<https://medium.com/@sanft.jaime/what-technology-designers-can-learn-from-social-movements-18f3c06c3ba4>)
- Jefekins, Frank. 1998. *Public Relations*. London, England. M & E Pitman Publication.
- Jenkins, J. Craig and bert Klandermans (eds.). 1995. *The Politics of Social Protest: Comparative Perspective on States and Social Movements*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Klandermans, Bert. 1997. *The Social Psychology of Protest*. Oxford/ Cambridge, MA: Blackwell.
- Klandermans, Bert and Conny Roggeband, 2006, *Handbook of Social Movements Across Dicipines*, Springers, Amsterdam.
- Kotler, Philip. 1994. *Dasar-Dasar Pencitraan: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Jakarta: Erlangga.

- Kriesi, Hanspeter. *The Political Opportunity Structure of New Social Movements: Its Impact on Their Mobilization*. Book Chapter. Page 167-198.
- Locher, David A. 2002. *Collective Behavior*. Pennsylvania. Prentice Hall. 239-243
- Lippman, Walter. 1997. *Public Opinion*. New York Academic Publisher. India.
- Lunenberg, F. C. (2011). *Network Patterns and Analysis: Underused Sources to Improve Communication Effectiveness*. National Forum of Educational Administration and Supervision Journal, 28 (4), 2-3.
- Mansyur. 2021. *Jejak Sejarah Tabanio*. Makalah Seminar Sejarah Dinas Perpustakaan & Kearsipan Kabupaten Tanah laut, dipublikasikan 17 Maret 2021.
- McAdam, Doug; Tarrow, Sydney; & Tilly, Charles. 2004. *Dynamics of Contention*. Cambridge: Cambridge University Press.
- McAdam, Doug; McCarthy, John D. ; & Zald, Mayer N. 2004. *Comparative Perspectives on Social Movements: Political Opportunities, Mobilizing Structure, and Cultural Framings*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Macionis, John J. 1999. *Sociology*. New Jersey: Prentice Hall.
- Maring, Prudensius. 2010. *Bagaimana Kekuasaan Bekerja di Balik Konflik, Perlawanan dan Kolaborasi*. Lembaga Pengkajian Antropologi Kekuasaan Indonesia. Jakarta.
- Mauss, Armand L. 1975. *Social Movements & Social Problems*. Philadelphia. Lippincott.
- Meyer, David S. 2002. *Social movements and public policy: eggs, chicken, and theory*. paper prepared for workshop Social Movements, Public Policy, and Democracy, University of California, Irvine, January 11-13.

Perlawanan Warga Pesisir

- Meyer, David S., et-all, (eds),2002, *Social Movement: Identity , Culture & the State*, Oxford University Press, New York.
- Meyer, David S. 2004. *Protest and Political Opportunities*. Annual Review of Sociology. Vol. 30:125-145.
- Mirsel, Robert. 2004. *Teori Pergerakan Sosial*, edisi terjemahan. Yogyakarta: Resist Book.
- Movement Netlab, 2020. Movement Netlab <https://www.wnycstudios.org/podcasts/otm/segments/understanding-social-movement-cycle-on-the-media>
- Mustika, R. 2019. *Pergeseran Peran Buzzer ke Dunia Politik di Media Sosial* Shifting The Role of Buzzer To The World of Politics on. 2(2), 144–151
- Nardini,. et.al. 2020. *Together We Rise: How Social Movements Succeed*. Journal of Consumer Psychology/Vol.31, Issue 1/hlm.112-145.
- Nasrullah. 2021. *Gerakan Laung Bahenda.: Militansi Orang Dayak Bakumpai Menjaga Lahan Gambut dari Ekspansi Perusahaan Perkebunan Sawit di Kalimantan Selatan*. CV. Arti Bumi Intaran. Yogyakarta.
- Nugroho, Riant. 2020. *Public Policy* (edisi 6). Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Philip Kotler. *Dasar-Dasar Pencitraan: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Jakarta: Erlangga. 1994. Hlm.401
- Rubin, Jeffrey W., 1996. *Defining Resistance: Contested Interpretation of Everyday Acts*. Volume 15, Pages 237-260. Law, Politics and Society. JAI Press Inc.
- Saleh, Mohamad Idwar. 1970. *Bandjarmasin*. Bandung: K.P.P.K. Balai Pendidikan Guru.
- Saraswati, M. S. 2018. *Social Media and the Political Campaign Industry in Indonesia*. Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia, 3(1).<https://doi.org/10.25008/jkiski.v3i1.124>

- Scokpol, Teda. 1991. *Negara dan Revolusi Sosial, Suatu Analisis Komparatif tentang Perancis, Rusia dan Cina*, (edisi terjemahan) Jakarta: Erlangga.
- Scott, James C. 2000. *Senjatanya Orang-Orang Yang Kalah: Bentuk-Bentuk Perlawanan Sehari-Hari Kaum Tani*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Singh, Rajendra. 2001. *Social Movements, Old and New: A Post-Modernist Critique*. New Delhi: SAGE publikations India, Ltd. Hlm 97
- Situmorang, Abdul Wahid. 2008. *Gerakan Sosial: Studi Kasus Beberapa Perlawanan Pustaka Pelajar*. Yogyakarta.
- Smelser, Neil. 1963. *Theory of Collective Behavior*. New York. NY: Free Press.
- Sulandjari. 1991. "Politik dan perdagangan lada di Kesultanan Banjarmasin (1747-1781)" (Tesis pada Fakultas Pascasarjana UI, Universitas Indonesia, Depok, 1991).
- Soemirat, Soleh & Elvinaro, 2005. *Dasar-Dasar Publik Relations*. Bandung: PT Remaja Rosadakarya.
- Spencer, Metta. 1982. *Foundations of Modern Sociology*. New Jersey: Prentice Hall, Inc.
- Stolley, Kathy S. 2005. *The Basics of Sociology*. Westport: Greenwood Press.
- Sudharmono. 1977. *30 Tahun Indonesia Merdeka 1950-1964*. Jakarta: Citra Lamtor Gung Persada.
- Sugiono, Shiddiq. 2020. *Fenomena Industri Buzzer di Indonesia: Sebuah Kajian Ekonomi Politik Media*. Communicatus: Jurnal ilmu Komunikasi. Vol.4 No. 1 hlm.47-66
- Sukmana, Oman. 2016. *Konsep dan Teori Gerakan Sosial*. Malang. Intrans Publishing.
- Sztompka, Piotr. 2004. *Sosiologi Perubahan Sosial* (edisi terjemahan). Jakarta: Prenada.

Perlawanan Warga Pesisir

- Tarrow, Sidney. 1998. *Power in Movements: Social Movements and Contentious Politics*. New York: Cambridge University Press.
- Tarrow, Sidney. 2008. *Charles Tilly and the Practice of Contentious Politics*. *Social Movement Studies*, Vol. 7, No. 3, (December 2008), p. 225-246.
- Tarrow, Sidney. 1993. *Cycles of Collective Action: Between Moments of Madness and the Repertoire of Contention*. *SOCIAL SCIENCE HISTORY* 17(2):281–307.
- Tarrow, Sidney. 1995. *The Europeanisation of Conflict: Reflections from a Social Movement Perspective*. *West European Politics* 18(2):223–51
- Theodoulou, Stella Z. 1995. *How public policy is made*. in Stella Z Theodoulou and Matthew A Chan (eds.), *Public Policy; The Essential Readings*. New Jersey: Prentice Hall. Pp. 86-96.
- Tilly, Charles. 1978. *From Mobilization to Revolution*. New York: Newbery Award Records, Inc.
- Wicaksono, Ibnu. 2010. *Kesultanan Banjarmasin Dalam Lintas Perdagangan Nusantara Abad ke-XVIII* (Skripsi pada Program Studi Sejarah dan Peradaban Islam Fakultas Adab & Humaniora, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta 1431 H./2010 M).
- Wilson, John. 1973. *Introduction to Social Movements*. New York: Basic Books.
- Yuslian Noor. 2019. *Laung Bahenda, Simbol Perlawanan Dayak Bakumpai*. <https://jejakrekam.com/2019/07/25/laung-bahenda-simbol-perlawanan-dayak-bakumpai/>
- Zanden, James W. Vander. 1988. *The Social Experience: An Introduction to Sociology*. New York: Random House. Hlm.575
- Ziracradeh, Cyrus Ernesto, 2006, *Social Movement in Politics*, Palgrave MacMillan, USA, UK.

TENTANG PENULIS



Pathurrahman Kurnain, lahir di Martapura, 27 Mei 1987. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lambung Mangkurat (ULM) di tahun 2011. Menulis skripsi dengan judul “Efektivitas Kampanye Pasangan Rudy Arifin & Rudy Resnawan pada Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan 2010”. Ditahun yang sama melanjutkan studi pada Jurusan Politik-Pemerintahan FISIPOL UGM dan menulis tesis “Strategi Politik Perempuan Sebagai Calon Kepala Daerah: Studi Strategi Politik Hj. Sri Surya Widati Pada Pemilu Pilkada Bantul 2010”.

Selama kuliah, aktif dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan. Pernah menjadi Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FISIP Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Ketua Departemen Bidang Politik & Hukum Badan Eksekutif Dewan Mahasiswa (BE-DEMA) ULM, Koordinator Regional Kalimantan Selatan pada Forum Komunikasi Mahasiswa Kalimantan (FKMK) serta Jurnalis Surat Kabar Bulanan Metro Borneo.

Perlawanan Warga Pesisir

Sejak tahun 2015 bekerja sebagai staf pengajar di Jurusan/Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP ULM, Direktur Program Laboratorium Riset Politik-Pemerintahan (LiPP-JIP) FISIP ULM dan Direktur Eksekutif *Global-Local Democracy Institute* (GLORY). Pada tahun 2014 pernah bekerja sebagai Manajer Umum Rumah Aspirasi Banua dr. Zairullah Azhar. Di tahun 2015-2016 bertugas sebagai Staf Khusus Rektor ULM, sejak 2019 sampai sekarang bertugas sebagai Ketua *Information and Communication Technologies* (ICT) FISIP ULM serta Ketua Unit Penjaminan Mutu (UPM) FISIP ULM.

Dalam aktifitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, minat utama penulis saat ini lebih banyak diarahkan pada tema seputar demokrasi lokal. Selain aktif menulis buku dan menulis artikel di media massa, juga aktif menjadi narasumber di berbagai forum, televisi, radio serta *podcast* khususnya yang berkaitan dengan bidang kepemiluan. Pathurrahman Kurnain dapat dihubungi melalui email: pathurrahman@ulm.ac.id.

Adapun buku-buku yang telah diterbitkan antara lain *Pemilu Kardus: Idealisme yang tak Terungkap* (2019), *Capita Selecta: Esai-Esai Tantangan & Problematika Kewarganegaraan di Era Disrupsi* (2020), *Politik Radikalisasi Air: Permainan Dominasi Kuasa pengolahan Air Bersih di Lahan Gambut* (2021), serta buku yang terbaru yakni *Trailogi Politik: Pendekatan Alternatif Pendidikan Politik Anak Muda* (2022).



Enly Hadiyanor, dilahirkan pada 06 Juli 1975 di Tanjung, Tabalong. Merupakan dosen aktif pada Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat. Meraih Sarjana Ilmu Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 1999, kemudian melanjutkan

pendidikan master pada bidang Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) Universitas Gadjah Mada pada tahun 2000. Isu-isu riset kontemporer yang menjadi perhatian penulis saat ini yakni tentang Pengelolaan Dana Desa, Efektifitas Dana Desa, Pemberdayaan Pemuda serta Gerakan Sosial.

Adapun mata kuliah yang tengah diampu Enly Hadiyanor antara lain Monitoring dan Evaluasi Kebijakan, Sistem Sosial dan Politik Indonesia, Ekonomi Politik Pembangunan, Perbandingan Administrasi Negara dan Pengantar Ilmu Politik. Selain menjalankan tridharma perguruan tinggi, saat ini Enly Hadiyanor juga tercatat sebagai Sekretaris Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Kalimantan Selatan, serta menjadi pengurus inti Ikatan Pesantren Indonesia (IPI) Kalimantan Selatan. Enly Hadiyanor dapat dihubungi melalui email enlyhadiyanor@ulm.ac.id.



Siti Mauliana Hairini, lahir di Kota Banjarmasin, pada 10 Oktober 1990. Meraih gelar Sarjana dari Jurusan Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan studi pascasarjana di Jurusan Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada dan mendapatkan gelar Master pada tahun 2014. Sejak tahun 2015

menjadi Staf pengajar di Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lambung Mangkurat. Kini aktif dalam melakukan riset dibidang politik perempuan serta sedang bertugas sebagai anggota Satgas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Universitas Lambung Mangkurat. Selain aktif menjadi pembicara pada diskusi publik juga menjadi Pengurus DPD KNPI Kalimantan Selatan bahkan menjabat sebagai Pembimbing Lambung Mangkurat Debate Society (2017-sekarang).

Berikut beberapa publikasi karya tulis ilmiah yang dihasilkan baik secara individu maupun bersama tim penelitian:

- PKBI: Aktor Intermediary dan Gerakan Sosial Baru (Jurnal Ilmu Sosial dan Politik/ JSP UGM Volume 16, Nomor 3, Maret 2013/ Tim)
- The Political Habituation of Women's Leadership in Local Election Barito Kuala (Proceeding International Conference and Workshop on Gender oleh LIPI/Tim)
- Politik Sang Ratu: Dramaturgi GKR Hemasdi Yogyakarta (publikasi Buku ber-ISBN/Tim)
- The 3rd "Kongres Sungai Indonesia" as Hybrid Social Movement: The New Combination of Classic Social Movement and New Social Movements (E-Proceeding/Tim)

- Sejarah Gerakan Pemuda Kalimantan Selatan 1900-2000 (Buku Kerjasama dengan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan, 2018/Tim)
- The Digital Responsibility of Woman as The Chief of House Representaives in Banjarmasin City (*International Post-Graduate Conference on Media and Communication* 2019/Tim)
- The Political Strategy of a Migrant Candidate in Pilkades of Batu Meranti Village (Politea: Jurnal Pemikiran Politik Islam, 2019/Tim)
- The Incompetence of Incumbents in the Contestation of 2015 Regional Head Elections in The Central Hulu Sungai Regency of South Kalimantan Province (Atlantis Press, 2019/Tim)
- Hegemony for Local Politics Settlement in Murung Raya Regency (HICOSPOS 2019 Proceedings of The First Hasanuddin International Conference on Social and Political Sciences).
- English Book for Faculty of Social and Political Science Students (arti Kata, 2021)
- dan lain-lain.